



**STRATEGI PNI DALAM MEMENANGKAN
PEMILIHAN UMUM 1955 DI JAWA TENGAH**

SKRIPSI

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Sosial

PERPUSTAKAAN
UNNES
Oleh
SANTOSO MINARNO
NIM 3150404005

**PROGRAM STUDI ILMU SEJARAH
JURUSAN SEJARAH
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2011**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh Pembimbing untuk diajukan ke Sidang

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 14 Juli 2011

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Dra. Ufi Saraswati, M.Hum.
NIP. 19660806 199002 2 001

Drs. Ibnu Sodik, M.Hum.
NIP. 19631215 198901 1 001

Mengetahui,

Ketua Jurusan Sejarah

Arif Purnomo, S.Pd., S.S., M.Pd.
NIP. 19730131 199903 1 002

PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini dipertahankan di hadapan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas

Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang pada :

Hari : Jum'at

Tanggal : 29 Juli 2011

Penguji Utama

Dra. Putri Agus. W., M.Hum.

NIP. 19630816 199003 1 001

Anggota I

Anggota II

Dra. Ufi Saraswati M.Hum.

NIP. 19660806 199002 2 001

Drs. Ibnu Sodiq, M.Hum

NIP. 19631215 198901 1 001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial

Drs. Subagyo, M.Pd.

NIP. 19510808 198003 1 003

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, Juli 2011

Santoso Minarno

NIM. 3150404005

PERPUSTAKAAN
UNNES

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

Lasta masta (membuat hidup lebih hidup)

Persembahan:

- ∅ Teruntuk Ibu, Bapak, dan keluargaku tercinta, terima kasih atas segala doa dan kasih sayangnya yang telah menjadikan aku seperti sekarang.
- ∅ Teman-teman Irawan Kos, spesial buat Tsabit, Saiful, Vena, Ozan, Fatkhan, Nena, *Metropole Squad*.
- ∅ Teman-temanku seperjuangan angkatan 2004, Ilmu Sejarah maupun Pendidikan Sejarah.
- ∅ Untuk para Front Marhaen.
- ∅ Almamater yang kucintai.

PRAKATA

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi yang berjudul “Strategi PNI dalam Memenangkan Pemilihan Umum 1955 di Jawa Tengah” dapat terselesaikan dengan baik.

Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dari berbagai pihak. Dengan segala kerendahan hati serta rasa hormat penulis sampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Sudijono Sastro Atmodjo, M.Si., Rektor Universitas Negeri Semarang
2. Bapak Prof. Dr. Masrukhi, M.Pd., Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan Universitas Negeri Semarang yang senantiasa memberikan motivasi dan semangat kepada penulis.
3. Bapak Drs. Subagyo, M.Pd., Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan saran dan masukan bagi penulis.
4. Bapak Drs. Eko Handoyo, M.Si., Pembantu Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan ijin penelitian serta memotivasi penulis dalam penyusunan skripsi.
5. Bapak Arif Purnomo, S.Pd., S.S., M.Pd., Ketua Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang yang tanpa henti mendorong penulis agar segera menyelesaikan penulisan skripsi.

6. Ibu Dra. Ufi Saraswati, M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang selalu memberikan arahan, bimbingan, petunjuk, nasehat serta motivasi bagi penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
7. Bapak Drs. Ibnu Sodiq, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II yang selalu memberikan arahan, bimbingan, petunjuk, nasehat serta motivasi bagi penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
8. Segenap Dosen Jurusan Sejarah yang senantiasa memberikan berbagai masukan, saran dan kritik yang membangun kepada penulis sehingga terbangun semangat penulis dalam penulisan skripsi.

Semoga jasa dan amal baik yang diberikan mendapat balasan dari Allah SWT. Amin. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi penulis maupun pembaca. Semoga Allah SWT memberikan imbalan dan pahala yang berlimpah. Akhirnya Penulis berharap agar skripsi ini bermanfaat bagi pembaca.

PERPUSTAKAAN
UNNES

Semarang, Juli 2011

Penulis

SARI

Santoso Minarno. 2011. *Strategi PNI dalam Memenangkan Pemilihan Umum 1955 di Jawa Tengah*. Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang xiii + 142 hlm.

Kata kunci: PNI, Pemilu 1955, Kampanye

Hasil pemilu 1955 menunjukkan bahwa PNI muncul sebagai partai pemenang baik pada tingkat nasional, maupun di Jawa Tengah. Kemenangan PNI merupakan cerminan keberhasilan strategi yang diterapkan menjelang pelaksanaan pemilu. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan, perkembangan PNI, rivalitas PNI dengan partai lain, dan strategi yang dilakukan oleh PNI dalam memenangkan pemilu tahun 1955 di Jawa Tengah.

Penelitian menggunakan metode sejarah, meliputi tahapan heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Pada tahap heuristik diperoleh sumber primer berupa sumber sezaman, terutama dari surat kabar Suluh Indonesia dan buku saku dari PNI. Sumber sekunder yang diperoleh adalah hasil-hasil penelitian dan kajian yang relevan dengan rumusan masalah. Setelah sumber diperoleh dilakukan upaya pengecekan keaslian dan kebenaran sumber dengan menganalisis kondisi fisik dan membandingkan informasi antarsumber. Dalam menganalisis data hasil temuan, digunakan pendekatan dari teori marketing politik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemilu 1955 dilakukan secara serempak di wilayah Jawa Tengah tanggal 29 September untuk pemilihan DPR, dan tanggal 15 Desember untuk pemilihan konstituante. PNI banyak mendapat simpatisan dari kalangan pejabat atau golongan priyayi dan masyarakat pedalaman yang loyal terhadap Sukarno. Wacana utama yang dimunculkan PNI pada dasarnya adalah berhubungan dengan marhaenisme dan masalah kemandirian rakyat kecil. Kemudian, wacana Bung Karno sebagai tokoh PNI merupakan pesan penting yang secara efektif mampu menjaring simpati dan suara dari masyarakat golongan bawah. Pada pelaksanaan kampanye, ada pertentangan yang terjadi, terutama antara PNI dengan PKI dan Masyumi. Pertentangan ini menjadi bumbu penyemarak dan dinamika menjelang Pemilu 1955. PNI memenangkan secara mutlak pemilu 1955 di Jawa Tengah dengan mengantongi sepertiga suara Jawa Tengah serta unggul di 21 Kabupaten/kota. Kemenangan PNI dalam pemilu 1955 disebabkan penerapan strategi dalam kemenangan pemilu. Strategi tersebut adalah penguatan terhadap struktur organisasi dan sayap gerak partai dari pusat sampai daerah. Dalam hal ini PNI memiliki beberapa suborganisasi yang bergerak dalam garis komando PNI di berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti gerakan pemuda, petani, wanita, pegawai, serta buruh. Pelabelan Sukarno sebagai bagian dari PNI menjadi salah satu langkah yang digunakan untuk menarik simpati massa. Kemenangan PNI di Jawa Tengah disebabkan strategi PNI yang tepat dalam melakukan pendekatan terhadap para pemimpin lokal.

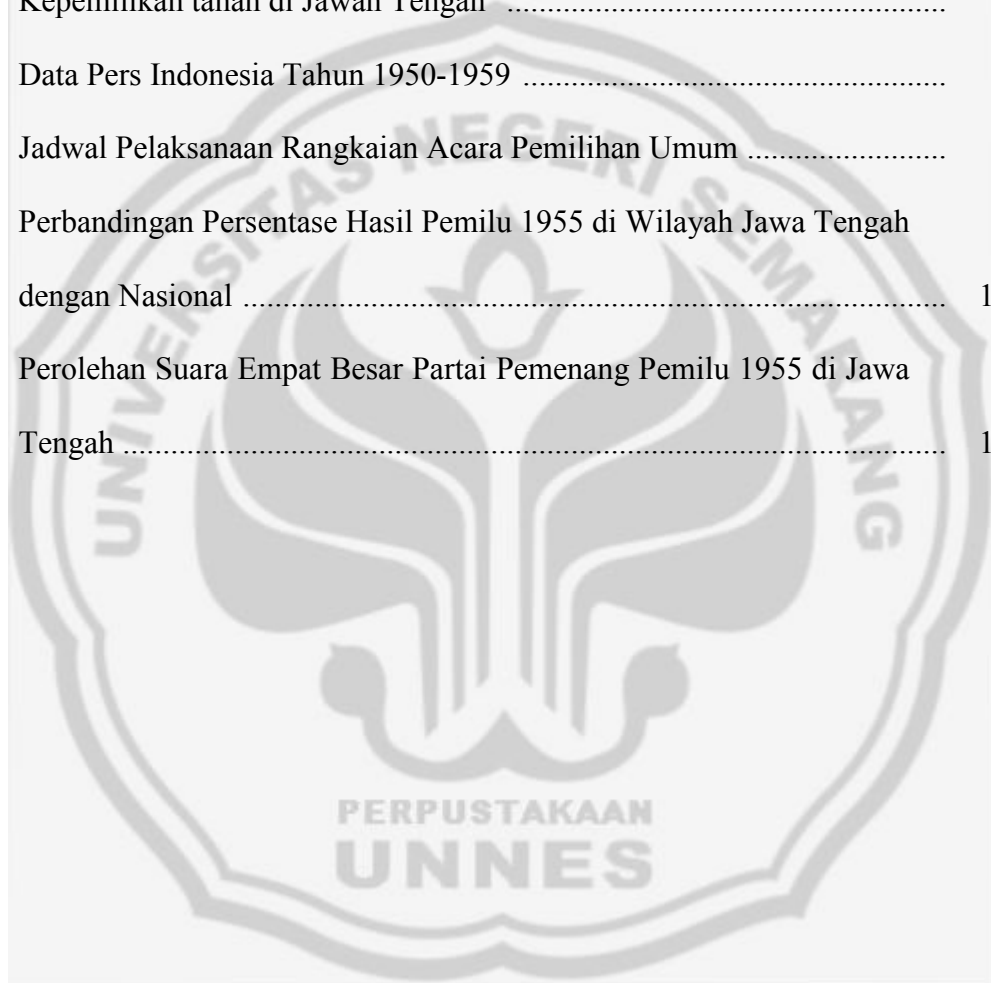
DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
PRAKATA.....	vi
SARI	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Tinjauan Pustaka	8
F. Metode Penelitian	16
G. Kerangka Berpikir	20
BAB II MASYARAKAT JAWA TENGAH MENJELANG PEMILU 1955 ...	28
A. Kondisi Sosial Ekonomi	28

B. Kondisi Budaya Masyarakat Jawa Tengah	33
C. Kondisi Pendidikan dan Perkembangan Media Massa	38
D. Kondisi Keamanan dan Geopolitik Jawa Tengah	42
BAB III SISTEM PELAKSANAAN PEMILU 1955	46
BAB IV PERKEMBANGAN PNI	61
A. PNI Sebelum Kemerdekaan	61
B. PNI Setelah Kemerdekaan	69
C. PNI Jawa Tengah Menjelang Pemilu 1955	76
BAB V RIVALITAS PNI DAN PARTAI LAIN DALAM KAMPANYE PEMILU 1955 DI JAWA TENGAH	82
A. Wacana Kampanye PNI	82
B. Wacana Kampanye PKI	86
C. Wacana Kampanye NU	92
D. Wacana Kampanye Masyumi	97
E. Perang Wacana Kampanye Pemilu 1955	100
BAB VI STRATEGI PNI DALAM PEMENANGAN PEMILU 1955 DI JAWA TENGAH	105
A. Hasil Pemilu 1955 di Jawa Tengah	105
B. Strategi PNI dalam Pemenangan Pemilu	108
BAB VII PENUTUP	124
Simpulan	124
DAFTAR PUSTAKA	126
LAMPIRAN-LAMPIRAN	131

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Kepemilikan tanah di Jawa Tengah	32
2. Data Pers Indonesia Tahun 1950-1959	40
3. Jadwal Pelaksanaan Rangkaian Acara Pemilihan Umum	57
4. Perbandingan Persentase Hasil Pemilu 1955 di Wilayah Jawa Tengah dengan Nasional	105
5. Perolehan Suara Empat Besar Partai Pemenang Pemilu 1955 di Jawa Tengah	107



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Faktor determinan pemilih	25
2. Kemenangan partai-partai di Jawa Tengah	106
3. Propaganda PNI untuk mencitrakan sebagai partai rakyat	111
4. Wacana PNI yang menyerang Masyumi tentang Darul Islam	115



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Suluh Indonesia 14 September 1955	130
2. Suluh Indonesia 23 September 1955	131
3. Suluh Indonesia 26 September 1955	132
4. Suluh Indonesia 29 September 1955	133
5. Suluh Indonesia 3 Agustus 1955	134
6. Suluh Indonesia 5 September 1955	135
7. Suluh Indonesia 7 September 1955	136
8. Suluh Indonesia 15 September 1955	137
9. Suluh Indonesia 15 September 1955	138
10. Suluh Indonesia 15 September 1955	139
11. Antara 26 Desember 1955	140
12. Antara 26 Desember 1955	141
13. Surat Izin Penelitian	142

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan Umum (pemilu) yang diselenggarakan pada tahun 1955 merupakan Pemilu pertama yang dilakukan di Indonesia. Rakyat menggunakan haknya untuk menentukan pilihan tentang siapa yang menjadi perwakilannya pada parlemen dan konstituante. Pemilu dilaksanakan dua tahap, yakni pada tanggal 29 September 1955 untuk pemilihan anggota parlemen dan pada 15 Desember 1955 untuk Konstituante (Poesponegoro dan Notosusanto [ed], 1984: 222).

Pemilu 1955 merupakan peristiwa kedua terbesar setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia tahun 1945, sehingga dapat diperkirakan bahwa mayoritas rakyat Indonesia antusias sekali menghadapi peristiwa bersejarah tersebut. Apalagi muncul berbagai tuntutan dan harapan dari rakyat agar Pemilu dapat mengatasi segala persoalan yang dihadapi bangsa pada saat itu, baik berupa kemelut politik yang berkepanjangan, kemerosotan ekonomi maupun ancaman terhadap keamanan (Friyanti, 2005: 47).

Pemilu merupakan suatu proses yang penting karena kekuatan partai-partai politik terukur lebih cermat dan parlemen yang dihasilkan lebih bermutu sebagai lembaga perwakilan. Oleh karena pentingnya pelaksanaan Pemilu, setelah memperoleh kedaulatan wacana ini kemudian menjadi program yang paling ditekankan (Feith, 1954: 236-254).

Pemilu adalah sarana demokrasi untuk membentuk sistem kekuasaan negara yang berkedaulatan rakyat dan permusyawaratan perwakilan. Kekuasaan negara yang lahir dengan Pemilu adalah kekuasaan yang lahir dari bawah menurut kehendak rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Pemilu 1955 berasaskan pada langsung, umum, bebas, rahasia dan kebersamaan. Dengan asas kebersamaan ini setiap individu diakui kesamaan hak dan kedudukannya sesuai dengan prinsip persamaan di depan hukum (Friyanti, 2005: 1).

Pemilu yang dilakukan pada tahun 1955 terjadi pada kurun waktu ketika berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia tengah berada pada masa perkembangan tetapi masih fluktuatif. Dari tahun 1950 sampai 1961 jumlah penduduk meningkat sebesar 25,6 %. Diperkirakan jumlah penduduk pada tahun 1950 adalah 77,2 juta jiwa, pada tahun 1955 menjadi 85,4 juta jiwa dan pada sensus 1961 menjadi 97 juta jiwa (Ricklefs, 2005: 472). Jumlah angka melek aksara meningkat menjadi 46,7% dari jumlah anak-anak di atas usia 10 tahun pada tahun 1961 yang berimplikasi terhadap kenaikan oplah surat kabar antara tahun 1950-1956 adalah 86,6% dan majalah meningkat tiga kali lipat di atas 3,3 juta. Sampai tahun 1961, jumlah melek aksara di Jawa 45,5% dan 56,6% di Sumatera. Untuk penduduk laki-laki berusia 10-19 tahun jumlahnya di atas 76%. Sementara itu, oplah surat kabar pada tahun 1950 hanya di bawah 500.000 eksemplar dan pada tahun 1956 meningkat menjadi 933.000 ekspemplar (Ricklefs, 2005: 474).

Sementara itu, kondisi ekonomi mengalami proses yang sangat fluktuatif dan terjadi ketidakstabilan (Dick, 2002: 191). Pelaksanaan Pemilu yang pertama, dengan demikian tengah berada pada situasi transisi, sehingga

Pemilu 1955 menjadi harapan baru bagi masyarakat. Inilah faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran pemilih pada saat Pemilu tahun 1955.

Ditinjau dari aspek politik, pelaksanaan Pemilu tahun 1955 berlangsung ketika Indonesia berada pada masa yang disebut sebagai masa “percobaan demokrasi” (Ricklefs, 2005: 289-311). Masa percobaan demokrasi (*the democratic experiment*) merupakan satu tahapan ketika Indonesia masih mencari format pemerintahan dan sistem politik yang sesuai dengan kondisi Indonesia. Pada masa itu sistem pemerintahan bersifat liberal ketika menggunakan sistem parlementer. Periode demokrasi parlementer merupakan masa paling dinamis saat bangsa Indonesia mulai bereksperimen dengan demokrasi (Feith, 1962: xi), Sistem parlementer multi partai dengan kekuatan berimbang memicu persaingan antar berbagai kelompok politik untuk saling menjatuhkan. Menjelang Pemilu pertama di Indonesia pada 1955, terdapat 172 partai dan kelompok kuasi-politik yang mencerminkan pertentangan eksternal dan pemisahan internal yang terus berlangsung dalam tradisi-tradisi politik Indonesia (Latif, 2005: 380-381).

Pengontrolan politik di Indonesia menjelang Pemilu juga sangat dinamis bahkan cenderung fluktuatif. Dari September 1950 hingga Pemilu 1955, Indonesia mengalami jatuh-bangun lima kabinet yang berbeda, yaitu Kabinet Mohammad Natsir dari Masyumi (September 1950-April 1951). Kabinet Sukiman Wirjosandjojo dari Masyumi (April 1951-Februari 1952). Kabinet Wilopo dari PNI (April 1952-Juni 1953). Kabinet Ali Sastroamidjojo I dari PNI (Juli 1953-Juli 1955), dan Kabinet Burhanuddin Harahap dari Masyumi (Agustus 1955-Maret 1956).

Keadaan-keadaan menjelang Pemilu 1955 menandakan Indonesia tengah berada pada masa transisi. Hal ini berarti ditinjau dari perpektif politik, berbagai daya upaya dilakukan oleh kekuatan-kekuatan politik untuk memperoleh eksistensi dan menanamkan pengaruhnya pada masyarakat. Kekuatan politik tersebut dengan demikian memiliki harapan untuk muncul sebagai kelas penguasa.

Situasi transisi yang melatarbelakangi pelaksanaan Pemilu 1955 ditambah dengan adanya harapan yang besar dari berbagai kalangan terhadap Pemilu menjadikan partai-partai politik untuk melakukan strategi dalam rangka mendulang suara dari rakyat. Kampanye-kampanye mulai dilakukan dan frekuensinya meningkat setelah Panitia Pemilihan Indonesia pada tanggal 16 April 1955 mengumumkan bahwa Pemilu untuk parlemen diadakan pada tanggal 29 September 1955 (Poesponegoro dan Notosusanto [ed], 1984: 219). Dinamika yang terjadi dalam kampanye Pemilu 1955 menyebabkan tarik ulur kepentingan masing-masing kekuatan politik menjelang Pemilu 1955.

Semakin mendekati waktu yang ditentukan suasana semakin tegang. Hal ini karena masing-masing pihak berusaha untuk menang. Kehidupan partai politik menjelang diselenggarakannya Pemilu banyak diwarnai oleh pertentangan politik, terutama oleh partai-partai besar. Partai politik berupaya mencari dukungan massa dengan menyelenggarakan kampanye. Upaya ini dilakukan mulai dari tingkat pusat sampai pada tingkat regional di desa-desa sebagai lumbung-lumbung suara partai.

Pemilu tahun 1955 bukan hanya sebagai kegiatan pemilihan anggota DPR dan konstituante, melainkan juga proses pendidikan politik bagi

masyarakat. Salah satu bentuk pendidikan politik menjelang Pemilu adalah proses sosialisasi yang dilakukan oleh partai-partai politik yang diimplementasikan dalam program kampanye. Oleh karena itu, untuk membatasi kajian, penelitian ini secara spesifik melakukan kajian terhadap aktivitas strategi pemenangan Pemilu yang dilakukan oleh PNI pada tahun 1955.

Lingkup spasial penelitian ini adalah di Jawa Tengah. Jawa Tengah menjadi kajian dalam penelitian ini. Jawa Tengah yang dimaksud di sini adalah Jawa Tengah sebagai daerah Pemilu bukan sebagai wilayah administratif berdasarkan UU No 7 tahun 1953. Daerah Jawa Tengah sendiri meliputi Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Ditinjau dari skala nasional, hasil Pemilu di Jawa Tengah menyumbang sekitar 23,5% perolehan suara nasional pada pemilihan anggota parlemen dan menyumbang 23,9% dalam pemilihan anggota konstituante. Jumlah suara yang sah pada Pemilu di daerah Jawa Tengah mencapai 8.901.414 suara untuk pemilihan anggota parlemen dan 9.051.547 suara saat pemilihan anggota konstituante (Feith, 1971: 66).

Pada Pemilu untuk anggota parlemen dan anggota konstituante terjadi perubahan suara di Jawa Tengah. Pada empat partai pemenang Pemilu terjadi peningkatan suara sebesar 152.020 untuk PNI dan sebesar 50.596 suara untuk NU. Sementara itu suara untuk Masyumi dan PKI justru menurun. Masyumi menurun sebanyak 9.831 suara dan PKI turun sebesar 21.067 (Feith, 1971: 66). Hal ini menunjukkan peran penting Jawa Tengah terhadap suara-suara partai untuk kemenangan di tingkat nasional. Bahkan suara PNI dan PKI

tertinggi untuk tingkat nasional berasal dari Jawa Tengah dibandingkan perolehan di daerah-daerah pemilihan lainnya.

Dikaitkan dengan empat partai pemenang Pemilu, Jawa Tengah pada pemilihan parlemen menyumbang kemenangan secara nasional sekitar 35,8% untuk PNI, 11,5 % untuk Masyumi, 25,5% untuk NU, dan sebagai penyumbang suara terbesar untuk PKI dengan perolehan suara 37,6% suara nasional. Pada pemilihan anggota konstituante, untuk tingkat nasional Jawa Tengah menyumbang suara 34,9% untuk PNI, 11,4% untuk Masyumi, 26% untuk NU, dan 36,9% untuk PKI. Jawa Tengah dengan demikian memiliki kontribusi terhadap konstelasi dan peta perpolitikan nasional pada tahun 1950-an (Feith, 1971: 66).

Secara spesifik penelitian ini mengangkat upaya yang dilakukan oleh PNI dalam memenangkan pemilu di Jawa Tengah. PNI dipilih sebagai objek kajian karena secara nasional PNI menduduki peringkat pertama hasil Pemilu dengan jumlah suara 8.434.653. Selain itu, PNI juga memperoleh suara terbanyak di Jawa Tengah, yakni 3.019.568 untuk pemilihan anggota parlemen (Ricklefs, 2004: 304; Feith, 1971: 78). Sebagai partai yang memenangkan Pemilu, PNI pasti memiliki strategi yang efektif untuk mempengaruhi pemilih, sehingga sanggup melampaui perolehan suara partai politik yang lain. Keunikan lain adalah PNI merupakan partai yang memiliki sejarah panjang, karena telah berdiri sejak zaman pergerakan nasional, sehingga telah banyak memiliki pengalaman dalam perpolitikan nasional. Di satu sisi, selain sebagai partai pemenang dan partai yang telah berkembang

cukup lama, hal menarik dalam PNI adalah bahwa pada saat itu, PNI bukan sebagai partai *incumbent*, di mana saat itu perdana menteri dipegang oleh Burhanudin Harahap, dari Masyumi. Hal ini menjadikan gerakan PNI semakin aktif untuk memenangkan Pemilu.

Dari latar belakang pemikiran di atas, sangat menarik untuk melakukan sebuah kajian tentang bagaimana strategi yang dilakukan oleh PNI sebagai partai pemenang pemilu dalam menjaring suara pada pemilihan anggota parlemen maupun konstituante pada tahun 1955. Penelitian ini bermaksud melakukan sebuah kajian dalam perspektif historis tentang bagaimana strategi yang diterapkan PNI untuk memenangkan Pemilu 1955 di Jawa Tengah. Selain itu, penelitian ini juga bermaksud untuk mendeskripsikan berbagai bentuk pergesekan kepentingan antara PNI dengan berbagai partai politik lain pada Pemilu 1955. Oleh karena itu, penelitian ini mengangkat judul *Strategi PNI dalam Memenangkan Pemilu 1955 di Jawa Tengah*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang pemikiran di atas, rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana sistem pelaksanaan Pemilu 1955 di Jawa Tengah?
2. Bagaimana perkembangan PNI di Jawa Tengah?
3. Bagaimana rivalitas PNI dengan partai lain dalam Pemilu 1955 di Jawa Tengah?
4. Bagaimana strategi yang dilakukan oleh PNI dalam memenangkan Pemilu 1955 di Jawa Tengah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Untuk mengetahui sistem pelaksanaan Pemilu 1955 di Jawa Tengah.
2. Untuk mengetahui perkembangan PNI di Jawa Tengah.
3. Untuk mengetahui rivalitas PNI dengan partai lain dalam Pemilu 1955 di Jawa Tengah.
4. Untuk mengetahui strategi yang dilakukan oleh PNI dalam memenangkan Pemilu 1955 di Jawa Tengah.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Secara akademis, penelitian ini memberikan sebuah kajian ilmiah tentang strategi pemenangan Pemilu yang dilakukan oleh PNI.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini memberikan sebuah sumbangan tentang strategi dalam membangun marketing politik di Jawa Tengah dalam upaya menjaring suara rakyat, sekaligus mengetahui karakteristik pemilih di Jawa Tengah dalam perspektif sejarah.

E. Tinjauan Pustaka

Kajian tentang pelaksanaan Pemilu 1955 merupakan sebuah kajian yang menarik. Hal ini karena Pemilu 1955 yang bertujuan untuk memilih anggota parlemen dan konstituante merupakan tahapan politik yang sangat

diharapkan oleh rakyat sekaligus menjadi satu titik tolak perjalanan demokrasi suatu negara. Berkaitan dengan Pemilu 1955 ada beberapa kajian terdahulu yang pernah dilakukan seperti dalam tulisan Herbert Feith (1954, 1962, 1971), Fiska Friyanti (2005), Siti Khotimah (2003), dan Gunawan Wicaksono (2006).

Herbert Feith dalam tulisannya yang berjudul *Toward Election in Indonesia* menjelaskan tentang tahapan-tahapan dan proyeksi tentang pelaksanaan Pemilu yang baru akan dilaksanakan satu setengah tahun setelah tulisan ini dibuat. Tulisan ini secara gamblang menjelaskan proses yang dilakukan sebelum Pemilu. Herbert Feith menjelaskan bahwa Pemilu ini merupakan salah satu program yang paling penting yang diprioritaskan setelah Indonesia memperoleh kedaulatan dalam Konferensi Meja Bundar. Kemudian setelah RIS bubar dan kembali ke Republik Indonesia program pelaksanaan Pemilu tetap menjadi prioritas walaupun ada berbagai permasalahan seputar hak pilih, sistem pelaksanaan Pemilu, berbagai pertentangan faksi-faksi politik di parlemen, permasalahan konflik dalam militer, serta instabilitas kondisi keamanan dalam negeri, dan berbagai permasalahan ekonomi. Dalam artikelnya, Herbert Feith juga mencoba memetakan bagaimana kekuatan partai-partai politik yang akan ikut serta dalam Pemilu. Bagian terpenting dari tulisan Herbert Feith ini adalah ulasannya tentang jalan panjang perencanaan pelaksanaan Pemilu seperti tarik ulur kepentingan pihak-pihak tertentu, perubahan-perubahan peraturan, serta pembenahan sistem pemilihan. Dalam tulisan ini dijelaskan pula berbagai peristiwa lain yang turut mewarnai jalan menuju Pemilu seperti peristiwa 17 Oktober 1952 (Feith, 1954: 32).

Karya Herbert Feith yang kedua adalah berupa laporan dalam program Modern Indonesia Project yang dilakukan oleh South East Asia Program Cornell University. Karya Herbert Feith dengan judul *The Indonesian Election of 1955* menjadi karya rujukan utama kajian tentang pelaksanaan Pemilu tahun 1955. Dalam penulisan, kebetulan waktu itu Herbert Feith bekerja di Kementerian Penerangan RI, 1951-3 dan 1954-6. Masa empat tahun itu telah mengantar Herbert Feith untuk memperoleh gelar doktor di Cornell University, 1960. Jadi, Herbert Feith menulis karyanya ini berdasarkan pengalaman pribadi ditambah dengan berbagai dokumen dan berita media massa, yang dikatakannya “sangat bebas” waktu itu (Feith, 1962: 10).

Buku ini terdiri atas lima bagian, yakni (1) *introduction*, (2) *campaign A*, (3) *campaign B*, (4) *the ballot* (5) *analysis*. Pada bagian pertama, Herbert Feith menjelaskan tentang latar belakang pelaksanaan Pemilu sebagai salah satu tahap penting proses demokratisasi di Indonesia. Pada bagian ini dijelaskan pula tentang jalan panjang menuju pemilihan umum, sistem pelaksanaan Pemilu, serta jumlah suara yang masuk pada Pemilu. Bagian kedua dan ketiga dari buku ini menjelaskan tentang kampanye yang dilakukan oleh partai politik menjelang pelaksanaan Pemilu. Bagian keempat menjelaskan tentang hasil perolehan suara pada Pemilu 1955. Pada bagian keempat ini dijelaskan bahwa jumlah suara sah adalah 37.875.299 (97,1 % jumlah suara). Pada bagian kelima dijelaskan tentang analisis pelaksanaan Pemilu yang dilengkapi dengan perolehan suara untuk tiap wilayah dan pembagian suara berdasarkan partai. Biaya Pemilu sebesar Rp479.891.729,00

atau Rp11,00 per pemilih terdaftar yang setara dengan delapan kg beras pada saat itu (Feith, 1962: 12).

Herbert Feith (1962: 135) menjelaskan bahwa terdapat hasil yang mengejutkan bahwa terjadi kesuksesan NU dan “kegagalan” Masyumi. Jumlah wakil NU di parlemen naik dari 8 ke 45 (463 %), sedang Masyumi naik sedikit saja dari 44 ke 57 (30 %). Selain itu PKI dan PNI sangat sukses di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Hal lain yang mengejutkan adalah merosotnya jumlah kursi PSI (Partai Sosialis Indonesia) di parlemen dari 14 ke 5 (-64 %); Murba dari 4 ke 2 (-50 %), punah atau hampir punahnya partai-partai kecil lain beraliran nasionalis seperti PRN (Partai Rakyat Nasional) dari 13 ke 2 (-85 %), PIR (Partai Indonesia Raya) Hazairin dari 18 ke 1 (-94 %), PIR Wongsonegoro tetap 1, Partai Buruh dari 6 ke 2 (-67 %); Parindra (Partai Indonesia Raya) dan SKI (Serikat Kerakyatan Indonesia) dua-duanya lenyap.

Tulisan ketiga Herberth Feith yang relevan dengan kajian tentang Pemilu adalah buku dengan judul *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia*. Buku ini berasal dari disertasi doktoralnya yang menganalisis tentang politik di Indonesia masa demokrasi liberal. Pada buku ini ulasan yang dilakukan oleh Herbert Feith didasarkan pada tiap kabinet. Bagian yang mengulas tentang Pemilu dalam buku ini terdapat pada bagian yang mengulas kabinet Ali Sastroamidjojo yang pertama serta kabinet Burhanudin Harahap. Hampir mirip dengan kedua tulisan sebelumnya, dalam buku ini Herbert juga menjelaskan tentang tahap perencanaan pelaksanaan Pemilu, masa kampanye, pelaksanaan Pemilu dan hasil serta implikasinya dalam konstelasi politik masa demokrasi liberal (1971: x).

Selain kajian yang dilakukan oleh Herbert Feith tentang pelaksanaan pemilihan umum 1955, ada pula beberapa hasil penelitian untuk tugas akhir studi yang dilakukan oleh mahasiswa. Ulasan tentang pelaksanaan Pemilu dalam sejarah nasional Indonesia menjadi bahan kajian yang dilakukan oleh Fiska Friyanti dalam skripsinya yang berjudul *Pelaksanaan Pemilu dalam Sejarah Nasional Indonesia*. Penelitian Fiska Friyanti (2005: xi) ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Pemilu 1955, untuk mengetahui pelaksanaan Pemilu masa Orde Baru, mengetahui pelaksanaan Pemilu masa Reformasi, untuk mengetahui perbedaan pelaksanaan Pemilu Orde Baru dan Reformasi khususnya Pemilu 2004.

Dalam ulasannya tentang Pemilu 1955, Fiska Friyanti menjelaskan bahwa Pemilu ini sangat menarik perhatian karena selain merupakan pengalaman pertama dalam bidang politik yang bersifat nasional dalam menjalankan demokrasi, Pemilu ini juga merupakan konsensus nasional yang pertama kalinya dicapai pada masa pasca revolusi nasional. Pemilu 1955 sudah dapat dikategorikan sebagai Pemilu yang sangat demokratis sebab Pemilu 1955 diikuti oleh banyak partai politik yang menandakan adanya kebebasan berpolitik, rakyat menggunakan hak pilihnya dengan ikut berpartisipasi pada Pemilu, Pemilu telah menghasilkan lembaga legislatif, adanya penyelenggara Pemilu yang bersifat independen sehingga Pemilu 1955 dapat dikategorikan sebagai Pemilu yang demokratis. Dalam bagian tentang Pemilu 1955 dijelaskan pula tentang landasan hukum pelaksanaan Pemilu 1955, sistem Pemilu 1955, kedudukan Panitia Pemilihan Indonesia,

Kampanye Pemilu 1955, peserta Pemilu 1955 dan tentang pelaksanaannya (Friyanti, 2005: 135).

Kajian berikutnya yang berkaitan dengan Pemilu 1955 adalah kajian yang dilakukan oleh Siti Khotimah yang membuat tulisan dengan judul *Peranan Pers dalam Perjuangan Partai Politik pada Masa Demokrasi Liberal 1950-1959 (Sebuah Tinjauan terhadap Suluh Indonesia dan harian Rakyat)*. Tulisan Siti Khotimah (2003) tidak secara spesifik membatasi kajian hanya pada saat Pemilu, tetapi juga meluas pada masa demokrasi liberal. Dalam tulisannya, ia mencoba untuk menggambarkan mengenai kehidupan partai politik dan pers pada masa demokrasi liberal serta apa saja usaha yang dilakukan oleh partai politik dalam menggunakan pers untuk memenangkan Pemilu tahun 1955.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Siti Khotimah (2003) adalah bahwa sistem kepartaian di Indonesia pada masa demokrasi liberal adalah sistem multipartai. Hal tersebut diawali dengan keluarnya maklumat 3 November 1945 oleh pemerintah yang berisi anjuran untuk membentuk partai-partai politik agar berbagai pendapat yang ada dalam masyarakat dapat tersalur secara tertib dan agar perjuangan mempertahankan kemerdekaan semakin kuat. Partai-partai politik yang muncul setelah maklumat tersebut antara lain PKI, Masyumi, PBI, Parkindo, PSI, PNI, PSII, dan lain-lain (Khotimah, 2003: 93).

Demokrasi liberal yang belaku di Indonesia juga ditandai dengan liberalisme di bidang pers. Pada waktu itu tidak ada pembatasan dalam

pengeluaran surat kabar sehingga banyak orang yang berlomba-lomba untuk mendirikan penerbitan surat kabar. Hal ini terjadi karena liberalisme di bidang pers mengakibatkan tidak adanya pembatasan dalam pengeluaran surat kabar. Namun demikian, banyak terjadi pula penutupan penerbitan surat kabar karena tidak mampu bersaing. Pada masa liberal, pers bertindak melampaui batas-batas kesopanan. Kebebasan pers banyak digunakan untuk saling mencaci dan memfitnah lawan politiknya dengan tujuan agar lawan politik itu jatuh namanya di pandangan masyarakat (Khotimah, 2003: 4).

Menghadapi Pemilu, berbagai partai politik menggunakan surat kabar untuk membuat propaganda politik mereka. PNI sebagai partai terbesar menggunakan surat kabar yang dimilikinya, yaitu *Suluh Indonesia* dengan selalu memuat daftar nama pemimpin partai, meskipun hal ini tidak terlalu intensif karena tidak disertai riwayat lengkap hidup mereka. *Suluh Indonesia* juga selalu memuat program dan rapat serta ceramah yang sukses digelar PNI di berbagai tempat. Tanda gambar PNI selalu dimuat pada tiap edisi (Khotimah, 2003: 90).

Partai komunis memiliki *Harian Rakyat* yang memuat daftar calon PKI yang akan duduk dalam parlemen. Program PKI yang dimuat secara teratur dan terus menerus, rajin membuat *interview* tentang kesulitan hidup orang kecil, bahkan PKI tidak segan-segan mencela dan memfitnah partai lain dalam *Harian Rakyat*. Tanda gambar PKI juga selalu dimuat dalam setiap edisi (Khotimah, 2003: 94).

Kajian tentang Pemilu dari perpektif yang agak berbeda dengan beberapa kajian sebelumnya dilakukan oleh Gunawan Wicaksono (2006) dalam penelitiannya berjudul *Peran Tentara Teritorium IV Diponegoro dalam Pelaksanaan Pemilu 1955 di Jawa Tengah*. Penelitian ini berusaha menggambarkan dan menganalisa tentang Peran Tentara Teritorium IV Diponegoro dalam Pelaksanaan Pemilu 1955 di Jawa Tengah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang (1) Kondisi sosial-politik di Jawa Tengah menjelang Pemilu 1955, (2) Pelaksanaan dan hasil Pemilu 1955 di Jawa Tengah, (3) Peran Tentara dan Territorium IV Diponegoro dalam pelaksanaan Pemilu 1955 di Jawa Tengah.

Berdasarkan penelitian ini dapat diketahui bahwa pada waktu menjelang Pemilu yaitu pada pelaksanaan kampanye kondisi sosial-politik semakin panas, karena partai-partai politik meningkatkan kegiatan kampanyenya. Tidak bisa dihindari dalam kampanye tersebut sering menimbulkan gesekan-gesekan pada tingkat massa. Pemilu 1955 dapat terlaksana dengan aman, lancar dan emokratis. Pemilu 1955 memiliki 2 tahap yaitu tahap pertama pemilihan untuk anggota DPR pada tanggal 29 September 1955 dan Pemilu untuk anggota Konstituante pada tanggal 15 Desember 1955. Pada pemilihan untuk anggota DPR dan Konstituante menghasilkan empat partai besar yaitu PNI, PKI, NU dan Masyumi. Pada pemilihan DPR dan konstituante PNI menang di Kedu, Banyumas, Pekalongan dan Pati, PKI menang di Semarang dan Surakarta. (Wicaksono, 2006: 81).

Anggota tentara yang bernaung dalam Tentara & Teritorium IV Diponegoro juga memiliki peran penting dalam Pemilu yaitu salah satunya menjalankan pengamanan dalam mensukseskan Pemilu. Sebagai tugas yang diembannya untuk mengawal dan menjaga dari proses demokrasi yang sedang berjalan dengan mencegah segala kemungkinan dan tindakan yang mengarah timbulnya gangguan keamanan. Maka diadakan beberapa persiapan yang intensif guna kelancaran jalannya Pemilu. Persiapan intern adalah melakukan penerangan terhadap semua anggota tentara, latihan Pengendalian Huru-Hara, persiapan pencalonan yang berada di lingkungan divisi Diponegoro. Persiapan ekstern adalah melakukan penerangan pada masyarakat, para tahanan bekerjasama dengan Jawatan Penerangan dan Kejaksaan di Jawa Tengah. Juga pengawalan pada surat suara dari pusat ke daerah dan sebaliknya. Tentara dalam Pemilu 1955 ini, mampu menempatkan diri, tidak memihak dan menjalankan tugasnya dengan baik (Wicaksono, 2006: 92).

F. Metode Penelitian

Adapun langkah-langkah penelitian sejarah yang diambil dalam skripsi ini, adalah sebagai berikut:

1. Heuristik

Heuristik dapat diartikan sebagai pengumpulan sumber. Dalam tahap ini peneliti melakukan usaha pengumpulan sumber yang relevan dengan objek studi penelitian, dan yang memiliki korelasi dengannya, diantaranya ialah tabel dan data statistik. Sumber-sumber itu diperoleh dari koleksi Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, Perpustakaan

Daerah Jawa Tengah, Perpustakaan Wilayah Yogyakarta, Perpustakaan Universitas Negeri Semarang, Perpustakaan Universitas Sebelas Maret.

Menurut jenisnya, sumber itu dapat dikategorikan menjadi dua, yakni: *sumber primer* dan *sumber sekunder*. Menurut Gottschalk, sumber primer adalah kesaksian dari seseorang dengan mata kepala sendiri atau saksi dengan panca indera lain atau alat mekanik, sedangkan J.W. Best, mendefinisikan sumber primer sebagai sumber cerita atau catatan saksi, ataupun pengamat, yang berisi catatan saksi di mana para saksi tersebut menyaksikan peristiwa itu, atau menjadi pelaku utama dari peristiwa.

Dari kedua pengertian tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa sumber primer merupakan sumber langsung dalam sebuah peristiwa sejarah. Sumber-sumber yang akan terdiri atas sumber primer berupa sumber sezaman seperti arsip tentang kondisi masyarakat Jawa Tengah dari aspek sosial, ekonomi, dan pendidikan pada tahun 1950-an. Selain itu untuk mencari data tentang pelaksanaan Pemilu 1955, penulis mencoba untuk mendapatkan peraturan-peraturan yang mengatur pelaksanaan Pemilu yakni Maklumat Wakil Presiden Mohammad Hatta tanggal 3 November 1945, yang berisi anjuran tentang pembentukan partai-partai politik. UUDS 1950, UU No 27 tahun 1948 tentang Pemilu, yang kemudian diubah dengan UU No. 12 tahun 1949 tentang Pemilu, serta UU No. 7 Tahun 1953 tentang Pemilu. Kemudian untuk mencari data tentang wacana dan berbagai pertarungan wacana penulis mencari dari surat kabar yang terbit menjelang pelaksanaan Pemilu, baik Pemilu untuk

anggota parlemen atau untuk konstituante. Surat kabar yang dijadikan kajian terdiri atas surat kabar yang dikeluarkan oleh partai seperti *Harian Abadi* milik Masyumi, *Suluh Indonesia* milik PNI, *Duta Masyarakat* milik NU, dan *Harian Rakyat* milik PKI. Selain itu untuk menjaga objektivitas peneliti menggunakan pula surat kabar yang terbit secara independen seperti *Suara Merdeka* dan *Kedaulatan Rakyat* serta beberapa terbitan lainnya yang mengulas tentang pelaksanaan kampanye dan Pemilu 1955.

Sumber sekunder, menurut Helius Sjamsudin (2009) adalah apa yang ditulis oleh sejarawan sekarang atau sebelumnya berdasarkan pada sumber-sumber pertama atau primer. Louis Gottschalk berpendapat bahwa sumber sekunder adalah sumber yang diperoleh bukan dari kesaksian atau pelaku langsung dari peristiwa. Adapun sumber sekunder yang digunakan, yaitu buku dan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini antara lain buku tulisan Herbert Feit berjudul *The Indonesian Election of 1955, Toward Election in Indonesia, The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia*. Selain itu digunakan pula penelitian-penelitian tentang Pemilu 1955 seperti *Pelaksanaan Pemilu dalam Sejarah Nasional Indonesia* oleh Fiska Friyanti, *Peranan Pers dalam Perjuangan Partai Politik pada Masa Demokrasi Liberal 1950-1959 (Sebuah Tinjauan terhadap Suluh Indonesia dan harian Rakyat)* oleh Siti Khotimah, dan penelitian Gunawan Wicaksono tentang *Peran Tentara Teritorium IV Diponegoro dalam Pelaksanaan Pemilu 1955 di Jawa Tengah*.

2. Kritik Sumber

Kritik sumber merupakan verifikasi sumber. Dalam tahap ini, peneliti melakukan verifikasi sumber atas sumber yang telah diperoleh untuk memastikan keabsahan dan keotentikan sumber itu sebelum digunakan dalam kegiatan penelitian. Adapun kritik sumber dibagi ke dalam dua bentuk kritik, yakni: *kritik ekstern*, dan *kritik intern*. Kritik ekstern adalah upaya menguji otentisitas sumber ditinjau dari *segi fisik*, misalnya jenis bahan baku (kertas dan tinta), tahun pembuatan, ataupun usia sumber. Sedangkan kritik intern yaitu usaha menyelidiki keakuratan sumber dari *segi isi* atau *muatan sumber* dilihat dari sifat sesuai tidaknya informasi yang dimiliki sumber dengan persoalan yang akan dibahas, baik itu menyangkut kebenaran isi, gaya bahasa, ataupun ide yang dikandung sumber. Dengan adanya *kritik sumber* itu diharapkan peneliti dapat mengurangi kesalahannya di dalam memilih sumber sebelum digunakan dalam kegiatan penulisan.

Setelah sumber-sumber diperoleh peneliti melakukan upaya penilaian tentang keaslian sumber seperti mengamati hasil cetakan, jenis huruf, usia kertas dan sebagainya. Kemudian untuk mengetahui tingkat kredibilitas data peneliti membandingkan data yang satu dengan data yang lain, sehingga dapat diperoleh data dengan tingkat keterandalan yang baik.

3. Interpretasi

Interpretasi merupakan usaha interpretasi atau menafsir sumber. Dalam tahap ini peneliti sedikit melakukan interpretasi atau penafsiran

sumber, tetapi lebih banyak menghitung berdasarkan tabel dan data statistik. Hasil kesimpulan dari pembacaan tabel dan penghitungan data statistik itu digunakan untuk mendukung analisis dan hipotesa penelitian.

Dalam menganalisis data-data hasil temuan, peneliti menggunakan pendekatan dari teori marketing politik. Hal ini karena peneliti mencoba untuk mencari bagaimana bentuk-bentuk marketing politik yang dilakukan oleh partai-partai politik menjelang Pemilu. Dengan bantuan dari teori marketing politik peneliti kemudian dapat menemukan fakta-fakta sejarah berkaitan dengan pertarungan wacana yang dilakukan oleh partai politik dalam kampanye Pemilu 1955.

4. Historiografi

Historiografi diartikan sebagai penulisan sejarah. Tahap ini merupakan penyajian hasil penelitian dalam bentuk penulisan sejarah. Hasil penelitian itu ialah kesimpulan atau sintesa yang telah diperoleh setelah melewati tahapan-tahapan pokok dalam penelitian sejarah seperti *heuristik*, *kritik sumber*, dan *interpretasi*. Adapun objektivitas tulisan sejarah yang dihasilkan dari penulisan itu juga dipengaruhi oleh sumber-sumber yang digunakan (primer maupun sekunder), dan sumber-sumber pendukung lainnya.

Pada tahap ini, setelah fakta-fakta sejarah ditemukan, peneliti mencoba merangkai fakta-fakta tersebut menjadi satu gagasan yang utuh dan bersinambung, sehingga terciptalah sebuah cerita sejarah tentang pertarungan wacana menjelang Pemilu 1955 di Jawa Tengah.

G. Kerangka Berpikir

Edmund Burke (dalam Haricahyono, 1986: 215) seorang negarawan Inggris mengemukakan, bahwa yang disebut partai politik ialah "*... a group of men who had agreed upon a principle by which the national interest might be served*". Dikatakan, bahwa partai politik tidak lain merupakan sekelompok manusia yang secara bersama-sama menyetujui prinsip-prinsip tertentu untuk mengabdikan dan melindungi kepentingan nasional.

Samuel J. Elderveld (dalam Haricahyono, 1986: 218) membicarakan partai-partai politik dari sudut pandang tingkah laku suatu kelompok sosial dengan menariknya ke dalam aktivitas terpolakan menurut bentuk matriks sosial. Jika diinterpretasikan sebagai suatu organisme sosial, maka partai politik bisa memainkan peranan sebagai individu-individu di dalam suatu unit sosial yang bisa ditetapkan untuk kemudian bisa menerima dan mencoba menyelesaikan tujuan-tujuan tertentu yang bersifat lebih khusus. Di samping itu, partai politik juga bisa dipandang sebagai *polity* atau sistem politik miniatur dalam suatu struktur kekuasaan, pola-pola distribusi kekuasaan, proses perwakilan dan sistem pemilihan maupun dalam aktivitas pengambilan keputusan (Haricahyono, 1986: 217).

Untuk memperjelas konsep partai politik yang telah dikemukakan secara tersamar di atas, berikut ini disertakan pula beberapa definisi ataupun konsepsi yang telah dikemukakan oleh beberapa ahli. Menurut Carl J. Friederich, *a political party is a group of human beings, stably organized with the objective of securing or maintaining for its leaders the control of a*

government, with the further objective of giving to members of the party, through such control ideal and material benefits and advantages, partai politik merupakan sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan pemerintah bagi pemimpin Partainya, dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota Partainya kemanfaatan yang bersifat ideal maupun materil. R.H. Soltau, a group of citizens more or less organized, who act as a political unit and who, by the use of their voting power, aim to control the government and carry out their general policies, dikatakan partai politik adalah sekelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisir, yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik dan yang – dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih – bertujuan menguasai pemerintahan dan melaksanakan kebijaksanaan umum mereka. Sigmund Neumann dalam karangannya Modern Political Parties mengemukakan definisi sebagai berikut, a political party is the articulate organization of society's active political agents, those who are concerned with the control of governmental power and who compete for popular support with another group or groups holding divergent views, dikatakan partai politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan berbeda (Budiardjo, 2005: 161-162).

Miriam Budiardjo (1977: 192) dalam bukunya Dasar-Dasar Ilmu Politik mengemukakan, bahwa partai politik adalah suatu kelompok yang

terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Lebih lanjut dikemukakan, bahwa tujuan-tujuan kelompok tersebut adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka. Untuk tujuan itu biasanya digunakan cara-cara konstitusional.

Dari berbagai rumusan di atas, bisa ditarik suatu kesimpulan bahwa partai politik pada dasarnya merupakan suatu kelompok individu yang terorganisir secara teratur, yang berusaha menguasai pemerintahan agar bisa diperoleh berbagai keuntungan dari segala bentuk pengawasan yang bisa dilakukannya.

Menjelang Pemilu, partai politik senantiasa melakukan kampanye. Permasalahan tentang kampanye Pemilu dapat ditinjau dari berbagai macam teori, baik teori dari ilmu politik maupun dari ilmu komunikasi. Pada penelitian ini secara lebih spesifik akan berupaya menggunakan teori dari ilmu marketing politik untuk lebih dapat menjelaskan tentang berbagai wacana dan pertarungannya pada masa kampanye Pemilu 1955. Definisi marketing politik terfokus pada aspek manajerial dan pasar dalam berpolitik. Dalam perkembangannya marketing politik juga melihat berbagai aspek yakni (1) orientasi pasar, (2) persaingan, (3) konsumen, dan (4) pesaing. (Firmanzah, 2008: 158).

Menurut Adam Nursal (dalam Pito dkk, 2006: 204) marketing politik adalah strategi kampanye politik untuk membentuk serangkaian makna politis tertentu di dalam pikiran para pemilih. Serangkaian makna politis yang

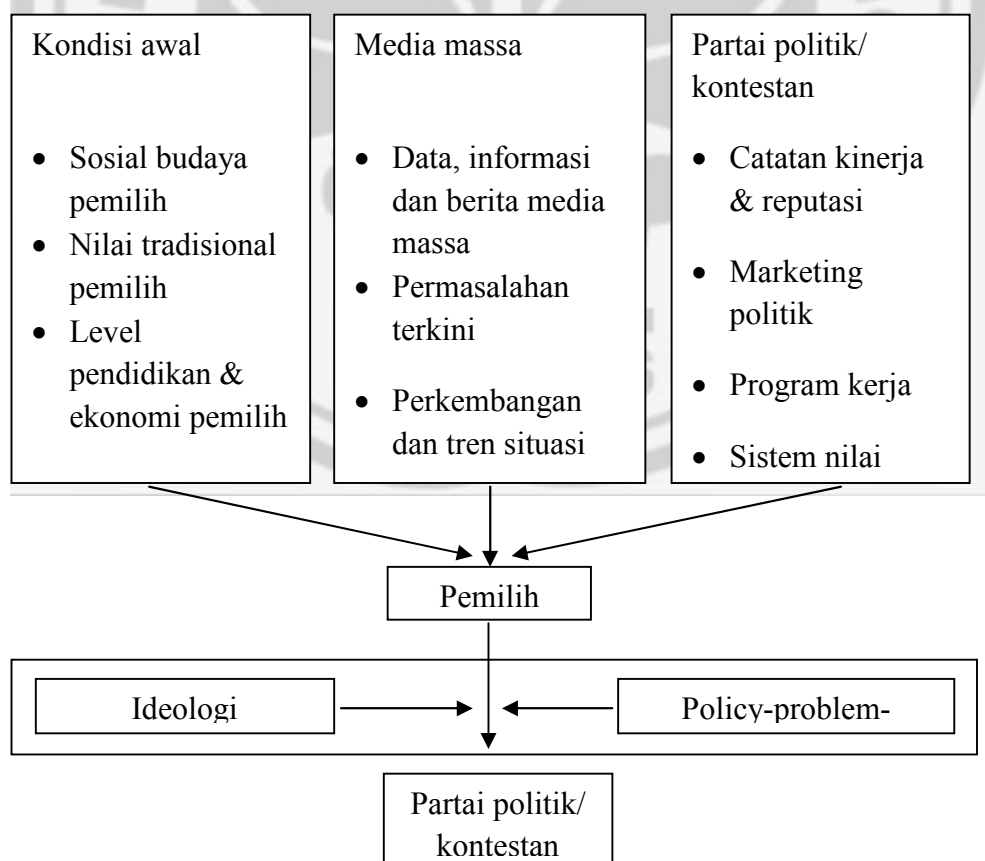
terbentuk dalam pikiran para pemilih untuk memilih kontestan tertentu. Makna politis inilah yang menjadi *output* penting marketing politik yang menentukan, pihak mana yang akan dicoblos pemilih.

Marketing politik sama dengan marketing pada umumnya yang berpusat pada kebutuhan pemilih. Kebutuhan pemilih yang menjadi pusat perhatian dalam membina hubungan jangka panjang antara partai politik dan pemilihnya. Dan untuk mengetahui kebutuhan pemilihnya ini, maka partai politik perlu melakukan riset untuk mengenali pemilihnya dalam konteks sebagai konsumen politik. Dengan demikian, bagi para politisi sangatlah penting untuk beradaptasi dan mengaplikasikan konsep pemasaran ke dalam pengembangan kebijakan dan komunikasi yang dilakukannya (marketing politik) seiring perkembangan kebutuhan pemilih untuk dapat memberikan input dalam proses politik yang dilakukan dan kebutuhan pemilih untuk memperoleh kepuasan dari hasil pemilu yang dilaksanakan menyadarkan politisi akan pentingnya (<http://kustanto.blogdetik.com/category/political-marketing/>).

Marketing politik memiliki dua fungsi sekaligus, yaitu deskriptif dan preskriptif (memuat aturan-aturan dasar). Dalam fungsi deskriptifnya, analisis marketing politik menyediakan suatu struktur bisnis untuk menjalankan, memetakan, mengartikan dan memadatkan dinamika sebuah kampanye partai politik, menawarkan kemungkinan baru dalam memenangkan Pemilu. Sementara itu, dalam fungsi preskriptif, banyak ahli yang mengungkapkan (secara eksplisit maupun implisit), bahwa marketing politik adalah suatu hal yang harus dilakukan partai politik dan kandidat untuk memenangkan Pemilu.

Marketing politik bukan hanya sebuah disiplin, melainkan juga sebuah rekomendasi (O'Shaughnessy dalam Kustanto, 2006).

Di dalam marketing politik terdapat strategi politik dengan mengidentifikasi besaran pendukungnya, massa mengambang dan pendukung kontestan lainnya. Pengidentifikasi dilakukan dengan mengelompokkan pemilih menjadi tiga diantaranya (1) konstituen, adalah kelompok masyarakat yang mewakili dan memiliki kedekatan dengan suatu partai politik; (2) non-partisan, adalah massa mengambang yang masih belum memutuskan partai politik apa yang akan mereka dukung; (3) pendukung atau konstituen partai politik lain (Firmanzah, 2008: 110).



Gambar 1. Faktor determinan pemilih
(sumber: Firmanzah, 2008: 115)

Menurut Adam Nursal, baik bentuk kampanye maupun proses marketing dalam marketing politik dilaksanakan untuk mencapai *output* marketing politik yang disebut makna politis. Sebab pada dasarnya marketing politik adalah strategi kampanye politik untuk membentuk serangkaian makna politis yang terbentuk dalam pikiran para pemilih menjadi orientasi perilaku yang akan mengarahkan pemilih untuk memilih partai politik atau konstestan tertentu. Makna inilah yang menjadi *output* penting marketing politik yang menentukan pihak, pihak mana yang akan dicoblos para pemilih (<http://eprints.undip.ac.id/15583/>).

Menurut Adam Nursal (dalam Pito, dkk, 2006: 205-218) pembentukan makna-makna politis tersebut dapat dilaksanakan melalui metode 9P (*positioning, policy, person, party, presentation, push marketing, pull marketing, pass marketing* dan *polling*). *Positioning* adalah strategi komunikasi untuk memasuki jendela otak pemilih agar konstestan mengandung arti tertentu yang mencerminkan keunggulannya terhadap konstestan pesaing dalam bentuk hubungan asosiatif. *Policy* adalah tawaran program kerja jika terpilih kelak. *Policy* merupakan solusi yang ditawarkan konstestan untuk memecahkan masalah kemasyarakatan berdasarkan isu-isu yang dianggap penting oleh para pemilih. *Policy* yang efektif harus memenuhi tiga syarat, yakni menarik perhatian, mudah terserap pemilih, *attributable*. *Person* adalah kandidat legislatif atau eksekutif yang akan dipilih melalui Pemilu. *Party* juga dilihat sebagai substansi produk politik. Partai politik mempunyai identitas utama, *asset* reputasi, dan identitas estetis. *Presentation*

adalah bagaimana ketiga substansi produk politik disajikan. Presentasi sangat penting karena dapat mempengaruhi makna pemilih. *Product* politik disampaikan kepada pasar politik (*political market*) melalui *push marketing* (penyampaian produk langsung kepada masyarakat), *pull marketing* (penyampaian produk melalui pemanfaatan media massa), dan *pass marketing* (penyampaian produk kepada *influencer group*). Agar produk politik disampaikan tepat pada sasaran dilakukan *polling* dan berbagai aktivitas riset lainnya. Riset ini merupakan kebutuhan penting untuk pemetaan isu, pemetaan segmentasi dan pemetaan program.

Dalam kampanye ada beberapa faktor yang diperhatikan yakni tentang perancangan kampanye yang meliputi pertanyaan “media apa dan melalui saluran apa”. Selain itu diperhatikan pula bagaimana latar atau konteks dilakukannya kampanye seperti kondisi politik, sosial, ekonomi, dan peristiwa lainnya. Pada penelitian ini, untuk melihat proses kampanye yang dilakukan oleh partai politik sebagai upaya kemenangan pemilu tahun 1955.

BAB II
MASYARAKAT JAWA TENGAH
MENJELANG PEMILIHAN UMUM 1955

A. Kondisi Sosial Ekonomi

Sejak tahun 1930, provinsi ditetapkan sebagai daerah otonom yang juga memiliki Dewan Provinsi (*Provinciale Raad*). Provinsi terdiri atas beberapa karesidenan (*residentie*), yang meliputi beberapa kabupaten (*regentschap*), dan dibagi lagi dalam beberapa kawedanan (*district*). Provinsi Jawa Tengah terdiri atas 5 karesidenan, yaitu: Pekalongan, Jepara-Rembang, Semarang, Banyumas, dan Kedu (Oemar, dkk, 1994: 125).

Menyusul kemerdekaan Indonesia, pada tahun 1946 Pemerintah membentuk daerah swapraja Kasunanan dan Mangkunegaran dan dijadikan karesidenan. Pada tahun 1950 melalui Undang-undang ditetapkan pembentukan kabupaten dan kotamadya di Jawa Tengah yang meliputi 29 kabupaten dan 6 kotamadya. Penetapan Undang-undang tersebut hingga kini diperingati sebagai Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah, yakni tanggal 15 Agustus 1950 (Oemar, dkk, 1994: 125).

Provinsi Jawa Tengah adalah provinsi yang terpadat. Pada tahun 1952 tercatat kepadatan penduduk di Jawa Tengah yang meliputi Jawa Tengah dan Yogyakarta adalah 460 jiwa/km², sedangkan di Jawa Barat hanya 337 jiwa/km² dan Jawa Timur adalah 346 jiwa/km². Diperkirakan pada tahun 1955 sekitar 17 juta yang tersebar dalam 32 kabupaten/kota dan 6 karesidenan. Kenaikan

jumlah penduduk yang sangat pesat dan kurang diimbangi adanya lapangan pekerjaan seperti perluasan areal pertanian menyebabkan sebagian besar penduduk mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya (Wicaksono, 2006: 48).

Ditinjau dari segi perannya dalam pemilu tahun 1955. Jawa Tengah menyumbangkan suara sebesar 8.901.414 untuk pemilihan parlemen dan menyumbang 9.051.547 suara saat pemilihan anggota konstituante. Ditinjau dari skala nasional, hasil pemilu di Jawa Tengah menyumbang sekitar 23,5% perolehan suara nasional pada pemilihan anggota parlemen dan menyumbang 23,9% dalam pemilihan anggota konstituante. Ini berarti hampir seperempat jumlah suara nasional berasal dari daerah Jawa Tengah (Feith, 1971: 102).

Secara umum, daerah kebudayaan Jawa, termasuk Jawa Tengah terbagi menjadi dua yaitu daerah pesisir dan daerah pedalaman. Masyarakat Jawa tinggal di desa yang merupakan daerah atau wilayah hukum yang sekaligus menjadi pusat pemerintahan tingkat daerah paling rendah. Pekerjaan utama masyarakat desa adalah bertani, baik itu mengolah tanah (untuk daerah pedalaman) atau mencari ikan (untuk daerah pesisir). Selain itu ada pula anggota masyarakat yang berdagang atau menjadi pegawai dan pekerjaan-pekerjaan lain (Wicaksono, 2006: 50).

Penduduk Jawa Tengah sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani dan tinggal di pedesaan. Penduduk ini mengembangkan suatu pemikiran baku yang dapat digunakan sebagai suatu model untuk melakukan kegiatan yang dilakukan secara sadar atau tidak. Pemikiran tersebut juga merupakan

suatu landasan untuk menjalankan kedudukan manusia dalam semesta ini. Termasuk dalam pemikiran itu yakni tempat manusia dalam masyarakat dan sekelilingnya yang juga merupakan pikiran-pikiran yang berhubungan dengan politik, kekuasaan, dan kekuatan. Politik sebagai suatu kumpulan konsep-konsep, aturan-aturan dan kegiatan-kegiatan akan dilihat sebagai bagian yang tidak terpisah dalam struktur sosial Jawa (Suparlan, 1977: 65).

Sistem kekerabatan orang Jawa berdasarkan prinsip keturunan bilateral (Kodiran, 1988: 337). Artinya dalam masyarakat Jawa tidak menganut sistem keturunan berdasarkan bapaknya saja seperti yang ada pada masyarakat Batak atau menurut ibunya seperti yang ada pada masyarakat Minang. Hubungan sosial di desa sebagian besar berdasarkan sistem gotong-royong yang mengenal berbagai bentuk tradisional. Sistem ini oleh orang desa dipahami sebagai perluasan hubungan kekerabatan yang memiliki pengaruh kuat atas seluruh kompleks hubungan interpersonal di seluruh desa (Magnis-Suseno, 1984: 18).

Dalam bidang kelas sosial, terdapat golongan-golongan sosial. Mereka membagi menjadi dua besar golongan yaitu golongan *priyayi* dan golongan *wong cilik* (Magnis-Suseno, 1984: 344). Golongan *priyayi* atau *bendara* merupakan golongan masyarakat yang dianggap memiliki status tinggi seperti pejabat, orang kaya atau pegawai, sedangkan *wong cilik* adalah mereka yang memiliki status sebagai warga biasa yang terdiri dari para petani, pedagang, tukang dan para pekerja kasar lainnya. Ditinjau dari aspek keberagaman masyarakat Jawa, Clifford Geertz membagi lagi golongan *wong cilik* menjadi santri dan abangan. Dalam penentuan dan pemilihan partai politik, golongan-

golongan ini sangat berpengaruh terhadap pilihan partai, seperti golongan priyayi lebih cenderung untuk memilih PNI, golongan santri memilih NU dan Masyumi, dan golongan abangan memilih PKI dan karena unsur Sukarno yang kental dalam PNI maka golongan abangan juga memilih PNI.

Sebagian besar masyarakat bermata pencaharian sebagai petani. Berdasarkan hal tersebut, muncul klasifikasi sosial di pedesaan didasarkan atas seberapa besar ia menguasai tanah. Menurut keadaan pertanian di Jawa, dapat dibedakan kelas-kelas sosial adalah tuan tanah, petani kaya, petani sedang, petani miskin, dan buruh tani (Fauzi, 1999: 124-125).

Pertama, tuan tanah adalah pemilik-pemilik tanah mulai dari sepuluh hektar ke atas. Mereka tidak mengerjakannya sendiri, tetapi menyewakannya pada pihak lain dengan sewa berupa uang atau hasil bumi secara bagi hasil. *Kedua*, petani kaya adalah orang yang memiliki tanah 5-10 hektar, tetapi ia ikut mengerjakan tanahnya sendiri. Meskipun demikian, mereka lebih senang mempekerjakan buruh tani daripada pihak lain dengan bagi hasil. Mereka hidup makmur dari eksploitasi tenaga buruh tani. *Ketiga*, petani sedang meliputi petani yang memiliki tanah 1-5 ha. Mereka mengerjakan tanahnya sendiri dengan alat-alat pertaniannya sendiri. Hasil perolehan dari usaha taninya mampu menghidupi keluarga. *Keempat*, petani miskin dicirikan dengan kepemilikan tanah yang sempit (kurang dari satu hektar). Kehidupannya tidak cukup hanya dari hasil taninya. Karenanya, petani miskin mengerjakan tanah petani kaya atau tuan tanah dengan cara sebagai buruh atau bagi hasil. *Kelima*, buruh tani. Mereka pada umumnya tidak memiliki alat produksi sama sekali.

Kehidupannya, bergantung sepenuhnya pada tenaga yang ia jual. Terutama pada petani kaya. Buruh tani merupakan satu kelas sosial yang merupakan kelas terbawah, yakni pekerja pertanian yang tak memiliki tanah. Tidak ada data makro yang diperoleh untuk bisa menggambarkan besarnya petani tak bertanah (buruh tani).

Di Jawa Tengah klasifikasi tersebut juga berlaku bagi masyarakat di daerah pedesaan yang berbasis pada pertanian. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Kementerian Agraria pada 1957, di Jawa Tengah menunjukkan data sebagai berikut

Tabel 1. Kepemilikan tanah pertanian di Jawa Tengah

No	Luas Tanah (Ha)	Jumlah Pemilik	Persentase
1	0 - 0.5	956974	59.84
2	0.6 – 1	376875	23.57
3	1,1 – 2	187844	11.75
4	2.1 – 5	70227	4.39
5	5.1 – 10	6373	0.40
6	10.1 – 20	754	0.05
7	> 20	137	0.01
	Total	1599184	100.00

Sumber: Noer Fauzi. 1999. *Petani dan Penguasa: Dinamika Perjalanan Politik Agraria Indonesia*. Yogyakarta: Insis, KPA, dan Pustaka Pelajar. Hlm 126

Dari klasifikasi di atas, dapat dilihat bahwa sebagian besar petani yang berada di Jawa Tengah adalah petani miskin dan buruh tani yang mencapai angka 83,41%. Sementara itu jumlah petani sedang mencapai 16,14 %, sedangkan petani besar berada pada posisi kurang dari satu persen, yakni hanya mencapai 0,45%. Angka ini menunjukkan bahwa kehidupan ekonomi

masyarakat Jawa Tengah yang mayoritas adalah petani, sebagian besar masih berada pada klasifikasi masyarakat miskin.

B. Kondisi Budaya Masyarakat Jawa Tengah

Secara budaya, kawasan Jawa Tengah merupakan pusat perkembangan budaya Jawa. Ditinjau dari aspek sejarahnya Jawa Tengah merupakan pusat kerajaan mataram yang memiliki pengaruh kuat dalam perkembangan budaya Jawa.

Budaya (*culture*) adalah seperangkat sikap, nilai, kepercayaan, dan perilaku yang dimiliki secara bersama-sama oleh sekelompok orang tetapi berbeda untuk masing-masing individu dan dikomunikasikan dari satu generasi ke generasi berikutnya (Matsumoto, 1996). Sekelompok orang bisa berarti suku bangsa yang merupakan suatu golongan manusia yang terikat oleh kesadaran dan identitas akan kesatuan budaya (Koentjaraningrat, 1981). Salah satu suku bangsa yang ada di dunia adalah Jawa. Ini berarti Jawa adalah suatu kelompok tertentu yang mempunyai suatu budaya.

Namun demikian, paling tidak menurut orang Jawa sendiri, budaya Jawa bukanlah sesuatu yang homogen. Orang Jawa sadar akan adanya keanekaragaman yang sifatnya regional. Hal ini sedikit banyak sesuai dengan kenyataan adanya logat bahasa tertentu pada daerah tertentu, unsur makanan yang berbeda, upacara-upacara yang berbeda atau juga kesenian rakyat, dan seni suara yang berbeda (Koentjaraningrat, 1984). Pembagian ragam budaya

Jawa yang bersifat geografis/regional muncul dengan adanya pemilahan budaya Jawa Pesisir dan Jawa pedalaman.

Budaya Jawa pesisir adalah bentuk budaya yang terdapat pada masyarakat yang tinggal di daerah pantai laut utara Jawa, misalnya Surabaya, Semarang, Tegal, Rembang, Pati. Budaya Jawa pesisir banyak terpengaruh oleh banyak budaya yang lain, misalnya Islam, Cina, India, maupun Portugis (Jatman, 1993). Hal ini terjadi karena daerah pesisir merupakan daerah yang terbuka untuk didatangi berbagai bangsa lain (Baribin dalam Soedarsono, 1986). Namun demikian pengaruh yang terkuat adalah pengaruh agama Islam (Irianto & Thohir, 2000).

Masyarakat pada budaya Jawa pesisir mempunyai karakteristik mentalitas pedagang (Irianto & Thohir, 2000) atau berwiraswasta (Jatman, 1993) yang menunjukkan mereka harus bergelut dengan alam laut yang ganas untuk bisa bertahan hidup. Dibutuhkan perjuangan yang keras untuk bisa menaklukkan alam yang ganas. Hal ini akan membentuk karakter orang Jawa pesisir yang keras, tegas, dan terbuka tertempa oleh alam. Dalam keseharian, orang dengan budaya Jawa pesisir mempunyai corak sikap yang lugas, spontan, tutur kata yang cenderung kasar, dan secara praktik keagamaan cenderung puritan dibanding masyarakat pedalaman atau orang keraton (Thohir, 1999).

Sedangkan budaya Jawa pedalaman adalah budaya yang terdapat pada masyarakat Jawa yang secara geografis terletak di daerah pegunungan atau jauh dari laut, tetapi bukan merupakan bagian dari budaya keraton. Dalam pembagian yang lain, Thohir (1999) menyebutkan bahwa budaya pedalaman

tidak lain dan tidak bukan adalah budaya mancanegari. Secara geografis, masyarakat pedalaman berada di luar Solo dan Yogya seperti misalnya Magelang, Wonogiri, Wonosobo, Banjarnegara, Temanggung dan yang lain. Budaya Jawa pedalaman banyak terpengaruh oleh kebudayaan India (Irianto & Thohir, 2000) atau Hindu yang sebelum Islam masuk sudah lama ada pada budaya Jawa secara keseluruhan.

Budaya Jawa pedalaman mempunyai karakteristik yang selaras dengan karakteristik budaya keraton (Jatman, 1993) atau selaras dengan budaya India (Irianto & Thohir, 2000) yang lebih mementingkan etiket formal dan perbedaan status, mengagumi kehalusan jiwa yang terekspresi lewat kesenian. Keraton atau istana adalah pusat pemerintahan yang juga pusat budaya yang meliputi adat istiadat, tradisi, kesenian, bahasa, dan kesusasteraan (Hadiatmaja dalam Soedarsono, 1986). Hal ini akan membentuk karakter orang Jawa pedalaman yang lembut dan mementingkan “roso”.

Perbedaan keadaan geografis, perbedaan karakter masyarakat yang ada di sekitarnya, dan perbedaan faktor budaya yang dominan berpengaruh terhadap masyarakatnya, serta nilai-nilai kemasyarakatan yang berbeda akan menyebabkan perbedaan dalam pandangan politiknya.

Jawa Tengah boleh dibilang tergolong homogen dari segi etnis dan budayanya. Mayoritas penduduknya, 98 persen, bersuku Jawa dan dalam keseharian menggunakan bahasa Jawa. Saking seragamnya, orang Jepara yang terletak di pesisir utara dapat dengan mudah mengerti ucapan bahasa Jawa yang dikeluarkan orang Kebumen yang lokasinya di pesisir selatan meskipun

dengan dialek yang berbeda. Akan tetapi, kesamaan etnis ini tidak terjadi dalam preferensi politiknya.

Dilihat dari dekat jauhnya dari pusat-pusat pemerintahan administratif, masyarakat Jawa bisa dibedakan ke dalam dua jenis yaitu (a) mereka yang tinggal di perkotaan dan, (b) yang tinggal di pedesaan. Penduduk perkotaan adalah mereka yang tinggal di pusat-pusat kota propinsi, kotamadya, dan kabupaten. Dewasa ini penduduk yang tinggal di pusat kota kecil di Jawa seperti kawedanan dan kecamatan pun sudah bisa dikategorikan sebagai orang-orang kota. Masalahnya prasarana dan sarana perkotaan sudah mulai tersedia di daerah pusat-pusat kawedanan dan atau kecamatan, kendati dalam skala yang lebih kecil dan terbatas. Salah satu ciri dari perkotaan – dalam unit yang paling kecil – warganya dipimpin oleh seorang lurah bukan kepala desa. Ini berarti, desa-desa yang tersebar dan yang masih dipimpin oleh kepala desa masuk dalam kategori penduduk pedesaan. Namun demikian, ada juga desa-desa yang berdekatan dengan perkotaan, termasuk penduduk yang ada di dalamnya, yang sudah mulai bisa memanfaatkan fasilitas dan bahkan bergaya hidup orang kota.

Warga kota ataupun warga desa, keduanya tinggal secara menyebar dalam lingkungan yang berbeda. Lingkungan hidup mereka, adakalanya berupa (a) pegunungan, (b) dataran, dan (c) pantai. Istilah pantai disini lebih mengacu kepada “laut”. Jadi, masyarakat pantai adalah masyarakat yang tinggal di kawasan yang relatif dekat dengan laut. Jadi, masyarakat pantai adalah masyarakat yang tinggal di kawasan yang relatif dekat dengan laut. Tetapi kalau tinjauannya pada wilayah kebudayaan Jawa dari masa lalunya

yaitu pada masa kerajaan Mataram, maka masyarakat Jawa di sini dapat dibedakan ke dalam tiga tipe wilayah kebudayaan, yaitu (a) *negarigung*, (b) *mancanegari*, dan (c) *pasisiran*.

Daerah *negarigung* yaitu daerah di seputar kota Solo dan Yogyakarta. Masyarakat di kedua daerah itu disebut “*tiyang negari*” (orang negeri). Kebudayaan yang dahulunya berakar dari keraton. Oleh karena berakar dari keraton, maka peradabannya masuk pada kategori peradaban besar. Ciri dari peradaban ini ialah: mengutamakan kehalusan (baik bahasa, tingkah laku, maupun kesenian). Pandangan-pandangan keagamaannya (dahulunya) cenderung sinkretik (bandingkan pada Geertz, 1984, Koentjaraningrat, 1984).

Daerah *mancanegari* adalah suatu sebutan untuk daerah-daerah di luar kota Solo dan Yogyakarta. Masyarakat yang hidup dalam peradaban ini disebut sebagai “*tiyang pinggiran*” (orang pinggiran). Daerah *mancanegari* ini merupakan daerah pinggiran dari kebudayaan yang berkembang di kerajaan Jawa Mataram pada antara abad ke-17 hingga abad ke-19. Masyarakat Mancanegari memiliki kemiripan-kemiripan dengan masyarakat *negarigung* dalam hal pementingan tutur bahasa dan keseniannya, kendatipun kualitasnya tidak sebaik atau sehalus peradaban keraton. Demikian juga soal pandangan keagamaannya (dahulunya dan mungkin sampai sekarang) ada kecenderungan kepada agama Kejawen.

Daerah pesisir adalah suatu daerah di sepanjang daerah pantai utara pulau Jawa. Daerah sepanjang pantai utara (pesisiran) pulau Jawa ini dibagi ke dalam dua kategori yaitu Pesisiran Barat dan Pesisiran Timur. Pertama, meliputi

daerah-daerah: Demak, Kendal, Batang, Pekalongan, Pemalang, Wirodesa, Tegal, dan Brebes. Kedua meliputi daerah: Cengkal Sewu, Surabaya, Gresik, Sedayu, Tuban, Lasem, Juwana, Pati, Kudus, dan Jepara (De Graaf, 1949; Schrieke, 1959, dan Ricklefs, 1974. Dikutip dari Hardjowirogo, 1983: 105).

C. Kondisi Pendidikan dan Perkembangan Media Massa

Usaha pemerintah dalam menangani kebodohan mulai tampak. Anak-anak usia sekolah dipaksa untuk mengikuti sekolah. Sementara di kampung-kampung mulai diadakan kursus buta aksara. Sekolah-sekolah biasanya didirikan baru sampai tingkat kabupaten, pada tahun 1955 sekolah tersebut jumlahnya bertambah banyak yang telah menyebar sampai tingkat kecamatan (Wicaksono, 2006: 52). Namun demikian penduduk yang berada jauh di desa enggan mengikuti kegiatan sekolah dan lebih suka membantu orang tuanya sebagai petani atau peternak. Masuknya tokoh-tokoh politik dan pimpinan perjuangan sedikit banyak telah memicu perubahan sosial masyarakat di Jawa Tengah termasuk Yogyakarta.

Dalam masyarakat Jawa Tengah, sebagian orang beranggapan bahwa dengan masuk ke dalam sebuah partai, mereka bisa memperjuangkan statusnya atau paling tidak mempertahankannya. Para tuan tanah, majikan, pegawai negeri lebih condong untuk memilih PNI dan Masyumi. Sementara itu buruh petani penggarap dan lainnya condong ke PKI. PKI menjadi pilihan karena mereka menjanjikan pembagian tanah, sehingga menyebabkan konflik tuan

tanah dan PKI. Sementara itu di perkotaan banyak terjadi aktivitas politik dan penerbitan surat kabar-surat kabar (Wicaksono, 2006: 53).

Pada masa demokrasi liberal pers berkembang dengan cukup pesat. Hal ini terjadi karena liberalisme di bidang pers mengakibatkan tidak adanya pembatasan dalam pengeluaran surat kabar. Namun demikian, banyak terjadi pula penutupan penerbitan surat kabar karena tidak mampu bersaing. Pada masa liberal, pers bertindak melampaui batas-batas kesopanan. Kebebasan pers banyak digunakan untuk saling mencaci dan memfitnah lawan politiknya dengan tujuan agar lawan politik itu jatuh namanya di pandangan masyarakat.

Menurut catatan tahun 1950, jumlah surat kabar berbahasa Indonesia mencapai 67, Bahasa Belanda 11, Bahasa Cina 15. Oplah masing-masing golongan surat kabar tersebut, 33.300, 87.200, dan 73.650. Jumlah surat kabar mingguan, majalah, dan berkala mencapai 226 dengan jumlah oplah sedikit melebihi satu juta eksemplar. Sembilan tahun kemudian jumlah surat kabar harian mencapai 94 dengan jumlah oplah 1.036.500, mingguan, majalah, dan berkala berjumlah 273 dengan oplah berjumlah 3.062.806 (Said, 1987: 94).

Menurut *statistical pocket book* yang dikutip Edward C. Smit pada akhir tahun 1953 di negeri ini terdapat 106 harian termasuk 11 berbahasa Belanda, 16 berbahasa Cina dan 1 berbahasa Inggris. Sirkulasi keseluruhan menurut catatan adalah 630.000. Tahun 1954 merupakan tahun kampanye dalam menghadapi pemilu yang diadakan menjelang akhir 1955. Tahun ini merupakan tahun dengan inflasi yang melaju dengan pesat serta penyelundupan yang makin meningkat, dengan pers yang tidak mendukung

presiden. Namun tindakan-tindakan terhadap pers berkurang. Pada akhir tahun 1954, Indonesia memiliki 77 harian, 9 surat kabar belanda, 17 surat kabar cina dan dua surat kabar berbahasa inggris. Sirkulasi mencapai 500.000 dan lainnya sekitar 140.000 eksemplar (Khotimah, 2003: 33-37).

Menghadapi pemilu yang akan dilaksanakan pada bulan September 1955, para politik menggunakan segala macam cara untuk memenangkan pemilu tersebut. Salah satunya adalah dengan pemanfaatan pers sebagai sarana propaganda. Pada waktu itu keempat partai besar yakni Masyumi, PNI, NU, PKI masing-masing memiliki surat kabar. Masyumi memiliki *Harian Abadi*, PNI dengan *Suluh Indonesia*. NU menerbitkan *Duta Masyarakat*, dan PKI melalui *Harian Rakyat*.

Tabel 2. Data Pers Indonesia Tahun 1950-1959

Tahun	Jumlah surat kabar	Oplah	Jumlah mingguan, majalah, berkala	Oplah
1950	92	499500	226	1096000
1951	85	516000	232	1387650
1952	102	556500	216	1212600
1953	104	630000	231	1401300
1954	105	697500	294	1840150
1955	106	984000	351	2542100

Sumber: Tribuana Said. 1987. *Sejarah Pers Nasional dan Pembangunan Pers Pancasila*. Jakarta: Haji Masagung. Hlm 94.

D. Kondisi Keamanan dan Geopolitik Jawa Tengah

Di Jawa Tengah menjelang pemilu masih terjadi gangguan keamanan seperti DI/TII dan gerakan Merapi Merbabu Complex (MMC). Di daerah-

daerah tersebut terjadi kerusuhan-kerusuhan yang diakibatkan aksi perampokan di rumah-rumah oleh gerakan bersenjata yang tidak segan membunuh. Di daerah lain ada isu tentang peracunan sumber air, sumur, dan sebagainya. Daerah DI/TII di daerah Brebes dan Tegal, sebagian Pemalang, sebagian Banyumas, dan sebagian Cilacap. Sementara itu MMC sebagian Kabupaten Semarang, Kendal, Boyolali, Klaten, Sleman, Magelang, dan Temanggung. Kondisi keamanan yang tidak kondusif ini memberikan pengaruh terhadap pelaksanaan pemilu. Pengaruh ini terutama terjadi di daerah-daerah yang rawan situasi terjadinya aksi oleh DI/TII atau MMC.

MMC merupakan gerombolan bersenjata yang bersifat separatis. Gerombolan ini beroperasi di daerah Surakarta, Yogyakarta, Kedu, Salatiga, Ambarawa. Pada masa perang kemerdekaan, tanah-tanah perkebunan partikulir di Boyolali diberikan kepada rakyat. Tanah itu adalah tanah perkebunan Sukabumi, Malangbong, Barostampir, dan Sukarame, tetapi pelaksanaannya sulit dan terkatung-katung. Hal ini disalahgunakan oleh gerombolan MMC untuk menghasut rakyat petani guna menentang pemerintah. Tindakan-tindakannya berupa penggedoran, perompakan, dan lain-lain. Akibatnya keadaan rakyat kacau, sehingga Surakarta dikenakan bantuan militer(Oemar, dkk., 1994: 226).

Selain MMC, ada pula gerakan AUI (Angkatan Umat Islam) di Kebumen. AUI didirikan di Kebumen pada 11 September 1945. Sponsornya adalah Sjafi'ie dan Kyai Afandi serta Kyai Abdulrachman. Organisasi ini berazaskan Islam. Pada bulan Oktober 1945, AUI menyatakan sebagai partai

berdiri sendiri. Organisasi ini memiliki kelaskaran yang bersenjata. Setelah terjadi perbedaan pendapat di kalangan internal, Kyai Moh. Sjafi'ie dan kawakawan mengundurkan diri, dan kepemimpinan diserahkan kepada Kyai Machfud sebagai pemimpin beesar umum atau sebagai "Romo Pusat". Sebagai panglima kelaskaran adalah K.H. Nursodik dan Kyai Taifur sebagai "penekung". Selanjutnya Romo Pusat membuat peraturan-peraturan sendiri yang kadang-kadang mengabaikan perintah setempat. Pada masa perang kemerdekaan II, ia melawan Belanda, bekerja sama dengan TNI, TP, Hisbullah, dan lain-lain. Setelah penyerahan kedaulatan, AUI dengan Hisbullah, pimpinan Masduki dijadikan batalyon riil dengan nama Batalyon Lemah Lanang yang dipimpin oleh K.H. Nursodik. Namun demikian dalam perkembangannya terjadi pertentangan antara Kyai Nursodik dengan Romo Pusat karena tidak setuju masuk dalam APRIS. Pasukan AUI sebagian besar tidak mau menyerahkan senjatanya. Demikian juga satu kompi Hisbullah pimpinan Masduki melarikan diri ke Cilacap. Pemerintah menempuh jalan damai dengan mengirim delegasi ke Romo Pusat, tetapi delegasi ditahan di Kalirejo. Romo menolak berunding di Purworejo, bahkan ada gejala-gejala pemberontakan (Oemar, dkk., 1994: 228-229).

Sebab khusus peristiwa AUI terjadi pada 31 Juli 1950, berawal dari seorang anggota AUI bersenjata berkeliaran di Stasiun Kebumen yang ditegur oleh CPM dan dibawa ke markas karena tidak menjawab secara baik, tetapi di dalam jeep terjadi pergulatan, dan akhirnya ditembak mati. Karena itu pada 1 Agustus 1950 pukul 07.00 terjadi serangan dari AUI ke markas CPM di

sebelah utara Stasiun Kebumen. Tembakan dilakukan dari Tamanwinangun. Kota Kebumen menjadi medan perang. Ultimatum Komando Bc.IX tidak diindahkan, tetapi kemudian mereka dapat dihalau ke luar kota, yaitu ke Gunung Srandil, dan dapat dihancurkan (Oemar, dkk., 1994: 228-229).

Pada tanggal 27 Agustus 1949, Kartosuwiryo memproklamasikan Negara Islam Indonesia. Pengaruh NII di Jawa Tengah adalah di daerah Pekalongan daerah selatan, Tegal Brebes, dan lain-lain. Akibat perjanjian Renville, semua pasukan/kesatuan RI harus ditarik dari daerah kantong, tetapi Amir Fatah Widjajakusuma berhasil menyelundup ke daerah pendudukan bersama tiga kompi, yakni Ki Irfan Mustofa, Ki Dimjati, dan Ki Sjamsuri yang berasal dari Tegal, Brebes, dan Majenang. Mereka adalah bekas anggota Hisbullah Pekalongan yang tidak mau menjadi TNI (Oemar, dkk, 1994: 230).

Rombongan Fatah dan kawan-kawan berhasil masuk daerah pendudukan melalui sektor Merawu dengan dalih mendapat mandat dari Jenderal Sudirman untuk menyadarkan Kartowuwiryo. Di daerah pendudukan (Tegal dan Brebes) mereka membentuk MI (Majelis Islam), TII (Tentara Islam Indonesia), Barisan Keamanan Negara (Kepolisian), PADI (Pahlawan Darul Islam). Dengan demikian mereka menyusun DI Jawa Tengah (Oemar, dkk, 1994: 230).

Batalyon 3/III yang dipimpin oleh May. Wongsoatmodjo pada bulan Januari 1949 melancarkan perang gerilya ke daerah Tegal dan Brebes dengan empat kompi. Seminggu setelah agresi II, diadakan perundingan antara Fatah dan kawan-kawan dengan May. Wongsoatmodjo dan terjadilah kerja sama yang baik untuk melancarkan perang terhadap Belanda. TNI AD melakukan

serangan yang gencar terhadap Belanda, tetapi Fatah dan kawan-kawan membalik di tengah-tengah perang untuk menyusun kekuatan DI dan TII nya (Oemar, dkk, 1994: 230).

Kekuatan DI kurang lebih 1.400 orang terdiri atas 800 orang dipimpin oleh Amir Fatah dan Subechi dan 600 orang dipimpin Mugny dan Fadjar. Untuk menghadapinya TNI AD Jawa Tengah membentuk Gerakan Banteng (GBN) yang secara definitif menumpas DI di Jawa Tengah. GBN adalah suatu komando operasi gabungan yang kesatuan-kesatuan tempurnya dari berbagai divisi infanteri dan kesatuan bantuan. Komando ini dibentuk untuk menindas pemberontakan DI di daerah Pekalongan (Oemar, dkk, 1994: 230) .

Secara geopolitis, Jawa Tengah boleh dibilang tergolong homogen dari segi etnis dan budayanya. Mayoritas penduduknya, 98 persen, bersuku Jawa dan dalam keseharian menggunakan bahasa Jawa. Jawa Tengah terbagi menjadi dua "mazhab" besar, nasionalis dan Islam. Pilihan politik nasionalis lebih banyak dianut penduduk wilayah pedalaman, sedangkan partai-partai yang mengusung ideologi Islam banyak mendapat tempat di pesisir utara. Namun, penguasaan pemilihnya lebih condong ke nasionalis. Segregasi pilihan politik ini ternyata bukan hanya bersifat struktural, tetapi juga bersifat kewilayahan. Pemilahan wilayah terjadi antara daerah pesisir utara dan pedalaman. Wilayah utara banyak dikuasai partai-partai Islam sedangkan pedalaman dikuasai oleh partai nasionalis (Sybly, 2009: 45).

Pola kecenderungan politik ini relatif stabil, tidak berubah, dan sudah terjadi sejak Pemilu 1955. Ini menunjukkan seakan-akan pola politik aliran

yang terjadi sejak pemilu pertama itu tidak berubah hingga kini. Politik aliran memang masih kuat, khususnya di Jawa. Pilihan politik penduduk di wilayah lebih banyak dipengaruhi faktor kepercayaan dan kecurigaan daripada faktor pilihan program- program yang ditawarkan partai politik (Sybly, 2009: 48).

Fakta ini sungguh menarik. Jika ditilik sejarahnya, pandangan Feith dapat ditelusuri jejaknya. Perbedaan kultur politik pesisir utara dan pedalaman sudah terjadi sejak era kedatangan Islam di Jawa pada abad ke-14. Islam masuk lewat pesisir utara. Menurut pandangan guru besar Ilmu Sejarah Universitas Diponegoro, Djuliaty Suroyo, wilayah pesisir atau pasisir adalah wilayah yang relatif terbuka terhadap pengaruh luar. "Di wilayah ini, Islam lebih mudah masuk karena pengaruh Hindu-Buddha relatif tidak sekuat di wilayah pedalaman," kata Djuliaty. Ketika pusat kerajaan Jawa berpindah dari pesisir utara ke wilayah pedalaman, di Surakarta dan Yogyakarta mulai muncul pembagian "kasta" wilayah berdasarkan pengaruh keraton. Dari kacamata orang Jawa, kedua pusat kota menjadi wilayah inti, sedangkan wilayah pesisir utara tergolong wilayah monconegara (Sybly, 2009: 51).

Meskipun sejak abad ke-18 hampir seluruh Jateng secara resmi beragama Islam, intensitas keagamaannya berbeda. Pusat Islam tetap di daerah pesisir utara dan cenderung berkebudayaan santri. Meskipun keraton- keraton Jawa yang terletak di pedalaman secara resmi memeluk agama Islam, dalam gaya kehidupannya pengaruh tradisi Hindu-Jawa lebih menonjol (Sybly, 2009: 53).

BAB III

SISTEM PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM 1955

Pemilu 1955 dianggap oleh banyak pakar satu-satunya pemilu yang paling dekat dengan kriteria demokrasi. Pertama jumlah dan pengorganisasian orpol tidak dibatasi. Kedua, pelaksanaan pemilu *luber betul*. Ketiga, pluralisme kehidupan politik agak sama dengan era reformasi sekarang (King, 1998).

Pemilu 1955 adalah wujud dari keinginan masyarakat Indonesia untuk menerapkan kehidupan yang demokratis. Rencana untuk mengadakan pemilu nasional sebenarnya sudah diumumkan sejak Oktober 1945. Satu bulan kemudian, sebagai persiapan diadakannya pemilu nasional tersebut, dikeluarkanlah Maklumat Pemerintah tentang pembentukan partai-partai politik tanggal 3 November 1945 yang ditandatangani oleh Wakil Presiden.

Maklumat yang ditandatangani tanggal 3 November 1945 ini berisi sikap pemerintah. Ada dua hal yang tercantum dalam maklumat tersebut. “(1) Pemerintah menjukai timbulnja partij-partij politik, karena dengan adanja partij-partij itulah dapat dipimpin kedjalan jang teratur segala aliran paham jang ada dalam masjarakat; (2) Pemerintah berharap supaja partij-partij itu telah tersusun, sebelumnja dilangsungkan pemilihan anggota Badan-Badan Perwakilan Rakyat pada bulan Djanuari 1946” (Poesponegoro dan Notosusanto [ed], 1984: 622)

Setelah itu kemudian disusun UU No. UU No 27 tahun 1948 tentang Pemilu, yang kemudian diubah dengan UU No. 12 tahun 1949 tentang Pemilu. Di dalam UU No 12/1949 diamanatkan bahwa pemilu yang akan dilakukan adalah

bertingkat (tidak langsung). Sifat pemilihan tidak langsung ini didasarkan pada alasan bahwa mayoritas warganegara Indonesia pada waktu itu masih buta huruf, sehingga kalau pemilihannya langsung dikhawatirkan akan banyak terjadi distorsi (http://www.kpu.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=39).

Proses persiapan landasan hukum pelaksanaan pemilu sudah dibahas sejak tahun 1948 (pembahasan UU susunan anggota DPR) kemudian diteruskan pada tahun 1949 (menyempurnakan UU susunan anggota DPR). Pada tahun 1953 parlemen berhasil merumuskan UU pemilu yang dipergunakan sebagai pedoman pelaksanaan pemilu 1955, sedangkan UU Pemilu selalu berpedoman kepada UUDS yang berlaku sejak 17 Agustus 1950 dan memuat 146 pasal. Undang-Undang No 27 tahun 1948 belum mengatur ketentuan pelaksanaan pemilu secara lengkap, tetapi baru mengatur ketentuan susunan DPR. Peraturan ini kemudian dijadikan UU No 27 tahun 1948 dan diundangkan di Yogyakarta pada 28 Agustus 1948, secara garis besar undang-undang ini mengatur susunan keanggotaan DPR, penentuan daerah pemilihan, asas pemilihan dan penghitungan hasil pemilihan.

Kemudian pada tahun 1949, diterbitkan Undang-Undang No 12 tahun 1949. Undang-Undang ini dapat disebut juga RUU pertama pemilu dan merupakan cikal bakal dari UU Pemilu 1953. Secara garis besar Undang-Undang Pemilu 1949 tidak jauh berbeda dengan Undang-Undang Pemilu 1948, namun agak lebih luas dan tidak ada pengangkatan seperti yang diusulkan dalam undang-undang sebelum ini. Rancangan Undang-Undang ini dibahas dan diminta pengesahannya tetapi dalam bagian-bagian tertentu tidak dapat diterima sehingga kemudian ditolak parlemen.

Kemudian pada paruh kedua tahun 1950, ketika Mohammad Natsir dari Masyumi menjadi Perdana Menteri, pemerintah memutuskan untuk menjadikan pemilu sebagai program kabinetnya. Sejak itu pembahasan UU Pemilu mulai dilakukan lagi, yang dilakukan oleh Panitia Sahardjo dari Kantor Panitia Pemilihan Pusat sebelum kemudian dilanjutkan ke parlemen. Pada waktu itu Indonesia kembali menjadi negara kesatuan, setelah sejak 1949 menjadi negara serikat dengan nama Republik Indonesia Serikat (RIS). Setelah Kabinet Natsir jatuh 6 bulan kemudian, pembahasan RUU Pemilu dilanjutkan oleh pemerintahan Sukiman Wirjosandjojo, juga dari Masyumi. Pemerintah ketika itu berupaya menyelenggarakan pemilu karena pasal 57 UUDS 1950 menyatakan bahwa anggota DPR dipilih oleh rakyat melalui pemilu. Tetapi pemerintah Sukiman juga tidak berhasil menuntaskan pembahasan undang-undang pemilu tersebut. Selanjutnya UU ini baru selesai dibahas oleh parlemen pada masa pemerintahan Wilopo dari PNI pada tahun 1953. Maka lahirlah UU No. 7 Tahun 1953 tentang Pemilu.

Undang-Undang No 7 tahun 1953 merupakan Undang-Undang Pemilu pertama yang disahkan oleh parlemen Indonesia. Undang-undang yang berlaku sejak 4 April 1953 itu terdiri dari 16 bab dan 139 pasal yang mencakup berbagai ketentuan pemilihan anggota konstituante dan anggota DPR, pencalonan, penghitungan suara, penetapan hasil pemilihan, pasal-pasal pidana yang memberikan sanksi kepada pelanggaran Pemilu.

Undang-Undang tentang pemilu hanya terdiri atas 16 bab, yakni tentang (1) hak pilih, (2) daftar pemilih, (3) daerah pemilihan dan daerah pemungutan suara,

(4) badan-badan penyelenggara pemilihan, (5) jumlah penduduk warganegara Indonesia, (6) penetapan jumlah anggota untuk seluruh Indonesia dan untuk masing-masing daerah-pemilihan, (7) pencalonan, (8) daftar-calon.

UU inilah yang menjadi payung hukum Pemilu 1955 yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas dan rahasia. Dengan demikian UU No. 27 Tahun 1948 tentang Pemilu yang diubah dengan UU No. 12 tahun 1949 yang mengadopsi pemilihan bertingkat (tidak langsung) bagi anggota DPR tidak berlaku lagi.

Teknis dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1953 ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1954 tentang Menyelenggarakan Undang-Undang Pemilu.

Dalam pemilu tahun 1955, Indonesia menganut sistem multipartai. Sistem multipartai yang disandingkan dengan sistem pemerintahan parlementer, mempunyai kecenderungan untuk menitikberatkan kekuasaan pada badan legislatif sehingga peranan badan eksekutif sering lemah dan ragu-ragu. Hal ini disebabkan karena tidak ada satu partai yang cukup kuat untuk membentuk suatu pemerintahan sendiri, sehingga terpaksa membentuk koalisi dengan partai-partai lain. Dalam keadaan semacam ini partai yang tidak berkoalisi harus selalu mengadakan musyawarah dan kompromi dengan partai-partai lainnya dan menghadapi kemungkinan bahwa sewaktu-waktu dukungan dari partai koalisi lainnya dapat ditarik kembali (Budiardjo, 1977: 169-177).

Maurice Duverger menjelaskan bahwa pola multipartai umumnya diperkuat oleh sistem pemilihan perwakilan berimbang (*proportional representation*) yang

memberi kesempatan luas bagi pertumbuhan partai-partai dan golongan kecil. Melalui sistem perwakilan berimbang partai-partai kecil dapat menarik keuntungan dari ketentuan bahwa kelebihan suara yang diperolehnya di suatu daerah pemilihan dapat ditarik ke daerah pemilihan lain untuk menggenapkan jumlah suara yang diperlukan guna memenangkan satu kursi (Budiardjo, 1977: 169-177).

Dalam pemilu tahun 1955, digunakan sistem pemilihan proporsional (Feith, 1971: 3). Sistem ini dimaksudkan untuk menghilangkan beberapa kelemahan dari sistem distrik. Gagasan pokok ialah bahwa jumlah kursi yang diperoleh oleh suatu golongan atau partai adalah sesuai dengan jumlah suara yang diperolehnya. Untuk keperluan ini ditentukan suatu perimbangan, misalnya 1:400.000 yang berarti bahwa sejumlah pemilih tertentu (dalam hal ini 400.000 pemilih) mempunyai satu wakil dalam dewan perwakilan rakyat. Jumlah total anggota dewan perwakilan rakyat ditentukan atas dasar perimbangan (1:400.000) itu. Negara dianggap sebagai satu daerah pemilihan yang besar, akan tetapi untuk keperluan teknis-administratif dibagi dalam beberapa daerah pemilihan yang besar (yang lebih besar dari distrik dalam sistem distrik), di mana setiap daerah pemilihan memiliki sejumlah wakil sesuai dengan banyaknya penduduk dalam daerah pemilihan itu. Jumlah wakil dalam setiap daerah pemilihan ditentukan oleh jumlah pemilih dalam daerah pemilihan itu, dibagi dengan 400.000 (Budiardjo, 1977: 177-180).

Dalam sistem ini setiap suara dihitung, dalam arti bahwa suara lebih yang diperoleh oleh suatu partai atau golongan dalam suatu daerah pemilihan dapat ditambahkan pada jumlah suara yang diterima oleh partai atau golongan itu dalam

pemilihan lain, untuk menggenapkan jumlah suara yang diperlukan guna memperoleh kursi tambahan. Sistem perwakilan berimbang sering dikombinasikan dengan beberapa prosedur antara lain dengan sistem daftar (*list system*). Dalam sistem daftar setiap partai atau golongan mengajukan satu daftar calon dan si pemilih satu partai dengan semua calon yang diajukan oleh partai itu bermacam-macam kursi yang sedang direbutkan. Sistem ini memiliki satu keuntungan besar, yakni bahwa dia bersifat representatif dalam arti bahwa setiap surat suara turut diperhitungkan dan praktis tidak ada suara yang hilang. Golongan-golongan bagaimana kecilpun dapat mendapatkan wakilnya dalam badan perwakilan rakyat. Masyarakat yang heterogen sifatnya, umumnya lebih tertarik pada sistem ini karena dianggap lebih menguntungkan masing-masing golongan (Budiardjo, 1977: 177-180).

Secara spesifik, sistem proporsional yang digunakan adalah Sistem Perwakilan Berimbang dengan sistem daftar terbuka (*Open List System*). Dengan sistem ini para pemilih tidak hanya memilih partai tetapi juga memilih calon yang dikehendaki. Pemilih disamping mencoblos gambar juga mencoblos nama calon yang dikehendaki. Bergantung pada berapa kursi yang disediakan untuk distrik tersebut. Kelebihan sistem ini adalah para pemilih yang menentukan calon, bukan pemimpin partai yang lebih menentukan calon mana yang dikehendaki dan calon mana yang ditolak (Friyanti, 2005: 33).

Sistem pemilu yang dipakai dalam pemilu 1955 adalah sistem perwakilan berimbang (*proportional representation*) yang dikaitkan dengan sistem daftar. Dalam pemilu 1955 ternyata ada 52 kontestan yang terdiri dari partai politik dan

perorangan, tetapi yang berhasil meraih kursi hanya 27 partai saja dan satu calon perorangan yaitu R. Soedjono Prawirosoedarso (Purwantara dalam Budihardjo, 1977:60).

Didalam UU tidak dijelaskan status Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) sehingga sering menimbulkan permasalahan. Pada awalnya tugas yang bersifat administratif merupakan tugas yang kedua Menteri Kehakiman dan Menteri Dalam Negeri, sedangkan PPI bertugas mempersiapkan, memimpin dan menyelenggarakan pemilihan anggota Konstituante dan anggota DPR. Kemudian diadakan rapat pleno untuk membahas tentang tugas dari PPI. Berdasarkan keputusan Dewan Menteri pada Mei 1954, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan surat edaran pembedaan atas instruksinya tentang status badan-badan penyelenggara pemilu.

Di dalam menjalankan fungsinya sampai ke daerah-daerah PPI dibantu oleh (1) Panitia pemilihan yang berkedudukan di tiap daerah pemilihan (Propinsi) yang anggotanya diangkat oleh Menteri Kehakiman, (2) Panitia Pemilihan Kabupaten diangkat oleh Menteri Kehakiman, (3) Panitia Pemungutan Suara yang berkedudukan di Kecamatan bertugas mensahkan daftar pemilih dan menyelenggarakan pemungutan suara, (4) Panitia Pendaftaran Pemilih berkedudukan di desa yang bertugas melakukan pendaftaran pemilih dan menyusun daftar pemilih, (5) Panitia Pemilihan Luar Negeri yang dilakukan oleh perwakilan Republik Indonesia bertugas menyelenggarakan administrasi pemilihan dan mengumpulkan surat suara bagi WNI di Luar negeri (Pabottingi 1998:24).

Ketentuan mengenai kampanye tidak diatur dalam UU pemilu, tetapi pelaksanaannya diatur dalam keputusan Dewan Keamanan Nasional No 11640 tanggal 2 Mei 1955, tidak ditentukan masa berkampanye, namun hanya disebutkan bahwa kampanye berakhir sehari sebelum pemungutan suara, pada umumnya kampanye dapat dilakukan melalui rapat umum, arak-arakkan dengan mempergunakan pengeras suara, menempelkan poster dan penyebaran surat selebaran. Adapun bentuk kampanye yang dilarang adalah segala bentuk penyiaran baik lisan maupun tertulis yang merugikan kedudukan presiden dan wakil presiden.

Dalam pemilu 1955, berdasarkan UU No. 7 tahun 1953 tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat pasal 15 ayat 1 dinyatakan pemilu untuk terbagi atas beberapa daerah pemilihan, yakni (1) Jawa Timur, (2) Jawa Tengah, (3) Jawa Barat, (4) Jakarta Raya, (5) Sumatera Selatan, (6) Sumatera Tengah, (7) Sumatera Utara, (8) Kalimantan Barat, (9) Kalimantan Selatan, (10) Kalimantan Timur, (11) Sulawesi Utara-Tengah (12) Sulawesi Tenggara-Selatan, (13) Maluku, (14) Sunda-Kecil Timur, (15) Sunda-Kecil Barat, dan (16) Irian Barat.

Anggota Konstituante dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih oleh warga negara Indonesia, yang dalam tahun pemilihan berumur genap 18 tahun atau yang sudah kawin lebih dahulu, termasuk golongan militer dan polisi. Namun demikian, dalam UU no 7 tahun 1953 juga dijelaskan bahwa seorang tidak diperkenankan menjalankan hak-pilih, apabila ia (1) tidak terdaftar dalam daftar-pemilih, (2) dengan putusan pengadilan, yang tidak dapat diubah lagi, sedang

dalam keadaan dipecat dari hak-pilih, (3) dengan putusan pengadilan, yang tidak dapat diubah lagi, sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan, termasuk di dalamnya kurungan pengganti, dan (5) nyata-nyata terganggu ingatannya. Pemilu pertama yang dilaksanakan di seluruh tanah air kecuali Irian Barat memperebutkan 257 kursi DPR dengan jumlah pemilih sebanyak 43.104.464 orang.

Persiapan untuk pemilu telah diadakan oleh Kabinet Ali Sastroamijoyo I (31 Juli 1953–12 Agustus 1955). Sebelumnya setelah pengesahan undang-undang tentang pemilu, dibentuklah Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) melalui keputusan Presiden Republik Indonesia tertanggal 7 November 1953, PPI dilantik dan diangkat sumpahnya oleh kepala negara pada tanggal 28 November 1953. Dilanjutkan dengan serah terima dengan Kantor Pemilihan Pusat pada tanggal 3 Desember 1953. S Hadikusumo dari PNI terpilih sebagai ketua PPI. Anggota-anggotanya dipilih dari berbagai partai, yakni NU, PSII, PRI, PRN, Partai Buruh, BTI, Perti, Parkindo (Feith, 1971: 384).

Hal-hal yang dipersiapkan antara lain membentuk panitia pemilu, baik untuk pusat maupun untuk daerah, menetapkan daerah pemilihan dan daerah pemungutan suara. Pada tanggal 16 April 1955 diumumkan bahwa pemilu akan dilaksanakan pada tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR dan tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota konstituante. Dengan adanya pengumuman tersebut maka partai politik mulai berkampanye untuk menarik simpati rakyat (Feith, 1971: 46). Namun demikian, pada pemilihan untuk parlemen direncanakan serempak pada tanggal 29 September, tetap ada beberapa

wilayah yang tidak dapat menjalankan pada hari tersebut. Untuk mengatasi hal itu, maka diberikan putusan bahwa daerah yang tidak sanggup melaksanakan pemilihan pada tanggal 29 September 1955 mendapatkan dispensasi selama dua bulan sampai tanggal 29 November untuk melaksanakan pemilu.

Dalam rangka menghadapi pelaksanaan pemilu, Jawa Tengah melalui ketua Panitia Pemilihan, Rustamadji menyatakan bahwa Jawa Tengah telah siap untuk menyelenggarakan pemilu untuk parlemen tanggal 29 September 1955.

Rustamadji menyatakan bahwa pada tiga minggu menjelang pemilihan tanggal 29, persiapan untuk pemilu telah beres, dan tinggal menyempurnakan saja. Daerah-daerah yang terpencil seperti Karimunjawa dan tempat-tempat rawan di daerah MMC (Merapi Merbabu Complex) dan GBN (Gerakan Banteng) tidak ada yang meminta agar diadakan pemungutan susulan, tetapi serentak tanggal 29 September. (Suara Merdeka, 10 September 1955). Lebih lanjut lagi dinyatakan bahwa pada pemilu 1955, jumlah penduduk Jawa Tengah adalah 17.602.101 dan yang terdaftar sebagai pemilih adalah 10.120.962. Di Jawa Tengah terdapat sekitar 16.209 tempat pemungutan suara (Suara Merdeka, 10 September 1955).

Peserta pemilu dari kalangan Partai atau organisasi adalah 28 untuk parlemen, dan 34 untuk majelis konstituante. Peserta pemilu 1955 dapat digolongkan berdasarkan ideologinya antara lain. *Pertama*, partai politik yang beraliran nasionalis yaitu partai politik peserta pemilu 1955 yang beraliran nasionalis antara lain Partai Nasional Indonesia (PNI), Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), Gerakan Pembela Pancasila, Partai Rakyat Nasional, Persatuan Pegawai Polisi Republik Indonesia (PPPRI), Partai Buruh,

Partai Rakyat Indonesia, PRIM, Partai R. Soedjono Prawirosoedarso, Partai Indonesia Raya Wongsonegoro, Partai Indonesia Raya Hazairin, Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia (PERMAI), Partai Persatuan Daya.

Kedua, partai politik yang beraliran Islam. Partai politik peserta pemilu 1955 yang beraliran Islam antara lain Masyumi, Nahdlatul Ulama (NU), Partai Serikat Islam Indonesia (PSII), Partai Islam Perti, AKUI, Partai Politik Tharikat Islam (PPTI).

Ketiga, Partai politik yang beraliran komunis. Partai peserta pemilu yang beraliran komunis antara lain Partai Komunis Indonesia (PKI) dan ACOMA.

Keempat, partai politik yang beraliran sosialis. Partai yang beraliran sosialis antara lain Partai Sosialis Indonesia (PSI), Partai Murba, Partai Rakyat Desa dan Baperki.

Kelima, partai yang beraliran Kristen/Nasrani, yakni partai peserta pemilu yang beraliran Kristen/Nasrani antara lain Partai Kristen Indonesia (Parkindo), dan Partai Katolik (Pabottingi. 1998: 43).

Berdasarkan PP No 9 tahun 1954 dijelaskan bahwa pemilihan anggota konstituante dan pemilihan anggota DPR hanya berbeda dalam jumlah anggota yang dipilih. Dasar-dasar, azas-azas dan ketentuan tentang pelaksanaan hak pilih dan tentang administrasi pemilihan adalah bersamaan menurut Undang-Undang Pemilu. Karena demikian, maka aturan yang penyelenggaraan pemilihan antara DPR dan konstituante adalah sama.

Pada perencanaannya, pada dasarnya pemilu diupayakan untuk dilaksanakan secara serentak dan bersama-sama antara pemilihan DPR dan

konstituante, sehingga proses pascapemilihan dapat dilaksanakan secara serempak. Namun karena untuk mempermudah administrasi maka, pelaksanaan keduanya dilaksanakan secara terpisah. Berdasarkan PP No 9 tahun 1954, berikut adalah jadwal pelaksanaan dari pemilu

Tabel 3. Jadwal Pelaksanaan Rangkaian Acara Pemilihan Umum

Tanggal	Agenda
Tentang daftar Pemilih 1 April 1954 15 April 1954 16 April 16 April -17 Mei 1954 1 Juni 1954 1 – 7 Juni 1954 15 Juni 1954	Selesai pendaftaran pemilih Sudah disusun daftar pemilih sementara Pengumuman daftar pemilih sementara Usul-usul perubahan terhadap daftar pilih sementara Pengesahan daftar pemilih Kesempatan untukmendaftarkan daftar pemilih tambahan Panitia Pedaftaran Pemilih (PPI) menyusun daftar pemilih tambahan
Tentang jumlah pemilih dan jumlah anggota 16 April 1954 1 Mei 1954 10 Mei 1954 15 Mei 1954 20 Mei 1954 1 Juli 1954	Jumlah pendudukan diberitahukan kepada PPS Jumlah penduduk diberitahukan pada Panitia Pemilihan Kabupaten (PPK) Jumlah penduduk diberitahukan kepada Panitia Pemilihan (PP) Jumlah penduduk diberitahukan kepada Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) Penetapan jumlah anggota konstituante dan dewan perwakilan rakyat
Tentang pencalonan 1 Maret 1954 1 Juni 1954 15-22 Juni 1954 15 Juli – 15 Agustus 1954 15 Agustus – 15 September 1954 17 September 1954	Mulai dimajukan nama calon dan tanda gambar untuk DPR dan konstituante Penetapan dan pengumuman nama dan tanda gambar oleh PPI Formulir surat pencalonan dapat diminta di tiap kantor PPS Pengiriman surat pencalonan untuk DPR kepada PPK dan PPK mengirimkan kepada PP Pengiriman surat pencalonan untuk Konsituante kepada PPK dan PPK mengirimkan kepada PP Selesai pemeriksaan surat-surat pencalonan untuk DPR

17 Oktober 1954	oleh PP Selesai pemeriksaan surat-surat pencalonan untuk Konstituante oleh PP
17 September-2 Oktober 1954	Kesempatan untuk memperbaiki surat pencalonan untuk DPR
17 Oktober-2 November 1954	Kesempatan untuk memperbaiki surat pencalonan untuk Konstituante
9 Oktober 1954	Selesai penyusunan daftar calon sementara untuk DPR oleh PP
9 November 1954	Selesai penyusunan daftar calon sementara untuk Konsituante oleh PP
7 November 1954	Selesai pemeriksaan daftar calon sementara untuk DPR oleh PPI
7 Desember 1954	Selesai pemeriksaan daftar calon sementara untuk Konstituante oleh PPI
15 November 1954	Selesai penyusunan daftar calon tetap untuk DPR oleh PPI untuk masing-masing daerah pemilihan
31 Desember 1954	Selesai penyusunan daftar calon tetap untuk Konstituante oleh PPI untuk masing-masing daerah pemilihan
30 November 1954	Selesai pengumuman daftar calon tetap untuk DPR oleh PPI
15 Februari 1955	Selesai pengumuman daftar calon tetap untuk Konstituante oleh PPI
Tentang Pemungutan Suara 1 Februari 1955 15 April 1955	Pemungutan suara untuk DPR Pemungutan suara untuk Konstituante

Sumber: PP No 9 tahun 1954

Pelaksanaan pemilu tidak dilaksanakan sesuai jadwal, tetapi baru terealisasi beberapa bulan kemudian, yakni tanggal 29 September untuk memilih anggota DPR dan 15 Desember 1955 memilih anggota konstituante. Terlaksananya pemilu 1955 ternyata membutuhkan proses yang cukup panjang. Keinginan pemerintah untuk melaksanakan pemilu sejak Desember 1945 baru dilaksanakan pada tahun 1955. Melalui berbagai perdebatan, pergantian beberapa kabinet dan pembahasan

terhadap naskah perundang-undangan Pemilu, lahirnya pemilu dapat dilaksanakan. Langkah awal yang dilaksanakan adalah pendaftaran pemilih yang dilakukan oleh PPS sejak 17 bulan sebelum Pemilu diadakan. Jumlah pemilih yang tercatat pada saat itu adalah 43.104.464 orang. Diperhitungkan sebanyak 91,45 % dari jumlah pemilih yang tercatat telah datang ke TPS 95.532 orang, karena diperkirakan 2,5 % dari jumlah pemilih yang terdaftar telah meninggal dunia. Jumlah kursi DPR yang diperebutkan sebanyak 257 buah, jumlah ini berasal dari ketentuan bahwa masing-masing anggota DPR yang dipilih mewakili 300.000 orang. Sedangkan pada saat itu jumlah penduduk Indonesia termasuk Irian Barat sekitar 77.987.879 jiwa. Dari jumlah kursi sebanyak 257 terdapat juga anggota DPR yang diangkat yaitu 3 (tiga) kursi untuk Irian Barat, 6 (enam) kursi mewakili golongan Tionghoa, 3 (tiga) golongan Arab dan 3 (tiga) kursi mewakili golongan Eropa sehingga jumlah akhir anggota DPR menjadi 272 orang Pemilu 1955 menghasilkan 4 (empat) partai politik yang meraih kemenangan besar yaitu PNI (57 kursi), Masyumi (57 kursi), NU (45 kursi) dan PKI (39 kursi). Munculnya NU dan PKI sebagai partai besar merupakan hal yang tidak terduga sebelumnya karena pada masa DPRS NU hanya memperoleh 8 kursi dan PKI 17 kursi.

Dalam pemilu total pengeluaran sekitar 550 juta, padahal pada mulanya ditaksir hanya sekitar 300 juta (Tangkas, 29 Agustus 1955). Di Jawa Tengah sendiri, sampai tiga minggu sebelum pelaksanaan pemilu, total pengeluaran telah mencapai 25 juta. Uang tersebut digunakan untuk distribusi alat-alat, biaya

bangunan yang mencapai 4.200.000, ongkos-ongkos pelatihan senilai 462.000, dan sebagainya (Suara Merdeka, 10 Agustus 1955).

Hasil pemilu 1955 menggambarkan sirkulasi elit kekuasaan yang berbeda dibandingkan dengan komposisi dalam DPRS. Perubahan komposisi tersebut jelas memperlihatkan bahwa pemilu 1955 secara langsung menghasilkan elit di legislatif dan secara tidak langsung elit di eksekutif. Pada tingkat legislatif perubahan ternyata sangat besar dimana terdapat hanya sekitar 62 orang anggota DPRS yang berhasil mempertahankan kursi pada pemilu 1955.

Hasil pemilu 1955 menunjukkan polarisasi yang cukup tajam antara partai-partai yang cukup agama, dan non agama yang menampilkan empat partai besar terkuat hasil pemilu yaitu PNI, PKI, Masyumi dan NU. Kestabilan politik yang diharapkan sebagai lembaga baru ini semakin meningkat sampai akhirnya Kabinet Ali menyerahkan mandat pada presiden. Pemberontakan di daerah, perdebatan di konstituante yang berlarut-larut sehingga atas desakan tentara, Presiden akhirnya mengeluarkan Dekrit 5 Juli 1959 untuk kembali ke UUD 1945 yang memutuskan juga untuk membubarkan Dewan Konstituante. Hal tersebut juga dialami oleh DPR hasil pemilu yang digantikan oleh DPR Gotong Royong (DPR GR) yang anggotanya diangkat oleh presiden.

BAB IV

PERKEMBANGAN PARTAI NASIONAL INDONESIA

A. PNI Sebelum Kemerdekaan

Sejarah panjang PNI muncul bersamaan dengan perkembangan pergerakan nasional di Indonesia. Berdirinya Partai ini merupakan sebagai tuntutan kebutuhan atas keadaan sosio-politik yang sangat kompleks saat itu. Terlepas dari itu, pemberontakan yang dilakukan oleh PKI tahun 1926, juga memberikan semangat yang besar untuk menyusun sebuah gerakan-gerakan serupa untuk melakukan perlawanan terhadap Pemerintah Kolonial Belanda. Dan setelah belajar dari peristiwa pemberontakan yang dilakukan oleh PKI, maka organisasi ini berkesimpulan bahwa strategi menggunakan kekerasan tidak akan membuahkan hasil, sehingga dibutuhkan strategi lain yang lebih efektif serta efisien yakni dengan jalur diplomasi (Utomo, 1995: 42).

Koordinasi-koordinasi pun dengan sangat gencar dilakukan oleh Sudjadi yang merupakan wakil Perhimpunan Indonesia di Indonesia dengan Moh. Hatta yang berada di negeri Belanda. Dan kelompok Studi Bandung serta kelompok Studi Surabaya bersama-sama dengan Sukarno sebagai wakil dari kelompok-kelompok nasionalis Indonesia mendirikan partai baru dengan nama Partai Nasional Indonesia (PNI) pada tahun 1927 (Utomo, 1995: 46)

Pada tanggal 4 Juni 1927 Partai Nasional Indonesia atau biasa disebut PNI, didirikan oleh para anggota *Bandung Studie Club* di bawah pimpinan seorang insinyur muda, Sukarno, satu dari sedikit anggota organisasi itu.

Sukarno adalah anak didik Tjokroaminoto yang memperoleh gelar Ir (Insinyur) di Akademik Teknik Bandung (Utomo, 1995: 52). Disamping memiliki latar belakang pendidikan Islam maupun Barat, Sukarno punya bakat unik, yaitu kemampuan mengawinkan Konsep Barat dan Konsep Islam, dengan Konsep mistisisme yang telah diperkuat oleh ajaran Hindu-Budha yang masih di kalangan orang Jawa dan mewujudkannya dalam istilah-istilah yang mudah dimengerti oleh kaum tani. Anggota terkemuka lain dari partai baru itu adalah Mr. Iskaq Tjokrohadisoerjo sebagai sekretaris, dan Dr. Tjipto Mangoenkoesoemo, Ir. Anwari, Mr. Budiarto, Mr. Sartono, Mr. Ali Sastroamidjojo, Dr. Sasmi Sastrowidagdo dan Mr. Sunarjo. Partai tersebut bertujuan memperoleh kemerdekaan penuh bagi Indonesia, baik secara ekonomi maupun secara politis di bawah suatu pemerintah yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada seluruh rakyat Indonesia. Organisasi itu berpendapat bahwa kemerdekaan semacam itu hanya berhasil tanpa kerjasama dengan Belanda, dan hanya akan diperoleh dengan kesatuan usaha orang Indonesia sendiri. Kesatuan di kalangan mereka dan ketergantungan pada orang Indonesia sendiri dianggap paling penting. Sukarno sering menekankan bahwa partai itu tidak boleh berdasarkan agama Islam, karena kemerdekaan adalah tujuan baik orang Kristen maupun Islam. Dalam pidato-pidatonya, ia mengatakan bahwa tidak ada gunanya menanti bantuan dari “suatu pesawat terbang Moskow atau suatu Kalifah Istanbul”. Bahkan pada tahun 1929, Sukarno memperingatkan bahwa persatuan juga penting untuk membela Indonesia dalam menghadapi perang Pasifik antara negara-negara berkekuatan

besar. Dalam program jangka pendeknya, partai itu aktif membentuk persatuan-persatuan buruh, mengembangkan koperasi dan membantu pendidikan nasional, terutama sekolah-sekolah Taman Siswa Utomo (Utomo, 1995: 58-60).

Program PNI dan pemimpinnya yang terampil, terutama keahlian Sukarno berpidato, membuat perkumpulan itu dengan cepat berkembang dan bertambah luas. Dalam waktu dua tahun, PNI sudah punya 10.000 orang anggota. Tidak diragukan lagi bahwa jumlah ini meliputi mereka yang ditarik dari Sarekat Rakyat dan persatuan-persatuan dagang dibawah komunis dahulu (Utomo, 1995: 63). Hingga taraf tertentu, pertumbuhan cepat ini juga dimungkinkan oleh kebijakan yang relatif liberal dan hak mengadakan persekutuan yang diberikan oleh De Graeff, Gubernur Jendral Belanda yang masa pemerintahan lima-tahunnya dimulai tepat setelah pemberontakan komunis meletus. De Graeff jauh lebih toleran kepada pergerakan kebangsaan dibanding dengan Gubernur Jendral sebelum dan sesudahnya (Utomo, 1995: 68).

PNI menjadi organisasi nasionalis terkuat di Indonesia, dan berkat dukungan para pemimpin Sarekat Islam, mampu membentuk suatu federasi bebas untuk semua organisasi nasionalis penting yang ada. Federasi ini, PPPKI, menyebabkan pergerakan kebangsaan punya suatu kesatuan yang belum pernah mereka miliki sebelumnya. Dengan demikian, unsur utama kerja sama semua organisasi kebangsaan itu lebih didorong ke arah tujuan PNI dan Sarekat Islam yang non-kooperatif (Utomo, 1995: 71).

Kekuatan PNI yang cepat bersatu itu dan nadanya yang terang-terangan anti-pemerintah, dipadu dengan nadanya yang keterlaluan anti-kapitalis (meskipun jelas bukan komunis), sangat mengkhawatirkan masyarakat Belanda di Hindia (Utomo, 1995: 75). Ini segera menimbulkan tekanan bertalian dengan pemerintahannya yang sudah resah itu, dan pada tanggal 24 Desember 1929, Sukarno dan tujuh pemimpin lain organisasi itu ditawan. Setelah ditahan selama lebih dari tujuh bulan, empat dari mereka, Sukarno, Gatot Mangoenpradja, Maskoen, dan Soepriadinata, dibawa ke pengadilan, dan pada tanggal 3 September 1930, dijatuhi hukuman penjara sekitar satu hingga tiga tahun, dan Sukarno mendapat hukuman terberat. Ketiga lainnya dituduh “telah berpartisipasi dalam suatu organisasi yang bertujuan melakukan kejahatan-kejahatan maupaun terang-terangan mengucapkan kata-kata yang mengganggu ketentraman umum dan menganjurkan digulingkannya penguasaan Hindia Belanda yang sudah mantap” (Utomo, 1995: 78-83)

Untuk sementara waktu, penahanan para pemimpin itu dan kelanjutannya yaitu bahwasanya organisasi tersebut dianggap tidak sah, membuat karakter organisasi-organisasi nasionalis menjadi tidak begitu keras lagi dan pemimpinnya lebih berhati-hati dan programnya lebih moderat daripada PNI. Yang pertama, Partai Rakyat Indonesia, dibentuk oleh Mohammad Tabrani, seorang wartawan Indonesia terkemuka, pada tanggal 14 September 1930 (Utomo, 1995: 86). Programnya berlandaskan kerjasama dengan Belanda dan bertujuan mencapai pemerintahan sendiri bagi Indonesia secara parlementer. Organisasi ini hanya menarik sedikit anggota. Mayoritas

anggota PNI mengikuti Sartono, yang bersama sisa pengurus partai lainnya, mengajukan agar anggotanya menghentikan aktivitas mereka. Sartono kemudian mendirikan partai baru Partai Indonesia (PARTINDO) pada akhir April 1931 (Utomo, 1995: 89). Partai ini menginginkan kemerdekaan penuh tanpa kerjasama dengan Belanda, tetapi dengan metode yang jauh moderat daripada metode PNI.

Bahwasanya Hatta dan Sjahrir memilih untuk tidak bekerjasama dengan Partindo, organisasi politik massa tersebut, namun sebaliknya dengan terang-terangan memilih bergabung dengan kelompok nasionalis Golongan Merdeka yang relatif kecil, dan punya kesadaran politik yang tinggi, punya arti penting untuk jangka panjang (Utomo, 1995: 91). Kedua orang itu yakin, bahwa partai massa semacam itu, dan pimpinannya yang kharismatik dan sangat dipercaya, tidak cocok untuk melanjutkan pergerakan kebangsaan secara efektif. Mereka merasa, bahwa setiap saat Belanda dapat memenjarakan setiap pemimpin yang daya tariknya terhadap massa membahayakan kepentingan Belanda, sehingga tergantung pada pimpinan semacam itu tidak ada artinya. Suatu pergerakan kebangsaan yang bergantung kepada beberapa orang penting yang sedang jaya, pasti akan menemui kegagalan, karena Belanda jelas akan menyingkirkan para pemimpin semacam itu dari kancah politik. Mereka yakin bahwa pergerakan semacam itu hanya akan punya kekuatan jika sejumlah rakyat Indonesia dididik agar matang dalam masalah-masalah politik, dan punya pengertian yang mendalam tentang prinsip-prinsip kebangsaan (Utomo, 1995: 93).

Meskipun telah terbentuk sebuah partai baru, namun Hatta masih tetap menekankan unsur pengajaran agar tetap diutamakan demi mencetak generasi yang edukatif sehingga akan semakin memperkuat pergerakan yang akan dilakukan. Suhartono (1994: 56) pada tanggal 4 Juli 1927 kelompok nasionalis mengadakan pertemuan yang bertempat di Bandung yang bertujuan untuk mendukung terbentuknya Perserikatan Nasional Indonesia.

Organisasi politik yang relatif masing sangat muda ini demikian cepat berkembang. Tidak hanya jumlah cabangnya, tetapi juga jumlah anggotanya yang semakin banyak. Pada akhir tahun 1928 jumlah anggota PNI mencapai 2.787 orang. Cabang-cabang yang telah didirikan antara lain di Bandung, Batavia, Surabaya, Yogyakarta, Semarang, Pekalongan, Palembang, Makasar, serta Manado. Dari sekian cabang tersebut kebanyakan anggotanya adalah dari golongan menengah ke bawah yaitu dari golongan pedagang, pegawai perusahaan swasta, serta para petani (Suhartono, 1994: 58).

Setengah tahun kemudian yakni sampai dengan bulan Mei 1929, jumlah anggotanya mencapai 3.860 orang. Kenaikan tersebut merupakan dampak dari propaganda yang dilakukan selama tahun 1928. Sehingga dikatakan bahwa PNI merupakan basis partai massa. Pada dasarnya PNI sendiri merupakan partai yang dilandasi dengan radikal-revolusioner. Penggalangan massa yang sangat bagus juga karena retorika-retorika yang disampaikan oleh Sukarno yang sangat menarik perhatian rakyat. Kharismatis yang muncul dari kewibawaan Sukarno itulah yang digunakan untuk menyadarkan rakyat akan

konsep merdeka, asas-asas kerakyatan, persatuan Indonesia, dan lain sebagainya (Suhartono, 1994: 60).

Ada dua cara yang dilakukan oleh PNI dalam memperkuat diri serta pengaruhnya dalam masyarakat, yakni usaha ke dalam serta usaha ke luar. Pertama, usaha ke dalam, yaitu usaha-usaha terhadap lingkungan sendiri, antara lain mengadakan kursus-kursus, mendirikan sekoloah-sekolah, serta bank-bank, dan lain-lain. Kedua, usaha ke luar, yakni dengan memperkuat opini public terhadap tujuan PNI, antara lain melalui rapat-rapat umum dan menerbitkan surat kabar *Banteng Priangan* di Bandung serta *Persatuan Indonesia* di Batavia (Suhartono, 1994: 62).

Sukses propaganda PNI tak terlepas dari paham yang dianutnya, yaitu marhaenisme. Kata *marhaen* menurut Sukarno adalah nama seorang petani kecil yang dijumpainya dan menurutnya mewakili kelas sosial yang rendah. Di dalam perjuangan nasional nasib kaum marhaen harus ditingkatkan dengan gerakan massa menuntut kemerdekaan sebagai syarat terciptanya kondisi hidup yang lebih baik bagi kaum marhaen (Feith, 1971: 105).

Melihat perkembangan PNI yang sangat cepat, pemerintah kolonial Belanda memberikan perhatian khusus terkait pengalaman masa lalu seperti yang dilakukan oleh PKI. Belanda mengawasi gerak-gerik para pembesar PNI. Sehingga secara tidak langsung mengurangi kebebasan gerak serta aktifitas PNI lainnya. Pemerintah Kolonial Belanda menyebut PNI sebagai salah satu kelompok nasionalis Ekstrim.

Setelah semakin berkembangnya PNI, maka Pemerintah Kolonial Belanda memandang perlu memberikan teguran kepada tokoh-tokoh PNI. Namun para nasionalis PNI ternyata tidak menghiraukan sedikitpun peringatan yang diberikan oleh Pemerintah Kolonial Belanda yang dalam hal ini disampaikan oleh Gubernur Jendral de Graff. Ditambah lagi desas-desus yang berkembang di masyarakat bahwa PNI akan melakukan pemberontakan atas Pemerintah Kolonial Belanda, maka pada tahun 1929 Belanda melakukan penangkapan terhadap Sukarno beserta kawan-kawannya yang kemudian dibuang ke Bandung. Dan penangkapan serta pengeledahan-pengeledahan dengan sangat gencarnya dilakukan oleh Pemerintah Kolonial Belanda dengan alasan pemberontakan yang akan dilakukan oleh PNI (Suhartono, 1994: 66).

Dan setelah melalui pemeriksaan-pemeriksaan selama hampir 4 bulan, akhirnya dalam sidang yang diadakan di Bandung pada tanggal 18 Agustus 1930 hingga 29 September 1930, Sukarno menyampaikan pidato pembelaannya yang ia sebut dengan *Indonesia Menggugat* yang mengupas tuntas dan mengecam seluruh watak kejam Pemerintah Kolonial Belanda yang eksploitatif (Suhartono, 1994: 68). Dan akhirnya Sukarno dipenjarakan dengan hukuman penjara paling lama 4 tahun. Dan PNI berdasarkan pertimbangan keberlangsungan perjuangan nasional, dalam kongres luar biasa ke II di Jakarta, diambil keputusan untuk membubarkan Partai Nasional Indonesi pada tanggal 25 April 1931.

B. PNI Setelah Kemerdekaan

Setelah proklamasi kemerdekaan, langkah penting kedua dari Badan Pekerja adalah dengan suatu usul perundang-undangan berikutnya pada hari yang sama itu, 30 Oktober 1945, yang menyarankan agar sistem partai tunggal diganti dengan sistem multi-partai dimana semua aliran politik yang penting punya perwakilan (Kahin, 1995: 40). Presiden segera menyetujuinya, dan persetujuannya ditambah dengan permintaan agar partai-partai sudah terbentuk sebelum diadakan pemilu untuk Dewan Perwakilan Rakyat (yang bakal mengganti KNIP-sementara yang dibentuk tidak berdasarkan pemilu), yang menurut rencana akan berlangsung pada bulan Januari 1946.

Dari banyak partai yang berdiri, semula yang terkuat adalah Partai Nasional Indonesia, atau kelak dikenal sebagai PNI. PNI baru ini didukung oleh suatu persentase yang besar dari golongan profesional Republik itu dan mungkin mayoritas pegawai negeri yang sudah bekerja pada pemerintah penjajah sebelum perang. Sejumlah besar kaum cendikiawannya sudah aktif dalam pergerakan kebangsaan sebelum perang. Karena sebagian besar anggotanya adalah bekas anggota PNI lama, mayoritas pemimpinnya rata-rata berusia lebih tua daripada pemimpin partai-partai lainnya.

Semula banyak yang tertarik untuk masuk PNI sehingga jumlahnya demikian membesar, baik karena mereka dulu ikut partai Sukarno sebelum perang, maupun karena pernah ikut partai resmi pemerintah yang dibentuk pada tanggal 22 Agustus 1945 dengan dukungan Sukarno maupun Hatta (Kahin, 1995: 115). Jadi, suatu jumlah besar massa pendukungnya yang mula-

mula, berpegang pada pendapat bahwa PNI adalah “partainya Sukarno dan Hatta”. Banyak orang Indonesia baru bisa menghilangkan pendapat ini setelah setahun atau lebih, tetapi sementara penulis asing masih tetap berpendapat demikian.

Pascakemerdekaan, PNI berdiri di Kediri pada bulan Januari 1946 yang dipimpin oleh pemimpin dari Serindo (Serikat Rakyat Indonesia), sebuah organisasi yang didirikan pada bulan Desember 1945 di Jakarta. Pada kongres di Kediri, Serindo bergabung dengan beberapa partai kecil lainnya dari Jawa Tengah dan Jawa Timur dan beberapa kelompok kecil dari Sumatera dan Sulawesi membentuk partai baru, yakni PNI. Partai ini terdiri atas beberapa kalangan dan berbagai lapisan pekerjaan, seperti pengacara, pegawai negeri, guru, dan sebagainya. Kepemimpinan PNI pascakemerdekaan berada di tangan pemimpin PNI sebelum kemerdekaan, Partindo, Gerindo, dan beberapa orang Parindra. Pada tahun 1947, pemimpin PNI berasal dari kalangan pemimpin PNI sebelum kemerdekaan dan Partindo, yakni Sarmidi Mangunsarkoro, Sartono, dan Sidik Djojokusarto (Rocamora, 1970: 143-145).

Bagaimanapun juga, PNI punya cara jangka panjang yang penting untuk menarik dukungan massa. Ini terbukti dari kenyataan bahwa PNI mungkin mendapat dukungan dari suatu mayoritas pejabat pemerintah setempat yang sebagian besar termasuk dalam kelompok yang sama dengan pegawai negeri aristokrat Indonesia yang dulu melayani pemerintah Belanda sebelum perang. Demikian juga, PNI menarik banyak dukungan dari pegawai negeri non-aristokrat yang pernah bekerja dalam pemerintah Belanda sebelumnya.

Meskipun revolusi telah banyak mengubah adat kebiasaan otoriter masyarakat Indonesia yang sudah mengakar, petani masih sangat cenderung mencari bimbingan politik dan pengarahan dari atasannya yang lama, yaitu golongan pemerintah Indonesia yang berpengalaman. Kenyataan ini menjadi benteng politik PNI selama waktu yang lama.

Kebanyakan orang percaya bahwa reaksi petani yang tradisional dan menurut kebiasaan terhadap penguasa ini, memberi PNI dukungan kuat untuk bersaing dalam pemilu mendatang. Keuntungan ini hanya dikalahkan oleh dukungan yang diperoleh Masyumi dari petani lewat ikatan agama. Disamping itu, PNI memperoleh dukungan dari kebanyakan anggota kelas menengah industri dan pedagang yang jumlahnya hanya sedikit dan tidak tertarik kepada Masyumi. Karena hal ini, dan melihat kenyataan bahwa partai ini kemungkinan menarik mayoritas sektor terbesar dari kelas menengah Indonesia, yaitu birokrat Indonesia rezim lama, maka PNI sering dianggap sebagai “partai kelas menengah Indonesia”. Akhirnya, PNI mengembangkan suatu sayap kiri, mula-mula hanya minoritas, tetapi kemudian anggotanya bertambah banyak. Sayap kiri ini terutama mendapat dukungan dari sementara cendekiawan bukan komunis Marxis, beberapa kelompok buruh kecil yang terutama dipimpin oleh Wilopo dan Mangunsarkoro (setelah berpisah dari Sjahrir) dan sekelompok mahasiswa yang cenderung progresif (Kahin, 1995: 118-124).

Kahin (1995: 138) menyimpulkan “bagaimanapun juga, yang mendominasi pimpinan PNI bukanlah para pegawai negeri tingkat tinggi yang

termasuk sayap kanan, dan juga bukan para pemimpin terkemuka dari sayap kiri yang sedikit namun terus meningkat jumlahnya itu. Fungsi ini dipegang oleh sekelompok kecil, namun kuat, dari orang-orang yang menjadi terkenal dalam pergerakan kebangsaan Indonesia sebelum perang, yang terbanyak bekas anggota Partai Nasional Indonesia dari akhir tahun 1920-an dan partai penerusnya, Partindo. Diantaranya yang terpenting adalah Mr. Sartono, Mr. AliSastroamidjojo, Sidik Djojokusarto, Manai Sophian, Mr. Sujono Hadinoto, Mr. Susanto Tirtoprojo, dan Suwirjo. Ideologi sosial ekonomi hampir seluruh kelompok ini sangat dekat dengan sayap kiri partai tersebut dibandingkan dengan sayap kanannya”.

Heterogenya unsur-unsur pokok partai itu membuat PNI menjadi suatu organisasi politik yang berat. Prinsip dasarnya yang mendahulukan kemerdekaan bangsa di atas setiap perbaikan sosial, menyebabkan unsur-unsur dasar itu bersatu sehingga partai itu dapat mempertahankan suatu kebijakan yang relatif konsisten dalam hal hubungannya dengan Belanda. Akan tetapi, perbedaan pandangan di kalangan unsur pokok itu dalam menanggapi masalah-masalah dalam negeri, justru menyulitkan partai tersebut melaksanakan kebijakan yang jelas dan konsisten.

PNI memiliki ideologi Marhaenisme sebagai landasan gerakannya. Tujuan gerakan massa Marhaen ialah mewujudkan masyarakat Marhaenis. Masyarakat Marhaenis itu adalah masyarakat sama rata-sama bahagia yang tidak membolehkan tindas-menindas antara orang dan orang atau antara golongan dan golongan (Anggaran Dasar PNI). Dalam masyarakat Marhaenis

orang selalu bergotong-royong, bantu-membantu antara satu dan lainnya dengan kesadaran. Dalam masyarakat Marhaenis itu tiap-tiap orang berhak ikut menetapkan segala sesuatu dalam negara dengan jalan teratur dalam Undang-Undang dan menjalankan kewajiban yang sepadan dengan kekuatannya serta memikul tanggung jawab sesuai dengan bakat dan kecakapannya (Castles dan Feith, 1988: 138).

Pimpinan negara dijalankan oleh sesuatu pemerintah yang bersifat Pemerintah Rakyat, ialah pemerintah yang merupakan penjelmaan kehendak rakyat seluruhnya, terutama rakyat Marhaen. Tiap-tiap orang dengan bebas memilih dan memeluk agamanya. Tiap-tiap orang dapat mencapai kemajuan setinggi-tingginya menurut bakatnya dan merasakan hikmat dan nikmat hidup kebudayaan rakyat (Castle dan Feith, 1988: 59).

Dalam pandangan PNI, tiap-tiap orang harus hidup makmur, karena dapat bekerja dengan seksama. Tiap-tiap industri dan perusahaan besar dikuasai negara supaya untung bisa dirasakan oleh seluruh warga negara. Modal dan perusahaan perseorangan diatur, hingga tidak mungkin dijadikan alat pemeras orang lain. Dengan dasar itu maka terjaminlah hidup bahagia tiap-tiap orang yang bekerja, jadi terjamin pula bahagia seluruh masyarakat.

Selanjutnya, (Castle dan Feith, 1988: 144) menurut PNI kaum Marhaenis Indonesia harus mengetahui keadaan masyarakat Indonesia sebenar-benarnya. Sepanjang penyelidikan masyarakat, maka pada waktu ini dalam masyarakat Indonesia terdapat badan-badan dan tradisi feodal, bibit-bibit kapitalisme nasional, perusahaan raksasa bangsa asing dan rakyat yang

masih bodoh. Semua itu merupakan rintangan besar bagi tumbuhnya masyarakat Marhaenis.

Castle dan Feith (1988: 147-153) menyimpulkan “PNI melihat bahwa demokrasi di lapangan politik itu adalah misalnya hak perwakilan dan hak dipilih dan memilih bagi tiap orang (laki dan perempuan) untuk menjadi anggota perwakilan rakyat, baik yang di pusat maupun yang di daerah. Karena perwakilan rakyat itu kita dapat menentukan segala sesuatu yang harus berlaku dalam negara. Demokrasi di lapangan ekonomi itu adalah misalnya koperasi-koperasi rakyat di seluruh negara yang memungkinkan rakyat kita yang miskin ini dengan cara gotong-royong untuk kepentingan bersama menjalankan usaha-usaha ekonomi sebaik-baiknya hingga dapat menolak gencetan usaha-usaha ekonomi kapitalis yang hanya ditujukan untuk kepentingan sendiri. Lain daripada itu haruslah segala perusahaan partikular yang besar dan vital secepat mungkin dijadikan perusahaan pemerintah atau perusahaan pemerintah dan partikular bersama-sama, hingga pemerintah dapat menguasainya, untuk kepentingan rakyat seluruhnya. Demokrasi sosial itu misalnya kewajiban belajar buat tiap-tiap anak dan kebebasan bayaran sekolah buat tiap anak dari sekolah rendah sampai di sekolah tinggi, dan disamping itu pemberantasan buta huruf secara besar-besaran”.

Demokrasi yang ditanam PNI dijalankan dengan konsekuen, di segala pergaulan hidup kita di rumah, di kantor, di pabrik dan dimana-mana. Demokrasi yang dijalankan dengan konsekuen berarti adanya samarata-samarasa di segala hal, tetapi dengan teratur. Hanya susunan masyarakat

samarata-samarasa yang teratur baik, dapat mewujudkan keadaan sama sejahtera dan sama bahagia. Karena bahagia masyarakat itu dalam hakikatnya hanya bisa tercapai jika ada kemakmuran dan kemajuan maka masyarakat Marhaenis itu mesti membawa pangkal pokok pendirian yang sesuai dengan keharusan itu.

Jadi agar masyarakat samarata-samarasa dapat berwujud haruslah kemakmuran tercapai dengan cara yang merata bagi tiap-tiap orang. Pun kemajuan harus dicapai oleh tiap-tiap orang dengan cara yang sama dan merata pula. Dua hal menjadi sendi masyarakat Marhaenis dan bersama-sama merupakan keadilan sosial yang sebenarnya.

PNI mengusahakan terwujudnya pemerintah Marhaenis, yakni pemerintah yang ideologi dan usahanya selalu sesuai dengan kepentingan rakyat terbanyak yang miskin dan oleh karena itu dapat menjadi jaminan bahagia untuk rakyat seluruhnya. Aparatur masyarakat dan negara disusun untuk kepentingan Marhaen (Castle dan Feith, 1988: 167). Dan agar itu semua dapat tercapai haruslah jumlah anggota yang terbesar dari tiap-tiap badan perwakilan rakyat terdiri dari kaum Marhaenis, ialah pembela Marhaen dan prajurit yang berjuang untuk mewujudkan masyarakat Marhaenis. Dan untuk ini gerakan Marhaenis harus berjuang agar selalu menang dalam pemilu. Disamping badan perwakilan rakyat yang bersifat politik itu harus ada pula majelis ekonomi yang terdiri dari wakil-wakil buruh pemimpin-pemimpin perusahaan dan wakil instansi pemerintah yang berkewajiban mengatur dan mengawasi jalan produksi serta distribusi barang keperluan hidup rakyat.

Terutama yang perlu diatur dan diawasi ialah hubungan perburuhan serta produksi dan distribusi bahan-bahan hidup yang pokok untuk rakyat.

Karena kita lihat, bahwa dalam masyarakat kapitalis yang menjadi sumber kejahatan dan pemerasan itu hak milik pribadi (*privaat bezit*) yang merajalela, haruslah diusahakan adanya pembatasan milik itu, terutama hak milik tanah dan alat-alat produksi bahan vital. Keduanya itu harus diawasi oleh pemerintah dan diatur supaya dapat dipergunakan sesuai dengan kepentingan seluruh rakyat (hak milik itu adalah suatu fungsi sosial).

C. PNI Jawa Tengah Menjelang Pemilihan Umum 1955

Perkembangan PNI di Jawa Tengah sebagai partai yang bersiap mengikuti pemilu dimulai pada tahun 1953. Pada tanggal 8 Agustus 1953 Partai Nasional Indonesia Jawa Tengah mengadakan konferensinya di Tawangmangu Solo. Dalam konferensi tersebut diputuskan untuk mengakhiri status Jawa Tengah sebagai Komisariat untuk diubah menjadi Dewan Daerah. Sedangkan institut Dewan Daerah yang sebelum itu terdapat di tiap-tiap karesidenan diganti dengan Koordinator (DPD PNI Jawa Tengah, 1969: 5).

Tugas Dewan Daerah yang baru berdiri itupun tidak ringan. Sebab disamping menyempurnakan bentuknya organisasi di pelosok-pelosok, juga harus mengadakan persiapan-persiapan guna menghadapi Pemilu yang pertama kalinya akan diadakan di tanah air kita. Pemilu untuk DPR pada bulan September 1955 dan Pemilu untuk Konstituante pada bulan Desember 1955.

Disamping menyibukkan diri dalam persiapan-persiapan untuk menghadapi Pemilu tahun 1955, dalam tahun 1953 PNI Jawa Tengah juga menghadapi pekerjaan yang tidak kurang berat. Karena selain masih harus melanjutkan perjuangan di bidang menentang gejala-gejala adanya keinginan golongan tertentu untuk mencoba mengembalikan adanya Swapraja di Jawa Tengah, juga harus mengatasi adanya fitnah golongan tertentu pula hingga menyebabkan instruksi palsu yang terkenal No. 1235; yang isinya “menganjurkan pembunuhan dan penangkapan terhadap anggota-anggota Masyumi dan lain-lain lawan partai sebelum Pemilu”.

Instruksi palsu tersebut sungguh fitnah, sebab tidak masuk akal bagi ideologi marhaenisme yang berdasar ketuhanan, berperikemanusiaan dan berdemokrasi total, yang dijadikan dasar bagi Partai Nasional Indonesia. Maka dibahaslah, dikupaslah, ditelanjingilah instruksi fitnah itu dalam konferensi PNI Jawa Tengah di Purwokerto tanggal 24-27 Desember 1953 (DPD PNI Jawa Tengah, 1969: 8).

Dalam konferensi itu dibentuk PAPU, yakni badan yang memiliki tugas merancang strategi kemenangan PNI, dalam rangka perjuangan Pemilu yang akan datang. Selain itu ada kesepakatan menyatakan penjelasannya kepada instansi pemerintah di Jawa Tengah yang mengutip instruksi-instruksi palsu No. 1235 itu sebagai surat nota rahasia kepada bawahannya.

Bahkan tidak saja fitnah dan provokasi-provokasi hebat yang harus dihadapi oleh PNI Jawa Tengah dalam kehidupan pimpinan Dewan Daerah di tahun pertamanya, tetapi juga masih harus berjuang menghadapi efek yang

timbul dari oposisi terhadap Kabinet yang di tahun 1953 itu dipimpin tokoh PNI Mr. Ali Sastroamidjojo yang telah menerima warisan pemerintahan dengan keadaan keuangan yang sangat buruk. Efek dari pihak oposisi di pusat ketika itu sangat terasa dan memang berpengaruh di daerah-daerah. Oposisi yang ketika itu bertujuan untuk menumbangkan Kabinet Ali Sastroamidjojo, juga bertujuan politik luar negerinya yang demi setapak memperoleh sukses besar sambil menghimpun kekuatan Asia-Afrika.

Pada tahun 1954, perkembangan PNI makin pesat sebagai sebuah partai. (DPD PNI Jawa Tengah, 1969: 11) dalam pada itu mengenai kegiatan-kegiatan perjuangan partai di tahun 1954 selain melanjutkan sesuai dengan *overall planning* yang sudah digariskan diberbagai bidang, yang terutama dimulailah penggarapan secara intensif di bidang organisasi buruh. Demikianlah maka dilangsungkan konferensi di kota Magelang dari tanggal 16-19 April 1954. Diambilnya ketika itu keputusan-keputusan:

1. Menginsyafi betapa pentingnya sektor buruh dalam perjuangan mencapai cita-cita marhaenisme
2. Dibentuknya Kesatuan Buruh Kerakyatan Indonesia (KBKI) Jawa Tengah yang akan memberi pimpinan kepada cabang-cabang KBKI yang segera akan dibentuk
3. Masalah Pemilu:
 - a. Memperhatikan dan mengikuti soal pendaftaran pemilih.
 - b. Segenap anggota PNI di desa-desa supaya menyediakan diri secara aktif untuk menjadi anggota-anggota tambahan daripada PPP setempat.

- c. Tindakan-tindakan lain yang erat hubungannya dengan pendaftaran pemilih.

Dalam tahun 1954 ini PNI Jawa Tengah masih harus pula menghadapi makin giatnya anasir-anasir tertentu yang ingin kembalinya "Swapraja" dalam bentuk modern, setelah kegiatan-kegiatan mereka dibabak-babak pertama dapat dilumpuhkan dengan pengorbanan-pengorbanan terutama yang diberikan oleh Barisan Benteng di Surakarta sebagai akibat diculiknya tokoh-tokoh PNI Mr. Iskaq Tjokrohadisoerjo dan Soediro yang disertai oleh pemerintah untuk bertugas sebagai residen dan wakil residen Surakarta, penculikan mana ketika itu dilakukan oleh golongan Front Demokrasi Rakyat. Di Surakarta setelah itu dibentuk sebuah Panitia Anti Swapraja, diketuai oleh tokoh PNI almarhum Soediman. Panitia ini tersusun dari partai-partai yang tidak mengkehendaki kembalinya status Swapraja (DPD PNI Jawa Tengah, 1969: 13).

Memasuki tahun 1955, PNI Jawa Tengah mengadakan Konferensi di kota Pati pada tanggal 8-11 April 1955 yang berhasil memutuskan pelaksanaan penyempurnaan organisasi ke dalam untuk menghadapi Pemilu dan peninjauan mendalam sektor wanita, pemuda, tani dan buruh dalam hubungannya dengan partai untuk menghadapi Pemilu. (Dalam hubungan ini di dalam Konferensi itu juga lahirlah Ikatan Guru Nasional atau IGN).

Dalam susunan pengurus Dewan Daerah yang demikian dan PAPU-nya yang diperkuat itu, maka perjuangan PNI Jawa Tengah dalam rangka

kampanye Pemilu bertambah menghebat dan merata di seluruh daerah. Justru karena ketika itu diinsyafi oleh seluruh warga Front Marhaenis betapa menghebatnya perjuangan golongan oposisi yang dipimpin oleh golongan Masyumi dan PSI dengan segala daya upayanya untuk menjatuhkan Kabinet yang dipimpin PNI. Sebab dengan jatuhnya Kabinet Ali diharapkan oleh mereka terutama kemenangan Pemilu. Maka segala siasat dan cara pun digunakan untuk menghantam PNI. Kiranya bagi tiap warga Front Marhaenis masih cukup ingat ini semuanya dikala itu. Maka jatuhlah akhirnya Kabinet Ali dan dipimpin pemerintahan, justru dalam saat yang sangat penting artinya bagi kehidupan bangsa Indonesia, jatuh ditangan Masyumi dan kawan-kawan sekutunya (DPD PNI Jawa Tengah, 1969: 23).

Namun demikian, sebagai partai yang berpendirian kokoh, tegak dan memperoleh kepercayaan tetap penuh dari para warganya, lagi simpatisan-simpatisan ternyata pun semakin bertambah jumlahnya, kekalahan Kabinet Ali itu tidak mempengaruhi jarumnya kompas Pemilu.

Patut diberikan salut setinggi-tingginya, betapa para kader dan aktivis-aktivis PNI dan Front Marhaenis umumnya, di seluruh pelosok daerah Jawa Tengah ketika itu menunaikan tugasnya, patut pula tidak dilupakan untuk menyatakan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada para simpatisan terhadap partai kita, yang dalam babak-babak menentukan telah membawa hasil gemilang bagi PNI Jawa Tengah dalam Pemilu untuk DPR dikala itu.

Namun demikian, Kabinet Burhanuddin Harahap rupanya pantang mundur dan belum merasa putus asa terhadap kenyataan yang menyolok ini

Jawa Tengah yang merupakan *bolwerk* daripada kubu pertahanan marhaenisme diincar terus-menerus. Pemecatan-pemecatan dan pergeseran-pergeseran dilakukan diberbagai Jawatan dan Instansi di Jawa Tengah, dimana tokoh-tokoh PNI pegang kedudukan penting, tidak beda halnya yang ketika itu dilakukan untuk daerah-daerah di luar Jawa Tengah (DPD PNI Jawa Tengah, 1969: 29).



BAB V

RIVALITAS PNI DAN PARTAI LAIN DALAM KAMPANYE

PEMILIHAN UMUM 1955 DI JAWA TENGAH

Menjelang Pemilu pada bulan September 1955 untuk pemilihan anggota DPR dan Desember 1955 untuk pemilihan anggota Konstituante partai-partai melakukan kampanye dengan berbagai macam model. Berbagai program ditawarkan agar mendapatkan suara terbesar dan memenangkan pemilu. Tiap-tiap partai mewacanakan berbagai pesan pada para calon pemilih. Bahkan tidak heran berbagai pergesekan wacana pada saat kampanyepun terjadi di antara partai-partai peserta pemilu, terutama partai-partai yang masuk dalam empat besar, yakni PNI, Masyumi, NU, dan PKI. Berikut adalah gambaran kampanye dan berbagai pergesekan yang terjadi antarpartai besar menjelang pemilu 1955.

A. Wacana Kampanye PNI

Partai Nasional Indonesia (PNI) sebelum pelaksanaan pemilu dianggap merupakan partai terbesar kedua. Selama revolusi partai ini berkembang luas berlandaskan dukungan terutama dari elit administratif dan dari *abangan* kaum tani pada Jawa dan mengandung satu jangkauan luas dengan sudut pandang ideologis. PNI memiliki pandangan utama yakni Marhaen atau “nasionalisme proletar” (Crib dan Kahin, 2004: 324:325). Basis utamanya ialah di dalam birokrasi dan kalangan pegawai kantor. Di daerah pedesaan Jawa, partai ini memiliki daya tarik yang sangat besar bagi masyarakat muslim *abangan*, sebagian

karena partai ini dianggap sebagai partai Sukarno (yang secara resmi tidak demikian karena presiden tidak menjadi anggota atau pimpinan partai manapun) dan sebagian karena partai ini dianggap merupakan imbalan utama terhadap keinginan-keinginan politik Islam. Demikian pula, PNI mendapat banyak dukungan di daerah-daerah kristen di luar Jawa dan di Bali yang menganut agama Hindu, di mana juga terdapat perasaan-perasaan anti-Islam (Ricklefs, 2004: 477).

Program dari PNI merupakan campuran dari rekomendasi-rekomendasi untuk membantu buruh, menolong petani, mendorong pembangunan ekonomi, menasionalisasi industri-industri penting, mengorganisasi para pemuda dan berusaha menekankan pengaruhnya di segala lini (Khotimah, 2003: 44).

Wacana utama yang dimunculkan oleh PNI pada dasarnya adalah marhaenisme. Ideologi ini lahir pada tanggal 4 Juli 1927 (Suluh Indonesia, 4 Juli 1955). Marhaenisme merupakan ideologi yang tumbuh subur di atas persada Indonesia. Pada dasarnya marhaenisme menekankan pada aspek kemandirian dalam berbagai aspek yang diawali dalam hal pangan. Marhaenisme menjadi *platform* yang melandasi berbagai wacana yang kemudian dikembangkannya. Bahkan karena begitu kuatnya marhaen dalam PNI, di lambang PNI tertulis tulisan "FRONT MARHAENIS". Istilah ini merupakan konsep diadopsi oleh Sukarno untuk melihat bagaimana realitas sejumlah besar dari Indonesia, terutama petani mandiri, yang walaupun sangat miskin dan ditekan oleh kapitalisme kolonial, adalah pemilik yang mandiri dan tidak termasuk orang yang proletar (Crib dan Kahin, 2004: 259). Marhaenisme

pada esensinya sebuah paham perlawanan yang terbentuk dari sosio-demokrasi dan sosio-ekonomi Bung Karno. Dari landasan inilah maka konsep kemandirian ini menjadi satu faktor penentu yang dicoba kembangkan oleh Sukarno, bahkan setelah ia menjadi presiden dengan adanya konsep trisakti.

Dari *platform* tentang marhaenisme yang dikampanyekan dalam berbagai programnya, ada beberapa wacana lain yang juga dikampanyekan oleh PNI. Selain mengangkat tentang marhaenisme, PNI juga mengkampanyekan bahwa PNI memiliki kedekatan secara kultural dengan Sukarno sebagai pencetus paham marhaenisme. Dalam salah satu terbitannya bahkan mengangkat judul besar yang bertuliskan “Bung Karno udah Pasti Tusuk Tanda Gambar PNI”. Hal ini dinyatakan oleh S bahwa dalam pemilu yang akan datang Bung Karno sudah pasti memilih tanda gambar PNI (Suluh Indonesia, 15 September 1955). Wacana tentang Bung Karno sebagai kader dari PNI merupakan sebuah wacana yang sangat penting dan efektif untuk menjaring suara dari kalangan masyarakat bawah, terutama di Jawa Tengah yang sebagian masyarakatnya adalah masyarakat yang hidup di kawasan pedalaman dan cenderung lebih bersifat konformis dan agraris daripada masyarakat pesisir yang dinamis. Ini pulalah yang dimungkinkan menjadi faktor penentu kemenangan PNI yang sangat signifikan di Jawa Tengah.

Marhaenisme yang melatarbelakangi semangat PNI dalam berkampanye juga tampak dari berbagai iklan yang ditayangkan. Disebutkan bahwa “menusuk kepala banteng dalam segi tiga, berarti menuju masyarakat sama rata sama bahagia” (Suluh Indonesia, 14 September 1955). Selain itu dijelaskan

pula dalam kampanyenya bahwa PNI adalah partai yang anti terhadap kolonialisme dan imperialisme, anti penjajahan, menggalakkan negara persatuan anti terhadap kemiskinan dan menyusun program ekonomi yang tegas. Dalam iklan kampanyenya dituliskan bahwa “menusuk kepala banteng dalam segi tiga berarti memilih front marhaenis yang anti kapitalisme dan imperialisme” (Suluh Indonesia, 27 September 1955).

Dalam kampanyenya yang dilakukan di Purworejo pada 31 Juli 1955 PNI mengklaim bahwa pada rapat itu dihadiri kurang lebih 450.000 warga. Angka ini merupakan rekor di Jawa Tengah karena selama ini di Jawa Tengah belum ada rapat umum yang begitu banyak didatangi oleh rakyat. Pada acara tersebut Mr. Sartono dari DPPNI membicarakan antara lain bahwa ia tidak ingin rakyat Indonesia menjadi pengemis. Tetapi ingin melihat rakyat Indonesia bekerja dan berjuang keras untuk mendapat miliknya sendiri guna mencapai masyarakat sama rata sama rasa. Kemudian ada pula pidato yang disampaikan Abdulmadjid dalam bahasa Jawa yang menekankan tentang arti marhaenisme dengan mengatakan bahwa “marhaenisme berazaskan Pancawa (Wa-Lima), *wutuh*, *waras*, *warag*, *wasis*, dan *widodo*, yang berarti bersatu, sehat, kencang, cakap, dan dirgahayu.” (Suluh Indonesia, 3 Agustus 1955). Hadisebuno menyatakan bahwa PNI sejak berdirinya dulu sudah terus terang dan tegas anti imperialisme dan kapitalisme serta konsekuen dengan azas-azas perjuangannya itu. Selain wacana itu, PNI juga memperhatikan kalangan wanita sebagai salah satu wacana yang disampaikan dalam kampanye (Suluh Indonesia, 14 dan 15 September 1955).

B. Wacana Kampanye PKI

Partai komunis Indonesia (PKI) yang dihancurkan namun tidak dilarang pada tahun 1948, hampir siap muncul kembali secara paling menakjubkan dalam sejarahnya yang berganti-ganti. Pada awal perkembangannya setelah peristiwa Madiun PKI masih merupakan partai yang kecil akan tetapi sangat disiplin dan efektif. Aktivitasnya melingkupi kalangan proletariat di kota-kota maupun di kalangan buruh-buruh baik di kota maupun yang bekerja di bidang pertanian. Kalangan petani inilah yang banyak mendapat perhatian dari PKI (Feith, Herbert, 1971: 9).

Aidit sebagai pimpinan partai menyatakan bahwa Marxisme merupakan pedoman untuk bertindak, bukannya dogma yang kaku. Kepemimpinannya membawa suatu pragmatisme baru bagi PKI yang memungkinkan partai ini segera menjadi salah satu partai politik terbesar. Pada mulanya basis PKI terutama adalah kaum buruh perkotaan dan buruh perusahaan pertanian yang diorganisasikan melalui federasi serikat SOBSI yang sepenuhnya dikendalikan oleh PKI. Kemudian partai ini melebarkan sayap ke sektor-sektor kemasyarakatan lainnya, termasuk kaum tani, yang menjadikannya kehilangan banyak sifat proletariatnya (Ricklefs, 2004: 477).

Dari gambaran tersebut, ideologi marxisme (Adian, 2005: 103) menjadi landasan PKI, sehingga *platform* yang diangkat adalah tentang masalah rakyat. Di banyak kampanye yang dilakukan kata “rakyat” menjadi satu faktor yang melingkupi wacana kampanyenya dan janji serta program yang ditawarkan.

Hal ini jelas tampak dari nama surat kabar yang digunakan sebagai alat gerak partai, seperti *Harian Rakjat* dan *Fikiran Rakjat*.

Marxisme merupakan dasar teori komunisme modern. Teori ini tertuang dalam buku *Manifesto Komunis* yang dibuat oleh Marx dan sahabatnya, Friedrich Engels. Marxisme merupakan bentuk protes Marx terhadap paham kapitalisme. Ia menganggap bahwa kaum kapital mengumpulkan uang dengan mengorbankan kaum proletar. Kondisi kaum proletar sangat menyedihkan karena dipaksa bekerja berjam-jam dengan upah minimum sementara hasil keringat mereka dinikmati oleh kaum kapitalis. Banyak kaum proletar yang harus hidup di daerah pinggiran dan kumuh. Marx berpendapat bahwa masalah ini timbul karena adanya "kepemilikan pribadi" dan penguasaan kekayaan yang didominasi orang-orang kaya. Untuk mensejahterakan kaum proletar, Marx berpendapat bahwa paham kapitalisme diganti dengan paham komunisme. Bila kondisi ini terus dibiarkan, menurut Marx kaum proletar akan memberontak dan menuntut keadilan. Itulah dasar dari marxisme (<http://id.wikipedia.org/wiki/marxisme>).

Perkembangan PKI selama kabinet Ali, ketika partai ini bebas dari penindasan, sangat menakjubkan. Antara bulan maret dan November 1954 diklaim bahwa jumlah anggota partai ini meningkat tiga kali lipat dari 165.206 menjadi 500.000, dan pada akhir tahun 1955 mencapai 1.000.000. PKI kini mulai melakukan usaha serius untuk menerima para petani sebagai anggota. Barisan Tani Indonesia (BTI), suatu organisasi PKI, menyatakan mempunyai 360.000 anggota pada bulan September 1953, tetapi jumlah tersebut mencapai

lebih dari sembilan kali lipat (3,3 juta) pada akhir 1955, hampir 90% anggota berada di Jawa dan hampir 70% di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Jumlah anggota Pemuda Rakyat, pengganti Pesindo dari masa revolusi, meningkat tiga kali lipat dari 202.605 pada bulan Juli 1954 menjadi 616.605 orang pada akhir tahun 1955, 80% anggotanya adalah para pemuda tani dan sebagian besar berada di Jawa. oplah surat kabar PKI, *Harian Rakyat*, meningkat lebih dari tiga kali lipat antara bulan Februari 1954 (15.000 eksemplar) dan Januari 1956 (55.000 eksemplar), kini oplahnya adalah yang terbesar di antara surat-surat kabar manapun yang berafiliasi pada partai. PKI juga merupakan partai yang paling kaya di antara partai-partai politik dengan penerimaan dari iuran anggota (akan tetapi pungutan iuran sering kali kurang teratur), dari gerakan-gerakan pemungutan dana, dan sumber-sumber lainnya. Sebagian besar uangnya mungkin berasal dari komunitas dagang Cina, yang memberikannya baik dengan senang hati ataupun karena tekanan dari kedutaan besar Cina (Ricklefs, 2004: 492-495).

Akan tetapi ketika PKI meluas ke wilayah pedesaan Jawa Tengah dan Jawa Timur, identitas kelas dan kemilitanan potensialnya benar-benar tenggelam. Banyak petani yang miskin bergabung karena PKI berjanji akan membela kepentingan mereka, tetapi banyak yang bergabung karena alasan-alasan lain. Tim-tim PKI memperbaiki jembatan, sekolah, rumah, bendungan, WC dan kamar mandi umum, saluran air, dan jalan. Mereka membasmi hama dan mengadakan kursus-kursus pemberantasan buta huruf, mengorganisasi kelompok-kelompok olah raga dan musik desa, dan memberikan bantuan

kepada anggota pada saat-saat sulit. Sebagai suatu organisasi masyarakat, PKI mengungguli semua organisasi lainnya, dan karena partai ini tampak tidak menganut kekerasan dan lunak, para penduduk pedesaan berduyun-duyun menjadi anggotanya. Di desa-desa, partai ini sering kali dipimpin oleh guru-guru, kepala desa, para petani menengah dan kaya, dan beberapa tuan tanah, yang membawa bersama-sama mereka seluruh komunitas atau kelompok pengikut mereka ke dalam organisasi ini. Komunitas-komunitas tersebut hampir seluruhnya muslim nominal (abangan) (Ricklefs, 2004: 495).

Menjelang pemilu, PKI semakin aktif dalam melakukan kampanyenya. Bagi PKI pemilu merupakan sebuah konkretisasi dari gerakan rakyat atau revolusi nasional pada waktu itu. Pemilu adalah gerakan politik, gerakan rakyat yang luas untuk memperjuangkan nasibnya sendiri (Harian Rakjat, 15 Januari 1955).

Dalam mengkampanyekan para calon anggota yang akan duduk di parlemen PKI menyatakan bahwa calon-calon yang diajukan telah memiliki kualifikasi yang terdiri atas orang-orang baik anggota PKI maupun orang tak berpartai yang mewakili berbagai lapisan dan golongan rakyat Indonesia, sehingga apabila calon tersebut terpilih, kepentingan dari berbagai golongan rakyat akan dapat dibela dan diperjuangkan dalam DPR. Daftar calon PKI juga merupakan komposisi front nasional (Fikiran Rakjat, 27 September 1955).

PKI juga mengeluarkan janji-janji yang ditujukan bagi berbagai kalangan dengan mencoblos palu arit, berarti “bagi kaum intelegensia berarti kebebasan dan kesempatan memajukan ilmu guna kebahagiaan manusia, bagi pelajar dan

mahasiswa berarti pendemokratisasian pendidikan dan perluasan kerja, bagi kaum buruh berarti perbaikan upah (Khotimah, 2003: 56). Ini berarti PKI menawarkan berbagai janji tentang perbaikan agar rakyat tertarik dan memilihnya dalam pemilu nanti.

Wacana yang dikeluarkan oleh PKI juga dengan menunjukkan kebesaran partai dengan menonjolkan sejarahnya. Pada Harian Rakjat tanggal 23 Mei terdapat pidato Aidit tentang sejarah PKI yang menonjolkan perannya dalam memperjuangkan kaum buruh (Harian Rakjat, 23 Mei 1955).

Program yang ditawarkan oleh PKI juga sangat beragam. Dalam sebuah terbitan pada 27 Juli 1955 dinyatakan bahwa PKI memiliki program sebagai berikut (1) menjamin kebebasan demokrasi bagi rakyat dan mempertahankan dengan konsekuen sistem demokrasi parlementer dan meneruskan serta memperhebat pembasmian gerombolan-gerombolan DI/TII dan gerombolan teroris lain; (2) melaksanakan pemilu untuk parlemen pada waktu yang sudah ditetapkan oleh Panitia Pemilu, menyelesaikan UU Pemerintah daerah dan mengadakan pemerintahan DPRD; (3) menormalkan hubungan dengan angkatan darat, memperbaiki nasib prajurit, polisi, pegawai negeri lainnya.

Menyingkirkan pengkhianat bangsa, yaitu para koruptor, elemen-elemen fasis yang menentang UUD dan menentang asas-asas demokrasi RI; (4) menjalankan politik perdamaian yang konsekuen dengan mengadakan hubungan ekonomi, kebudayaan yang normal dengan semua negara berdasarkan keputusan Konferensi Asia Afrika. Menyetujui ratifikasi RUU dwikewarganegaraan dan UU pembubaran uni Indonesia Belanda, serta

meneruskan perjuangan mengenai Irian Barat; (5) Tidak mengembalikan tambang minyak di Sumatera Utara kepada BPM. Membeli semua tanah partikelir dengan harga semurah-murahnya menurunkan harga yang ditentukan pemerintah dan membagikan tanah partikelir itu untuk pertanian kepada kaum tani miskin, kaum tani yang tidak bermodal.

Sekretariat Comisariat Jenderal Central (CC) PKI mencoba menarik simpati massa dengan mengeluarkan *statement* tentang penurunan harga "... mengingat bahwa kenaikan harga tidak memandang perbedaan agama, partai politik, suku bangsa, dan sebagainya, PKI menyerukan pada seluruh rakyat Indonesia untuk mempersatukan diri dan bersama-sama menuntut pemerintah supaya bahan bakar, makanan, dan kebutuhan sehari-hari lainnya diturunkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya" (Harian Rakjat, 10 September 1955).

Untuk menarik simpati di berbagai lapisan masyarakat, seperti pemuda, ibu-ibu, seni dan sebagainya dengan menerbitkan tulisan-tulisan khusus "... menangkan PKI untuk hak-hak dan tingkat hidup pemuda yang lebih baik, pemuda harus memberikan suaranya dalam pemilihan ini kepada wakil-wakil yang akan sanggup memperjuangkan tuntutan mereka, kebebasan berpolitik, berorganisasi, dan beragama bagi pemuda, perbaikan upah, kenaikan gaji, perluasan lapangan kerja, berolah raga, kesenian, pembasmian DI/TII dan berbagai unsur yang melakukan sabotase, korup, dan kolonial di kalangan aparat negara" (Harian Rakjat, 10 September 1955).

C. Wacana Kampanye NU

Dalam rapat NU pada tanggal 5 April 1952 di Surabaya diputuskan untuk mengeluarkan NU dari Masyumi. Keputusan PB NU ini kemudian diperkuat Mukktamar NU ke 19 di Palembang pada 28 April – 1 Mei 1952. Keputusan itu diambil melalui voting dengan 61 suara setuju, 9 menolak dan 7 absen. Berdasarkan hasil voting itu, akhirnya Mukktamar NU ke 19 di Palembang memutuskan NU keluar dari Masyumi. Keputusan Mukktamar NU kemudian dikomunikasikan ke Pimpinan Partai Masyumi. Pertemuan yang diadakan antara Pimpinan Partai Masyumi dengan PB NU menghasilkan kesepakatan untuk mencabut keanggotan NU dari Masyumi (Maridjan, 1992: 62-63).

Tahun 1955 merupakan pemilu pertama yang diselenggarakan. Jika partai lain khususnya partai-partai besar mempunyai waktu yang cukup lama berdiri sebagai partai politik, karena itu lebih cukup waktu dan kesempatan mengapresiasi politik dan pengaruh kepada rakyat, maka NU hanya mempunyai waktu sekitar tiga tahun saja (http://pcinu-mesir.tripod.com/ilmiah/pusaka/ispustaka/buku02/004_4.txt). Dalam waktu tiga tahun inilah, NU mulai mengintensifkan kampanye untuk meraih suara rakyat. NU merupakan partai dengan basis Islam tradisional dengan massa yang berasal dari kalangan santri pedesaan. Inilah yang menjadi *platform* dalam wacana-wacana NU pada saat kampanye, yakni ideologi NU tentang Islam yang menganut paham *ahlussunah wal jamaah*. NU sebagai organisasi Islam tradisional tapi moderat memiliki pandangan tentang Islam

keindonesiaan. Inilah wacana-wacana yang dikembangkan dan menjadi landasan dalam wacana-wacana lainnya. Ini terutama sangat tampak dari jargon yang dimiliki oleh *Duta Masyarakat* sebagai surat kabar *underbouw* NU yang menyebutkan "pendukung cita-cita kerja sama Islam-nasional" (*Duta Masyarakat*, 19 September 1955).

Pendekatan agama menjadi satu sarana yang dilakukan oleh NU untuk menjaring suara pada pemilu 1955. Pesantren-pesantren menjadi tempat yang efektif untuk menyebarluaskan pengaruh partai. Hal ini tampak dengan pemanfaatan pesantren sebagai basis masa bagi NU, seperti ketika dilakukan konferensi alim ulama seluruh Jawa Tengah yang dilaksanakan di pondok Watucongol, Muntilan yang dihadiri lebih kurang 150 alim ulama, 100 peninjau dan kurang lebih 10.000 orang (*Duta Masyarakat*, 24 September 1955). Oleh karena pemanfaatan pesantren sebagai basis pergerakan partai, maka peran serta Kiai sangat penting dalam NU. NU menggunakan Kiai sebagai penggerak massa. Kiai besar yang sering menjadi corong suara NU antara lain K.H. Asnawi dari Kudus, K.H. Bisri Mustofa dari Rembang, K.H.A. Chaliq, H. Idam Chalid, K.H.M. Dachlan, H. Saefudin Zuhri, dan sebagainya.

Sebagai organisasi yang semula bergerak di bidang sosial keagamaan NU mempunyai tradisi 'kampanye' dalam bentuk pengajian keagamaan yang menciptakan hubungan kiai sebagai tokoh panutan dengan rakyat dan kalangan santri. Kegiatan pengajian itu sudah menjadi pekerjaan rutin yang secara berkala diselenggarakan, maka ketika masa kampanye diselenggarakan, tidak terlalu sulit bagi NU mengkoordinasikan kegiatan pengajian itu berubah

menjadi kegiatan kampanye yang efektif. Dengan demikian meskipun kesempatan NU menata diri sebagai partai politik memasuki medan kampanye pemilu 1955 amat singkat, tetapi kampanye yang diselenggarakan cukup efektif dan memiliki makna yang lebih karena diberi bobot sebagai kegiatan pengajian keagamaan. Faktor ini penting sekali sebab kehadiran warga masyarakat ke medan kampanye tidak saja dalam arti solidaritas kelompok, melainkan berdimensi keagamaan, mungkin mereka merasa memperoleh rahmat atau pahala menghadiri sebuah pengajian keagamaan (http://pcinu-mesir.tripod.com/ilmiah/pusaka/ispustaka/buku02/004_4.txt).

Aspek kedua yang penting lagi ialah tema-tema kampanye yang dibawakan NU. Bertolak dari tradisi keagamaan yang dianut NU kegiatan pengajian yang dilakukan oleh para kiai umumnya menyajikan pandangan keagamaan yang cukup lentur dengan orientasi kepada pembinaan iman dan akhlak. Aspek-aspek sufisme untuk mengajak kepada kebaikan dan kesyahduan iman kentara sekali menjadi pola acuan pendekatan keagamaan dalam kampanye. Hal ini menjadikan kampanye yang dilakukan NU tanpa ketegangan dan provokasi yang menyerang fihak lain. Seperti warna pengajian NU, maka kampanye yang diselenggarakan seringkali dilakukan dengan gaya 'ketoprak' yang memukau pengunjung. Kampanye NU seringkali disertai banyolan dan sindiran yang kocak layaknya sebuah grup ketoprak. Selain itu juga disertai pula irama lagu-lagu yang digubah dari bahasa Jawa yang menambah semarak suasana. Banyak buku yang diterbitkan berisi syair-syair Arab maupun Jawa (huruf pegon) beredar ketika kampanye berlangsung. Isi

syair itu bermacam-macam mulai dari soal bimbingan keagamaan dan iman, akhlak juga tuntunan praktis pemilu dan pemungutan suara serta petunjuk mencoblos tanda gambar NU dalam pemilu (http://pcinu-mesir.tripod.com/ilmiah/pusaka/ispustaka/buku02/004_4.txt).

Selain itu dalam kampanye-kampanyenya ada beberapa wacana yang dikemukakan oleh NU. Dalam sebuah konferensi Muslimat dan Fatayat NU Jawa Tengah, Sekjen PB NU, H. Saifoeddin Zochri menyatakan bahwa harus ada tiga kekuatan yang dimiliki, yakni kekuatan politik, kekuatan material, dan kekuatan organisasi (Duta Masyarakat, 16 Juni 1955). Selain itu, untuk menarik massa di kalangan wanita, wacana tentang wanita juga diangkat dalam kampanye (Duta Masyarakat, 24 September 1955).

Dalam pandangannya tentang negara, NU mewacanakan tentang cita-cita NU dalam mewujudkan negara demokrasi, di mana berlaku undang-undang Islam, yaitu negara nasional dengan dasar agama Islam (Duta Masyarakat, 8 Agustus 1955). Hal ini merupakan penegasan setelah sebelumnya di Pekalongan pada bulan Juli 1955 dengan dihadiri 120.000 massa. Pada saat itu Rois 'Aam PBNU menghendaki agar Indonesia menjadi satu negara nasional yang berlaku di dalamnya hukum-hukum Islam. Hukum-hukum Islam itu bisa berlaku dengan syarat syariat harus ditegakkan dan untuk menegakkan syariat tidak lain harus melalui salah satu dari 4 mazhab. Adapun artian dari negara nasional yakni negara Indonesia yang merdeka bebas dari campur tangan dan anasir asing. Selanjutnya ditegaskan bahwa jika NU menang berarti setiap

kiai/ulama akan menduduki fungsi-fungsi eksekutif dan administratif, misalnya menjadi kepala jawatan (Duta Masyarakat, 13 Juli 1955).

Dengan *platform* islam yang keindonesiaan, partai NU didirikan untuk memperjuangkan pelaksanaan masyarakat Islam dan untuk melindungi masyarakat Islam dan masyarakat lain pada umumnya. Cita-cita partai NU melaksanakan masyarakat Islam bukan merupakan barang impor, melainkan warisan seperti yang diperjuangkan oleh Nabi Muhammad SAW. Berkaitan dengan agama dan politik, Wahib Wahab menyatakan bahwa politik seyogyanya dilancarkan dengan bersumber agama. Kalau tidak bersumber agama yang bersih, maka politik itu tidak bersih. Agama jangan dipolitiki, tetapi politik diagamai (Duta Masyarakat, 22 Agustus 1955).

Sebagai partai yang berlandaskan agama, maka kampanye yang dilakukan tidak "segarang" kampanye yang dilakukan oleh partai sekuler. Dalam salah satu kampanyenya K.H. Chalik menekankan pentingnya kemandirian dengan mengedepankan adanya kerukunan, termasuk dengan masyarakat bukan Islam. Selanjutnya dijelaskan bahwa partai NU dari dahulu sampai sekarang dan seterusnya senantiasa menghendaki rukun dalam hubungan dengan partai-partai lain. Selanjutnya oleh K.A Thohir dari Blitar dijelaskan bahwa politik jujur bagi NU adalah untuk mencapai cita-cita suci agama, oleh karena itu NU senantiasa menjalankan dan menghendaki politik yang jujur yang bersumber dari ajaran agama Islam (Duta Masyarakat, 2 September 1955).

D. Wacana Kampanye Masyumi

Masyumi merupakan partai dengan perolehan suara terkecil di antara empat partai besar pemenang pemilu di Jawa Tengah. Masyumi mewakili kepentingan-kepentingan Islam dan dianggap merupakan partai yang terbesar di Negara ini, walaupun sampai terselenggarakannya pemilu hal ini hanya dapat menjadi anggapan belaka. Partai ini tidak terorganisasi secara teratur, dan mengalami perpecahan utama di dalamnya antara para pemimpin Islam ortodoks dan modernis (Ricklefs, 2004: 477).

Identitas keislamannya sangat menonjol dalam Masyumi, baik dalam mengambil keputusan dan pola pikirnya yang bersumber dari ajaran Islam maupun dengan seringnya menggunakan kata-kata Islam dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga Masyumi serta resolusi-resolusi yang dikeluarkan Masyumi. Resolusi pada masa perang kemerdekaan misalnya, Partai Masyumi menyerukan kepada seluruh umat Islam untuk melakukan *jihad fi sabilillah* dalam menghadapi segala bentuk penjajahan, terutama menghadapi sekutu yang masuk ke Indonesia setelah kemerdekaan Indonesia. Disamping itu, dalam AD Masyumi disebutkan bahwa tujuan Partai Masyumi adalah untuk menegakkan kedaulatan negara dan agama Islam. Selain itu, Partai Masyumi juga mempunyai tujuan untuk melaksanakan cita-cita Islam dalam urusan kenegaraan. Tujuan partai Masyumi adalah terlaksananya ajaran dan hukum Islam dalam kehidupan orang seorang, masyarakat dan Negara Republik Indonesia, menuju keridhoan Ilahi. Selain menyatakan asas Partai Masyumi adalah Islam, pada tahun 1952 juga

dikeluarkan tafsir asas Masyumi. Tafsir asas Masyumi ini merupakan rumusan resmi ideologi partai Masyumi yang dijadikan sebagai pedoman dan pegangan bagi anggota Masyumi (Cahin, 1995: 125).

Platform yang digunakan oleh Masyumi dalam menyampaikan wacana-wacana kampanyenya adalah Islam. Islam yang dimaksud disini adalah Islam yang bersifat modernis. Hal ini karena basis massa dari Masyumi adalah kalangan santri perkotaan. Namun demikian, isu ini justru digunakan lawan-lawan politik dari Masyumi untuk menjatuhkan Masyumi bahwa Masyumi merupakan partai yang menghendaki perubahan menjadi negara Islam. Oleh karena itu dalam tiap melontarkan wacana dalam kampanye Masyumi juga selalu mengaitkan bahwa perjuangan Masyumi juga untuk tegaknya proklamasi.

Di dalam berbagai slogan kampanyenya, Masyumi selalu menekankan tentang keterpaduan antara program yang dimiliki oleh Masyumi dengan negara Indonesia dan proklamasi 17 Agustus 1945. Pada setiap halaman satu surat kabar Suara Ummat yang dimiliki oleh Masyumi, menjelang pelaksanaan pemilu tertulis “ingin tegaknya negara republik Indonesia, proklamasi 17 Agustus 1945, cobloslah tanda gambar ini” (Suara Ummat, 7 Juli 1955). Selain itu pada ada pula wacana yang mengaitkan bahwa dengan memilih Masyumi telah menyadari bahwa masyumi telah nyata sanggup berjuang dan berkorban untuk kejayaan negara Republik Indonesia di bawah sang merah putih, mendengungkan lagu Indonesia Raya, membela Pancasila (Suara Ummat, 8 Oktober 1955).

Selain itu pada iklan kampanye yang lain, disebutkan bahwa dengan memiliki lambang bulan bintang, rakyat Indonesia menegakkan dan mempertahankan republik Indonesia dari musuh yang menyerang dari luar dan musuh yang merobohkan dari dalam. Dijamin bagi Negara Indonesia agar tetap merdeka (tidak menjadi satelit negara asing), tetap berketuhanan yang maha esa (agar pancasila dapat terbukti dalam kehidupan rakyat), tetap berkedaulatan rakyat (agar tidak dikuasai oleh diktator. Kemudian Masyumi menegaskan bahwa partainya memperjuangkan kebenaran dari Tuhan (Suara Ummat, 16 November 1955).

Pada iklan yang lain tertulis bahwa masyarakat diajak untuk jangan bimbang dalam memilih partai masyumi karena partai ini merupakan pilihan yang tepat, sehingga mampu mewujudkan Indonesia yang berdasar ketuhanan yang maha esa, kedaulatan rakyat, kebangsaan, peri kemanusiaan, dan keadilan sosial. Partai masyumi ini merupakan partai yang memperjuangkan kebenaran dari Tuhan (Suara Ummat, 17 November 1955).

Dalam kampanye yang dilakukan, Masyumi juga menjelaskan tentang perjuangan Masyumi sejak Syahrir menjabat sebagai Perdana Menteri. Sebagai usaha mengadakan persatuan nasional, dalam kampanyenya, ditunjukkan adanya kenyataan munculnya Mosi Moh. Natsir untuk menyatukan golongan non dan *co*, selain itu ada pula mosi Jusuf Wibisono tentang tuntutan pembagian tanah-tanah partikulier milik asing. Kemudian sebagai partai yang pada saat menjelang pemilu menjadi partai dominan dalam kabinet, Masyumi juga melakukan upaya pembelaan terhadap kebijakan

pemerintah. Pada saat itu katanya kabinet telah menurunkan harga barang kebutuhan hidup (Suara Merdeka, 24 September 1955).

Oleh karena Islam adalah sebagai *platform* dalam tiap wacana yang dikemukakan, maka menjelang pamilihan umum Masyumi Jawa Tengah mengeluarkan fatwa yang ditujukan kepada seluruh umat Islam, khususnya keluarga masyumi untuk melakukan amalan menuju taqarrub ilallah. Seperti anjuran untuk solat malam, membaca doa-doa tertentu, memperbanyak membaca Quran, berpuasa sunah, tertama pada Senin tanggal 26 September 1955 dan diikuti dengan gerakan *sodaqoh*, meperkuat *ukhuwah Islamiyyah* dengan jalan menjalin silaturaim dan tolong menolong, waspada terhadap golongan yang tidak mengenal tuhan, menjalin persatuan, dan membulatkan tekad (Suara Merdeka, 24 September 1955).

E. Perang Wacana Kampanye Pemilu 1955

Kehidupan partai politik menjelang diselenggarakannya pemilu banyak diwarnai oleh pertentangan politik, terutama oleh partai-partai besar. Partai politik berupaya mencari dukungan massa dengan menyelenggarakan kampanye. Metode dan teknik kampanye yang digunakan oleh partai-partai politik peserta pemilu sangat beragam. Pertemuan-pertemuan diselenggarakan di semua tingkat, di alun-alun kota atau balai desa dengan para pembicara dari Jakarta atau tokoh partai setempat. Pemutaran film, perayaan hari besar agama, perayaan ulang tahun atau pawai, tanda-tanda gambar partai di berbagai tempat, dan lain-lain. Bagi sebagian besar partai semua ini

merupakan upaya untuk menambah jumlah anggota tapi bagi sebagian lagi kegiatan ini merupakan kegiatan sambil lalu dengan menyebarkan surat kabar serta pamphlet partai (Feith, 1971: 31). Kampanye pemilu dengan cara menyelenggarakan rapat-rapat raksasa antara ketika partai itu berjalan seru, mereka saling menwela, kadang-kadang dengan nada sangat tajam. Mereka tak peduli apakah hal-hal tersebut ditujukan kepada seseorang yang sedang menjabat menteri, anggota parlemen, atau orang biasa (Moedjanto, 1988: 91).

Pada bulan april 1953, undang-undang tentang pemilu akhirnya disahkan. Untuk pertama kalinya, para politisi Jakarta kini mulai berkerja membangun dukungan massa yang akan memberikan suara. Dalam usaha mencari dukungan rakyat itu, mereka menggunakan banyak daya tarik ideologis yang meningkatkan ketegangan masyarakat-masyarakat di desa-desa. Pada akhirnya partai islam di tingkat bawah menghendaki sebuah negara yang didasarkan pada hukum islam. Partai-partai sekuler terutama PNI dan PKI berusaha mengait-kaitkan Masyumi dengan Darul Islam dan mengubah Pancasila lebih sebagai slogan anti-Islam daripada falsafah pengayoman seperti yang dikehendaki Sukarno. Selama lebih dari dua tahun, kekacauan politik dan kekerasan meningkat, dan diharapkan oleh banyak orang bahwa pemulihan-pemulihan tersebut akan menghasilkan suatu struktur politik yang kokoh untuk masa mendatang (Ricklefs, 2004: 488).

PNI, Masyumi, NU, dan PKI itu rival dan bersaing ketat, sehingga tidak jarang terjadi brebagai gesekan antara keempat partai tersebut. PNI terang-terangan menolak Darul Islam. Begitu pula antara Masyumi dan NU dengan

nasionalis atau komunis. Semuanya diungkapkan secara gamblang, termasuk dalam rapat akbar untuk menggaet pemilih (Tempo 13/XXVIII, 31 Mei 1999).

Petarungan wacana yang tajam terjadi terutama antara PNI-Masyumi, PKI-Masyumi, PNI-PKI. Sementara itu antara partai-partai Islam pertarungan wacana tidak terlalu tajam karena di antara partai-partai Islam dilakukan kesepakatan untuk menjaga ukhuwah islamiyyah. Pada tanggal 15 Juni pimpinan PSII, NU, Masyumi, dan Perti menginstruksikan kepada keluarga partai masing-masing untuk menjaga dengan sungguh-sungguh agar perbedaan paham di lapangan politik jangan sampai merusak *ukhuwah Islamiyyah* yang dituangkan dalam satu pernyataan untuk tidak saling menyerang dalam menghadapi pemilu tahun 1955 (Suara Merdeka, 16 Juni 1955).

Namun demikian walaupun terdapat pernyataan tidak saling serang bukan berarti menghilangkan pertarungan wacana. Di antara partai-partai Islam pertarungan wacana tersebut terjadi, seperti ketika harian Duta Masyarakat mengeluarkan berita tentang Kiai Asnawi dari NU yang namanya dicatut menjadi bagian dari partai Masyumi (Duta Masyarakat, 2 September 1955). Walaupun telah ada kesepakatan di beberapa kawasan ternyata kesepakatan itu tidak berjalan, sehingga muncul saling serang dan bertahan. NU mengkritik bahwa ada golongan yang pro-Islam ternyata anti ulama dengan menjatuhkan nama beberapa ulama. Hal ini diungkapkan oleh Idam Chalid dalam pidatonya beberapa hari menjelang pemilihan legislatif (Duta Masyarakat, 19 September 1955).

Dari pertarungan wacana yang terjadi, tampaknya Masyumi menjadi partai yang mendapatkan berbagai serang bertubi-tubi dari rival politiknya, terutama dari PNI. PKI juga turut menjadi bagian yang melakukan kritik terhadap Masyumi. Dalam menjalankan perjuangannya, PKI dikenal sebagai sebuah partai yang selalu mengambil jalan dan cara apapun, asal tujuan tercapai. Tak terkecuali dalam menghadapi lawan-lawan politiknya menjelang pemilu PKI terus mencela sebgai besar partai-partai nasionalis, dan keagamaan sebagai partai-partai kaum imperialis. Harian Rakjat selalu menulis segala macam tindakan masyumi yang dianggap salah, seperti Masyumi tidak anti-belanda, tidak anti kolonialisme, tidak anti gerombolan subversif seperti gerakan DI/TII. PKI juga menuduh Masyumi menyalahgunakan agama, dan Masyumi berniat mengganti RI dengan bentuk negara lain yang dinamakan Darul Islam. Dalam sebuah kampanyenya, secara terang-terangan bahkan ditulis “cegah kemenangan Masyumi dalam pemilu nanti dan pilihlah partai yang membela kepentingan nasional: PKI dan partai-partai demokrasi lainnya” (Khotimah, 2003: 61). *Statement* PKI ini juga terdapat pada harian Fikiran Rakjat yang menyatakan secara terang-terangan untuk mengalahkan Masyumi dan PSI karena dianggap sebagai partai penguasa yang telah mengakibatkan krisis yang memunculkan penderitaan rakyat (Fikiran Rakjat, 28 September 1955). Menghadapi wacana tersebut, Masyumi kemudian melakukan *counter* seperti dengan menyatakan bahayanya perkembangan komunisme dengan menunjukkan data kesejarahan (Suara Ummat, 3 Oktober 1955). Masyumi juga melakukan upaya *counter*

dengan menyebutkan bahwa PKI telah melakukan upaya pemecahbelahan antara NU dan Masyumi (Suara Ummat, 3 Desember 1955).

Antara PNI dan PKI juga terdapat pertarungan yakni ketika muncul *statement* yang menyatakan bahwa PNI adalah musuh besar PKI. Pernyataan ini diungkapkan oleh Tony Wen yang menyatakan bahwa sosialisme (marhaenisme) yang dianut oleh PNI berbeda dengan sosialisme yang dianut oleh PKI, dimana sosialisme PKI mengarah pada internasionalisme yang tidak mencintai tanah air (Suara Ummat, 30 November 1955).

Perang wacana yang paling panas adalah antara PNI dan Masyumi. Pertarungan antara dua kekuatan terkuat ini makin memanas ketika terjadi perubahan dari kabinet Ali Sasatroamidjojo yang berasal dari PNI ke Burhanudin Harahap dari Masyumi, di mana tidak satupun orang PNI dimasukkan dalam kabinet. Saling serang dan bertahan dilakukan oleh kedua partai tersebut. PNI selalu melakukan upaya penyerangan terhadap kinerja kabinet Burhanudin Harahap. Selain itu dalam Suluh Indonesia disebutkan bahwa Masyumi mempropagandakan bahwa pemerintah-perintah dari pamong desa dari PNI tidak usah ditaati karena orang yang berkuasa adalah orang Masyumi (Suluh Indonesia, 7 September 1955). Selain itu ada pula wacana tentang pencatutan Bung Karno oleh orang-orang Masyumi (Suluh Indonesia, 5 September 1955). Hal yang paling sering diangkat dalam wacana-wacana untuk menyerang masyumi adalah wacana tentang Masyumi akan mengubah ideologi Indonesia menjadi negara Islam. Hal ini tampak pada beberapa terbitan dari Suluh Indonesia (Suluh Indonesia, 20 dan 26 September 1955).

BAB VI

STRATEGI PNI DALAM PEMENANGAN PEMILU 1955

DI JAWA TENGAH

A. Hasil Pemilihan Umum 1955 di Jawa Tengah

Pemilu di Jawa Tengah menjadi salah satu tahapan penting untuk melihat bagaimana peta kekuatan parta-partai politik secara nyata pada saat itu. Hal ini karena Jawa Tengah menjadi penyumbang secara nasional suara partai-partai yang beradu dalam pemilu, terutama *the big four*, yakni PNI, Masyumi, NU, dan PKI. Berikut adalah tabel sumbangan suara yang diberikan oleh Jawa Tengah terhadap suara di tingkat nasional

Tabel 4. Perbandingan Persentase Hasil Pemilu 1955 di Wilayah Jawa Tengah dengan Nasional

Nama Partai	% Suara Jateng	% Seluruh Indonesia
Masyumi	10,0	20,9
Nahdlatul Ulama	19,7	18,4
PSI dan Perti*	0,7	4,2
PNI	33,5	22,3
Partai-Partai Kristen**	0,8	4,7
PKI	25,8	16,3
Partai-partai lain***	9,5	13,1

Sumber: Profil Provinsi Jawa Tengah, 1992, hlm. 128.

Keterangan

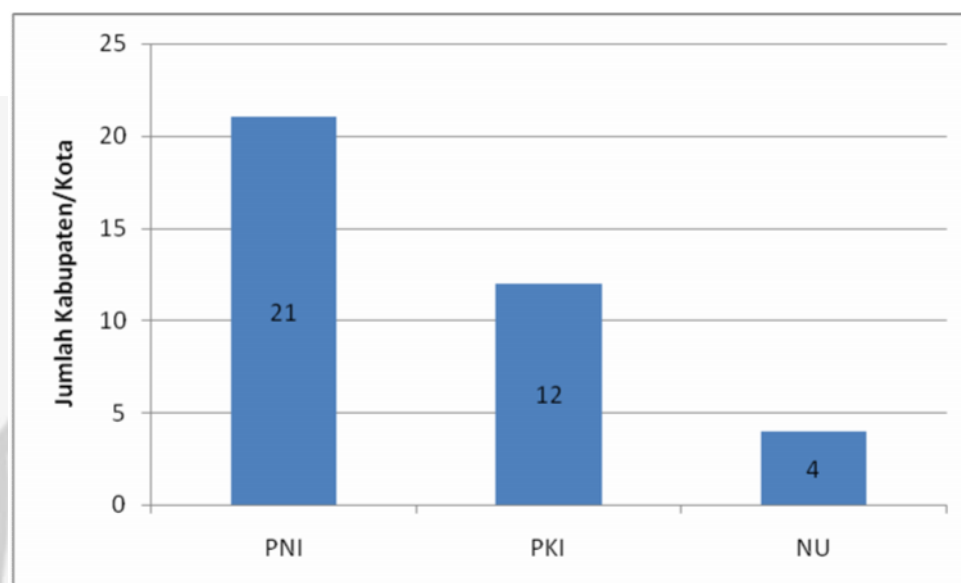
*) Digabung karena persentase relatif kecil secara nasional

***) Parkindo dan Partai Katolik

****) PSI, Murba, PIR, PRI, IPKI, Parindra, Permai, Baperki, dll.

Dari data di atas, dapat dilihat bahwa sumbangan terbesar suara Jawa Tengah terhadap persentase suara nasional adalah pada PNI, yakni sebanyak

22,3%. Dapat dilihat pula bahwa PNI di tingkat Jawa Tengah berhasil mengantongi sepertiga suara yang ada di Jawa Tengah.



Gambar 2. Kemenangan Partai-Partai di Jawa Tengah
(sumber: diolah dari hasil penelitian)

Dari gambar di atas, tampak bahwa perolehan kemenangan di Jawa Tengah didominasi oleh PNI, yakni menang di 21 kabupaten/kota. Posisi kedua diduduki oleh PKI dengan unggul di 12 kabupaten/kota. Posisi ketiga NU yang menang di 4 kabupaten/kota. Di Jawa Tengah, Masyumi tidak menang di satu kabupaten/kotapun.

Secara perolehan suara, berdasarkan data yang dihimpun oleh *Antara* tanggal 26 Desember 1955 untuk pemilu DPR, ternyata di sebagian besar wilayah Jawa Tengah dimenangkan oleh PNI, yakni di Kendal (selisih tipis dengan NU, yakni 72.541 suara), Pati (108.629 suara), Rembang (50.745 suara), Pekalongan (212.915 suara), Pemalang (158.156 suara), Tegal (132.159 suara), Brebes (150.593 suara), Banyumas (220.079 suara),

Purbalingga (115.820 suara), Banjarnegara (101.121 suara), Wonosobo (90.106 suara), Purworejo (152.358 suara), Kebumen (125.306 suara), Sragen (131.072 suara), Karanganyar (66.648 suara), Wonogiri (167.467 suara), Bantul (40.820 suara), Sleman (47.570 suara), Kulonprogo (45.563 suara), Kota Pekalongan (17.842 suara), dan Kota Tegal (12.106 suara). Sementara itu, PKI menang di daerah Semarang (143.738 suara), Purwodadi (124.038 suara), Blora (80.380 suara), Cilacap (170.756 suara), Temanggung (65.764 suara), Klaten (204.296 suara), Boyolali (143.565 suara), Sukoharjo (86.689 suara), Gunungkidul (95.732 suara), Kota Semarang (97.053 suara), Kota Surakarta (75.345), Kota Yogyakarta (43.954 suara). Kemudian NU menang di daerah Demak (100.974 suara), Kudus (63.007 suara), Jepara (110.953 suara), Magelang (137.037 suara). Sedangkan Masyumi tidak menang di satu wilayahpun di Jawa Tengah.

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Herbert Feith, keempat partai pemenang Partai yang ada di Jawa Tengah hasilnya adalah sebagai berikut

Tabel 5. Perolehan Suara Empat Besar Partai Pemenang Pemilu 1955 di Jawa Tengah

Nama Partai	Suara Pemilihan DPR	Suara Pemilihan Konsituante
PNI	3.019.568	3.171.588
Masyumi	902.387	892.556
NU	1.772.306	2.305.041
PKI	1.772.306	1.822.902

Sumber: Hebert Feith, 1971, *The Indonesia Elections of 1955* hlm. 66

Kemenangan mutlak yang diraih oleh PNI dan PKI di Jawa Tengah menjadi salah satu alasan sumbangan suara yang sangat mutlak terhadap suara nasional. Bagi PNI, kemenangan yang gemilang dalam Pemilu 1955 merupakan salah satu keberhasilan yang menjadi titik puncak kesuksesan strategi yang dimiliki oleh segenap aktivis partai ini.

B. Strategi PNI dalam Pemenangan Pemilu

Pada tanggal 4 April 1953, disahkan Undang-Undang yang mengatur tentang pelaksanaan pemilu. Dengan demikian, partai-partai menganggap hari itu sebagai dimulainya masa pengenalan atau kampanye terhadap calon pemilih. Kemudian, pada tanggal 31 Mei 1954, pemerintah melalui Panitia Pemilihan Pusat mengesahkan lambang-lambang partai. Hal ini berarti kampanye mulai berjalan secara lebih luas dengan pengenalan lambang partai sebagai tanda dalam pemilu. Partai-partai mulai menyusun strategi dalam pemenangan pemilu.

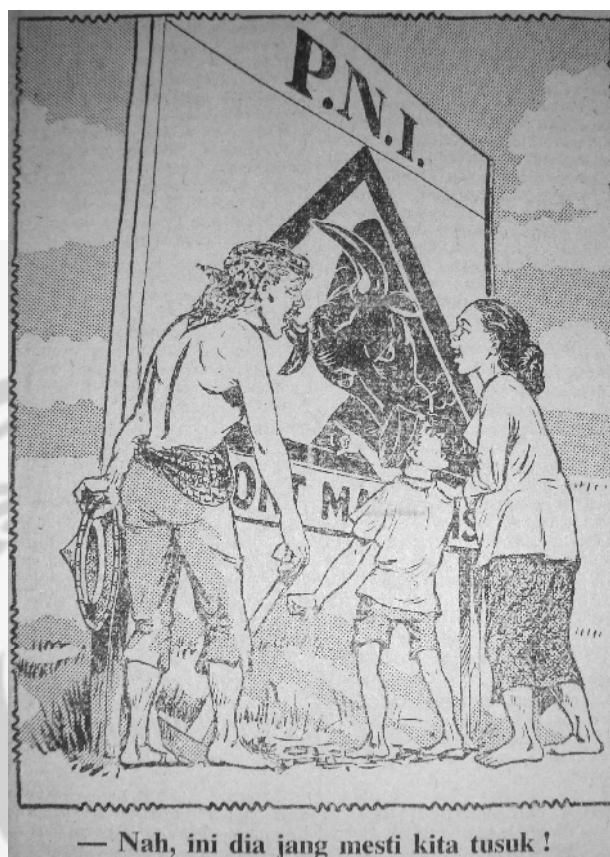
Penyusunan strategi dalam pemenangan pemilu dilakukan oleh PNI dalam situasi yang sangat menguntungkan. Hal ini terjadi karena sebelum pelaksanaan pemilu, yakni dari bulan Juli 1953 sampai Juli 1955, dapat dikatakan PNI adalah partai penguasa atau *incumbent*. Hal ini karena pada masa itu kabinet dipegang oleh Ali Sastroamidjojo sebagai seorang kader PNI. Beberapa pos yang strategis dalam kabinet dan pemerintahan dipegang oleh PNI, yakni Menteri Luar Negeri (Mr. Sunario), Menteri Keuangan (Dr. Ong Eng Die), Menteri Perekonomian (Mr. Iskaq Tjokrodisurjo) (Feith, 1962: 338-

339). Selain itu, satu hal yang menguntungkan adalah bahwa pada tanggal 4 November 1953, kabinet membentuk Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) yang diketuai oleh S. Hadikusumo seorang kader PNI. Hal ini memberikan pengaruh terhadap kepercayaan dan *image* di kalangan masyarakat bahwa PNI adalah sesosok yang memimpin negara.

Pada saat kabinet Ali, PNI menduduki posisi-posisi strategis sehingga memudahkan langkah PNI dalam mencari dana kampanye (Feith, 1962: 338). Hal ini terlihat dari didudukinya jabatan-jabatan strategis dalam bidang perekonomian yang memudahkan PNI mendapatkan akses terhadap sumber-sumber dana yang berasal dari kalangan pengusaha, terutama pengusaha pribumi dan keturunan Cina. Hal ini menyebabkan kemampuan PNI dalam menggalang dana mengalami kemudahan.

Ditinjau dari aspek dukungannya, selama revolusi partai ini berkembang luas berlandaskan dukungan terutama dari elit administratif dan dari *abangan* kaum tani pada Jawa dan mengandung satu jangkauan luas dengan sudut pandang ideologis. PNI memiliki pandangan utama yakni Marhaen atau “nasionalisme proletar” (Crib dan Kahin, 2004: 324:325). Basis utamanya ialah di dalam birokrasi dan kalangan pegawai kantor. Hal ini merupakan hal yang menguntungkan karena basis yang berasal dari kalangan pegawai atau priyayi akan sangat memberi pengaruh terhadap masyarakat pedesaan yang masih sangat menjunjung tinggi patron di kalangan masyarakat.

Strategi lain yang menjadi inti dari gerakan PNI adalah penekanannya pada pemikiran Sukarno yang sangat populis, yakni marhaenisme. Penyebab marhaenisme, partai ini memiliki daya tarik yang sangat besar bagi masyarakat muslim abangan, sebagian karena partai ini dianggap sebagai partai Sukarno (yang secara resmi tidak demikian karena presiden tidak menjadi anggota atau pimpinan partai manapun) dan sebagian karena partai ini dianggap merupakan imbalan utama terhadap keinginan-keinginan politik Islam. Demikian pula, PNI mendapat banyak dukungan di daerah-daerah Kristen di luar Jawa dan di Bali yang menganut agama Hindu, di mana juga terdapat perasaan-perasaan anti-Islam (Ricklefs, 2004: 477). Di lambang PNI tertulis tulisan "FRONT MARHAENIS". Istilah ini merupakan konsep diadopsi oleh Sukarno untuk melihat bagaimana realitas sejumlah besar dari Indonesia, terutama petani mandiri, yang walaupun sangat miskin dan ditekan oleh kapitalisme kolonial, adalah pemilik yang mandiri dan tidak termasuk orang yang proletar (Crib dan Kahin, 2004: 259). Marhaenisme pada esensinya sebuah faham perlawanan yang terbentuk dari sosio-demokrasi dan sosio-ekonomi Bung Karno. Dari landasan inilah maka konsep kemandirian ini menjadi satu faktor penentu yang dicoba kembangkan oleh Sukarno, bahkan setelah ia menjadi presiden dengan adanya konsep trisakti.



Gambar 3. Propaganda PNI untuk mencitrakan sebagai partai rakyat (Sumber: Suluh Indonesia 28 September 1955)

Gambar banteng juga menjadi salah satu alat yang digunakan untuk menjaring suara pemilih. Herbert Feith (1971) menjelaskan bahwa dalam kampanye PNI lambang banteng oleh para juru kampanyenya disebutkan sebagai lambang nasionalisme. Walaupun sabar dan pelan, tetapi memiliki potensi yang besar untuk digerakkan.

Melihat basis masyarakat Jawa Tengah yang sebagian besar hidup di pedesaan, program dari PNI merupakan campuran dari rekomendasi-rekomendasi untuk membantu buruh, menolong petani, mendorong pembangunan ekonomi, menasionalisasi industri-industri penting,

mengorganisasi para pemuda dan berusaha menekankan pengaruhnya di segala lini (Khotimah, 2003: 44).

Untuk mendekati kalangan *abangan*, PNI menekankan aspek ekonomi sebagai salah satu strategi. Wacana yang disajikan PNI dalam mendekati kaum buruh adalah dengan melontarkan wacana pemerintah marhaenis. PNI mengusahakan terwujudnya pemerintah Marhaenis, yakni pemerintah yang ideologi dan usahanya selalu sesuai dengan kepentingan rakyat terbanyak yang miskin dan oleh karena itu dapat menjadi jaminan bahagia untuk rakyat seluruhnya. Aparatur masyarakat dan negara disusun untuk kepentingan Marhaen (Castle dan Feith, 1988: 167). Dan agar itu semua dapat tercapai haruslah jumlah anggota yang terbesar dari tiap-tiap badan perwakilan rakyat terdiri dari kaum Marhaenis, ialah pembela Marhaen dan prajurit yang berjuang untuk mewujudkan masyarakat Marhaenis. Dan untuk ini gerakan Marhaenis harus berjuang agar selalu menang dalam pemilu. Disamping badan perwakilan rakyat yang bersifat politik itu harus ada pula majelis ekonomi yang terdiri dari wakil-wakil buruh pemimpin-pemimpin perusahaan dan wakil instansi pemerintah yang berkewajiban mengatur dan mengawasi jalan produksi serta distribusi barang keperluan hidup rakyat. Terutama yang perlu diatur dan diawasi ialah hubungan perburuhan serta produksi dan distribusi bahan-bahan hidup yang pokok untuk rakyat.

Terkait dengan masalah buruh, melalui konferensi di kota Magelang dari tanggal 16-19 April 1954. Diambilnya ketika itu keputusan-keputusan:

4. Menginsyafi betapa pentingnya sektor buruh dalam perjuangan mencapai cita-cita marhaenisme

5. Dibentuknya Kesatuan Buruh Kerakyatan Indonesia (KBKI) Jawa Tengah yang akan memberi pimpinan kepada cabang-cabang KBKI yang segera akan dibentuk
6. Masalah Pemilu:
 - d. Memperhatikan dan mengikuti soal pendaftaran pemilih.
 - e. Segenap anggota PNI di desa-desa supaya menyediakan diri secara aktif untuk menjadi anggota-anggota tambahan daripada PPP setempat.
 - f. Tindakan-tindakan lain yang erat hubungannya dengan pendaftaran pemilih. (DPD PNI Jawa Tengah, 1969)

Strategi lain yang digunakan oleh PNI adalah dengan mengedepankan aspek “Sukarno” dalam berbagai kegiatan kampanyenya. Hal ini menyebabkan masyarakat pedesaan begitu mengidolakan Sukarno tertarik untuk memilih PNI, karena menurut para propagandis PNI, Sukarno adalah bagian dari PNI. Dalam salah satu terbitannya bahkan mengangkat judul besar yang bertuliskan “Bung Karno udah Pasti Tusuk Tanda Gambar PNI”. Hal ini dinyatakan oleh seseorang berinisial S bahwa dalam pemilu yang akan datang Bung Karno sudah pasti memilih tanda gambar PNI (Suluh Indonesia, 15 September 1955). Wacana tentang Bung Karno sebagai kader dari PNI merupakan sebuah wacana yang sangat penting dan efektif untuk menjaring suara dari kalangan masyarakat bawah, terutama di Jawa Tengah yang sebagian masyarakatnya adalah masyarakat yang hidup di kawasan pedalaman dan cenderung lebih bersifat konformis dan agraris daripada masyarakat pesisir yang dinamis. Ini pulalah yang dimungkinkan menjadi faktor penentu kemenangan PNI yang sangat signifikan di Jawa Tengah. Sukarno menjadi daya tarik bagi pemilih dari kalangan masyarakat karena mereka percaya Sukarno sebagai sosok ratu adil.

Terkait dengan upaya melemahkan partai yang lain, PNI juga melakukan strategi melemahkan partai lawan. PNI memiliki rivalitas dengan Masyumi, dengan demikian PNI berupaya untuk menjatuhkan Masyumi dalam kampanye-kampanyenya. PNI berusaha mengait-kaitkan Masyumi dengan Darul Islam dan mengubah Pancasila lebih sebagai slogan anti-Islam daripada falsafah pengayoman seperti yang dikehendaki Sukarno.

Selama lebih dari dua tahun, kekacauan politik dan kekerasan meningkat, dan diharapkan oleh banyak orang bahwa pemulihan-pemulihan tersebut akan menghasilkan suatu struktur politik yang kokoh untuk masa mendatang (Ricklefs, 2004: 488). Perang wacana yang paling panas adalah antara PNI dan Masyumi. Pertarungan antara dua kekuatan terkuat ini makin memanas ketika terjadi perubahan dari kabinet Ali Sasatroamidjojo yang berasal dari PNI ke Burhanuddin Harahap dari Masyumi, di mana tidak satupun orang PNI dimasukkan dalam kabinet. Saling serang dan bertahan dilakukan oleh kedua partai tersebut.

PNI selalu melakukan upaya penyerangan terhadap kinerja kabinet Burhanudin Harahap. Selain itu dalam Suluh Indonesia disebutkan bahwa Masyumi mempropagandakan bahwa perintah-perintah dari pamong desa dari PNI tidak usah ditaati karena orang yang berkuasa adalah orang Masyumi (Suluh Indonesia, 7 September 1955). Selain itu ada pula wacana tentang pencatutan Bung Karno oleh orang-orang Masyumi (Suluh Indonesia, 5 September 1955). Hal yang paling sering diangkat dalam wacana-wacana untuk menyerang masyumi adalah wacana tentang Masyumi akan mengubah

ideologi Indonesia menjadi negara Islam. Hal ini tampak pada beberapa terbitan dari *Suluh Indonesia* (*Suluh Indonesia*, 20 dan 26 September 1955).



Gambar 4. Wacana PNI yang menyerang Masyumi tentang Darul Islam (sumber: *Suluh Indonesia*, 26 September 1955)

Salah satu doktrin yang dimiliki oleh PNI adalah tentang doktrin OMDIS. OMDIS merupakan singkatan dari Organisasi, Militansi, Disiplin, Introspeksi, dan Setiakawan.

Pertama, organisasi. Dalam buku yang disusun oleh DPD PNI Jawa Tengah tahun 1969 dijelaskan bahwa PNI adalah organisasi dari rakyat Marhaen/ Marhaenis, organisasi perjuangan, oleh karenanya sesuai dengan tujuan yang akan kita capai itu adalah mulia dan luhur, maka kita harus menggunakan pula alat yang rapi dan teratur. Khususnya didalam mengelola

organisasi digunakan prinsip-prinsip organisasi yang baik. Menindaklanjuti hal itu, pada tanggal 24-27 Desember 1953 di Purwokerto dibentuklah PAPU (Panitia Pemilu), yakni badan yang memiliki tugas merancang strategi pemenangan PNI, dalam rangka perjuangan Pemilu yang akan datang.

Penataan terhadap organisasi menjadi salah satu hal yang penting terhadap pemenangan PNI dalam pemilu 1955. Tentang organisasi yang ada dalam tubuh PNI, telah tersusun secara rapi pembagian wewenang dalam partai, seperti (1) Kekuasaan legislatif diatur sebagai berikut: (a) Kedaulatan Partai berada ditangan anggota dan dilakukan dalam rapat-rapat, konferensi-konferensi dan Kongres Partai, (b) Kongres adalah kekuasaan tertinggi dari partai, (c) Di masa antara Kongres kekuasaan partai ditangan Majelis Permusyawaratan Partai, (d) Konferensi Daerah, konferensi cabang dan konferensi anak cabang adalah kekuasaan legislatif di wilayahnya masing-masing. (2) Kekuasaan eksekutif diatur sebagai berikut: (a) Dewan Pimpinan Pusat Partai adalah pemegang kekuasaan eksekutif dari seluruh partai, (b) Dewan Daerah, Dewan Cabang, Dewan Anak Cabang dan Pengurus Ranting adalah pelaksana eksekutif di wilayahnya masing-masing.

Instansi Partai dalam PNI seperti diatur dalam Anggaran Dasarnya adalah (1) Kongres Partai sebagai instansi tertinggi partai, (2) Majelis Permusyawaratan Partai sebagai badan legislatif partai, (3) Dewan Pimpinan Pusat partai yang anggota-anggotanya dipilih oleh Kongres merupakan satu-satunya badan eksekutif dalam partai, (4) Badan Musyawarah PNI sebagai badan konsultasi dan koordinasi antara partai dan gerakan massa Marhaen.

Untuk memudahkan partai melakukan koordinasi disusun struktur sebagaimana dalam pasal 14 Anggaran Dasar PNI, yakni

1. Partai dipimpin oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP PNI).
2. Daerah Partai dipimpin oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD PNI).
3. Cabang Partai dipimpin oleh Dewan Pimpinan Cabang (DPC PNI).
4. Anak Cabang Partai dipimpin oleh Dewan Pimpin Anak Cabang (DPAC PNI).
5. Ranting Partai dipimpin oleh Pengurus Ranting.
6. Kelompok Partai dipimpin oleh Ketua Kelompok (Anggaran Dasar Partai Nasional Indonesia)

Sebagai sayap gerak, PNI memiliki hubungan dengan organisasi massa sebagai *underbouw* partai sebagaimana diatur dalam pasal 24 AD PNI, yakni

1. PNI adalah organisasi pelopor dan pembimbing seluruh Gerakan Massa Marhaen.
2. Hubungan antara partai dengan Gerakan Massa Marhaen diatur dalam Peraturan Khusus.
3. Gerakan-gerakan Massa Marhaen yang dimaksud diatas ialah
 - a. Kesatuan Buruh Marhaenis.
 - b. Petani.
 - c. Gerakan Wanita Marhaenis.
 - d. Gerakan Pemuda Marhaenis.
 - e. GMNI
 - f. Gerakan-gerakan Massa Marhaen lainnya yang dengan persetujuan Dewan Pimmpinan Pusat memutuskan bernaung dibawah PNI.
 (Anggaran Dasar Partai Nasional Indonesia)

Dalam hal ini sengaja digunakan nama-nama dari Dewan Pimpinan Ormas PNI seperti yang digunakan oleh PNI sendiri dengan maksud untuk memudahkan didalam pengertian, meskipun kita tahu bahwa tidak semua Ormas PNI menggunakan nama tersebut (yaitu: DPP, DPD, DPC, dst).

Meskipun pimpinan partai itu merupakan suatu dewan (kolektif), namun masih juga sangat dirasakan perlunya diadakan pembagian tugas, berhubung

sangat luasnya tugas pimpinan partai tersebut. Untuk itulah didalam suatu Dewan Pimpinan Partai itu kita lihat adanya departemen-departemen, yang salah satunya adalah departemen organisasi.

Adapun kedudukan departemen-departemen dalam tubuh PNI termasuk departemen organisasi adalah merupakan staf/ pembantu/ aparat dari Dewan Pimpinan Partai didalam melaksanakan tugas-tugas partai, hingga tidak dapat disejajarkan atau diparalelkan dengan departemen dalam pemerintahan (Kabinet). Sebab departemen dalam tubuh PNI ini tidak merupakan organisasi yang otonom. Justru akan lebih mendekati, apabila departemen dalam pemerintahan itu dibandingkan dengan Ormas PNI, yang dalam hal mengurus organisasi mempunyai otonom.

Sesuai dengan uraian yang membicarakan tentang organisasi, maka hanya departemen organisasi-lah yang mendapatkan sorotan untuk dikaji atas tugas yang dibebankannya sebagai aparat Dewan Pimpinan Partai dalam melaksanakan tugas-tugas partai.

Adapun tugas-tugas pimpinan partai yang menyangkut masalah organisasi yang dalam hal ini departemen organisasi merupakan aparatnya adalah sebagai berikut:

1. Menjalankan usaha-usaha penyempurnaan organisasi partai.
2. Memberikan bimbingan dan pengawasan kepada instansi partai dibawahnya.
3. Memberikan bimbingan kepada gerakan-gerakan massa Marhaen yang setingkat.
4. Mengkoordinir dan memintai pertanggungjawab dari petugas-petugas partai dalam lembaga pemerintahan.
5. Mengadakan evaluasi terhadap perkembangan organisasi partai.

(DPD PNI Jawa Tengah, 1969: 25)

Dari penjelasan di atas, tampak bahwa tatanan organisasi PNI merupakan tata organisasi yang modern dan terstruktur. Hal ini sangat memudahkan PNI dalam melakukan koordinasi dan manajemen wacana dalam pemenangan pemilu dari tingkat pusat sampai tingkat daerah.

Kedua, doktrin dalam OMDIS yang kedua adalah militan. Dalam buku yang disusun oleh DPD PNI Jawa Tengah tahun 1969 dijelaskan bahwa militansi itu dalam hubungannya dengan organisasi adalah merupakan salah satu manifestasi daripada unsur organisasi yang berupa: adanya kesediaan/kemampuan para anggotanya untuk menyumbang tenaganya. Militan itu dapat diartikan sebagai sifat dan sikap yang: “selalu siap dan sedia bertempur”. Namun bagi kita pengertian “selalu siap dan sedia bertempur” itu bukan merupakan pengertian yang statis dan memang harus kita artikan secara dinamis. “Siap dan sedia bertempur” bisa dalam artian kita bertahan, tetapi juga bisa dalam artian menyerang.

Bagi PNI dan ormasnya kata militan/ militansi harus diartikan sebagai sifat dan sikap yang selalu siap dan sedia bertempur dalam mengamankan dan mengamalkan marhaenisme. Itulah sebabnya mengapa setiap anggota terutama para kader-kadernya dituntut memiliki sifat militan atau militansinya harus tinggi.

Untuk mewujudkan militansi kader, ditekankan beberapa hal dalam PNI, yakni (1) *partai bewust*: artinya tinggi dalam kesadaran, teguh-tegas dalam pendirian, kokoh kuat dalam keyakinan terhadap kebenaran dan keluhuran ideologi marhaenisme; (2) Rasa tanggung jawab yang tinggi: ini merupakan

sifat pribadi seseorang yang tercermin dalam tingkah laku yang daripadanya terdapat norma-norma moral. Hanya mereka yang punya keyakinan yang tebal yang melakukan pekerjaannya terus menerus tanpa menghiraukan akan sanksi-sanksi atau perangsang-perangsang dalam bentuk balas jasa tertentu mereka inilah yang dapat dikatakan punya rasa tanggung jawab; (3) Berani dan sanggup menghadapi tantangan dan tentangan: jalan menuju masyarakat Marhaenis tidaklah selapang dan selurus jalan raya yang pernah kita lihat, dalam perjalanan itu banyak dijumpai rintangan, tantangan, dan tentangan untuk itu anggota harus berani dan sanggup menjawabnya dan ulet dalam mengatasi.; (4) Lincah tangkas dalam tindakan/ pemikiran: bahwa perjuangan memerlukan tindakan/ pemikiran yang lincah dan tangkas, dan tidak bisa kita lakukan dengan cara yang *nguler kembang*; (5) Cepat-cepat dalam menanggapi dan mengambil keputusan: terhadap sesuatu kejadian/ peristiwa terutama yang menyangkut kehidupan dan penghidupan organisasi, maka harus segera ditanggapi dan cepat serta tepat pula mengambil keputusan. Keterlambatan dan ketidak tepatan dalam mengambil keputusan bisa mendatangkan kerugian/ bahaya bagi organisasi; (6) Berjiwa besar: mudah marah, mudah tersinggung sedapat mungkin harus dihindari agar tidak terjadi bentrokan fisik, lagi pula marah telah berarti kekalahan dalam kehidupan organisasi partai; (7) *Historis bewust*: artinya harus pandai mengikuti perkembangan sejarah, menyesuaikan dengan situasi dan kondisi dan mempunyai pandangan ke depan yang luas; (8) Tidak boleh dilupakan ialah sadar dan mengerti akan batas-batas antara taktik, strategi dan prinsip, dan pandai melakukannya.

Selanjutnya sifat militan dari anggota itu dalam kehidupan masyarakat luas harus dicerminkan oleh anggota partai tersebut dalam bentuk: berpikir baik, bewatak baik, beritikad baik, berbuat baik, dan besifat baik. Akhirnya apabila sifat militan dari anggota dalam partai (organisasi) itu disertai dengan disiplin, introspeksi, dan setia kawan, maka bukan saja anggota partai itu secara individu merupakan kader-kader yang tangguh, tetapi bagi PNI sendiri sebagai organisasi partai akan merupakan kekuatan yang disegani oleh lawan maupun kawan perjuangan (DPP PNI Jawa Tengah, 1969).

Ketiga, faktor disiplin. Bagi PNI dan ormas-ormasnya disiplin terhadap prinsip sudah cukup baik. Marhaenisme 1927 hingga kini tetap menjadi dasar perjuangan sebagian bangsa Indonesia, karena tujuan PNI adalah tujuan bangsa.

Suatu faktor yang besar pengaruhnya terhadap disiplin ialah faktor ideologi. Pimpinan atau anggota-anggota yang kurang memahami atau meresapi ideologi, dasar dan tujuan partainya mudah sekali goyah disiplinnya. Faktor lain yang banyak pengaruhnya terhadap kedisiplinan ialah faktor organisasi. Tujuan yang akan dicapai oleh organisasi harus meyakinkan, dan tidak meragukan. Keraguan akan melemahkan disiplin. Kecuali tujuan, penempatan orang-orang dalam organisasi itu pun tidak kalah pentingnya. Penempatan yang keliru, si pelaksana menjadi tidak tahu atau kurang senang apa yang menjadi tugasnya. Mengerti posisinya didalam organisasi pasti akan melakukan tugas dan kewajibannya yang sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab dan kesadarannya (DPD PNI Jawa Tengah, 1969).

Keempat, introspeksi. Introspeksi berarti mawas diri, atau dalam konteks bahasa Jawa “*mulat saliro*”. Tujuan mawas diri adalah untuk mengenal diri sendiri, untuk memberikan evaluasi pada diri sendiri. Orang yang mengenal akan dirinya sendiri, akan dapat melihat kekurangan-kekurangannya, dan akan bisa berusaha untuk memperbaikinya, sehingga pada akhirnya akan timbul kepercayaan pada diri sendiri dan tahu akan harga dirinya. Jadi pokoknya introspeksi adalah suatu usaha untuk meningkatkan taraf mental manusia. Dalam rangka perjuangan nasional introspeksi adalah salah satu segi dari *nation and character building*.

Kelima, setia kawan. Partai Nasional Indonesia adalah suatu partai besar, yang mempunyai anggota berjuta jumlahnya. Konon seorang pembesar pernah menyatakan, bahwa PNI Jawa Tengah saja mempunyai “daerah pengaruh” yang sedikitnya meliputi 50% dari seluruh wilayah Jawa Tengah. Di Jawa Tengah “diketemukan” pegangan yang dinamakan OMDIS itu, yang diharapkan akan menjadi senjata bagi para pengurus, para kader, dan lain-lain untuk menunaikan tugasnya.

Solidaritas atau Setiakawan adalah suatu manifestasi dari kematangan jiwa seorang pejuang, yang sudah sanggup meniadakan kepentingan, ambisi dan aspirasi diri pribadi, atau barangkali lebih tepat dikatakan, yang sudah sanggup menjadikan kepentingan, ambisi dan aspirasi bersama menjadi kepentingan, ambisi dan aspirasi diri pribadi. Solidaritas adalah pengejawantahan sikap seorang pejuang yang berpegang teguh pada semboyan: *one in the many, and many in the one*. (Satu untuk semua dan semua untuk

satu). Dalam organisasi yang begitu besar seperti PNI dengan segenap ormasnya, tidak cukup orang hanya akan berpegangan dan berpedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran Tetangga semata-mata. Di samping itu, terutama bagi para pemimpin dan para kader, harus ada tambahan pegangan, pedoman yaitu Solidaritas atau Setiakawan (DPD PNI Jawa Tengah, 1969).

Dari berbagai penjelasan di atas, kemenangan PNI dalam pemilu 1955 di Jawa Tengah sangat terkait dengan kondisi masyarakat pada saat itu. Untuk menjawab hal tersebut ada dua hal yang harus dipahami. Pertama, aspek paternalisme yang bagi masyarakat Jawa Tengah sejak lama memang dikenal memainkan peranan penting. Kedua penampilan PNI ketika itu boleh dibilang memenuhi sebagian besar impian masyarakat, khususnya yang tinggal di pedesaan dengan janji dan pemihakannya terhadap masyarakat. Kekuatan PNI terutama pada keberhasilannya memegang tokoh masyarakat baik formal maupun nonformal, terutama yang berasal dari kalangan *priyayi*. Hal ini sangat memberikan pengaruh yang signifikan karena kecenderungan masyarakat pedesaan Jawa masing sangat memegang asas patron klien. Dengan sikap masyarakat pedesaan yang paternalistis, maka kemungkinan meraih suara lebih banyak jika tokoh-tokohnya telah berhasil dipegang, tentu akan lebih besar. Lebih lanjut lagi kemenangan PNI ditopang dengan adanya propaganda yang mengunggulkan partai dan mencoba untuk menjatuhkan partai lain. PNI mampu muncul sebagai pemenang dalam pemilu tahun 1955 di Jawa Tengah.

BAB VII

PENUTUP

Simpulan

1. Pemilu tahun 1955 merupakan pemilu pertama yang dilakukan di Indonesia. Sistem yang digunakan adalah sistem proporsional. Pemilu dilaksanakan secara serempak di sebagian besar wilayah Indonesia pada tanggal 29 September untuk pemilih parlemen (DPR), dan tanggal 15 Desember untuk pemilihan Konstituante. Di Jawa Tengah, 4 besar pemenang pemilu adalah PNI, disusul oleh PKI, NU, dan Masyumi. PNI di Jawa tengah mendominasi perolehan suara dengan mendapat sepertiga suara pemilih.
2. PNI memiliki sejarah yang panjang sebagai partai yang berkembang di Indonesia. Dalam perkembangannya PNI dapat dipilah menjadi dua, yakni PNI sebelum kemerdekaan dan PNI setelah kemerdekaan. PNI setelah kemerdekaan merupakan perkembangan dari PNI sebelumnya dengan tetap memegang teguh pada ideologi marhaenisme. PNI banyak mendapatkan simpatisan dari kalangan pejabat dan kalangan masyarakat yang fanatik dengan Sukarno.
3. Wacana utama yang dimunculkan oleh PNI pada dasarnya adalah marhaenisme. Istilah ini merupakan konsep diadopsi oleh Sukarno untuk melihat bagaimana realitas sejumlah besar dari Indonesia, terutama petani mandiri, yang walaupun sangat miskin dan ditekan oleh kapitalisme kolonial, kaum marhaen adalah pemilik yang mandiri dan tidak termasuk orang yang

proletar. Wacana tentang Bung Karno sebagai kader dari PNI merupakan sebuah wacana yang sangat penting dan efektif untuk menjaring suara dari kalangan masyarakat bawah, terutama di Jawa Tengah yang sebagian masyarakatnya adalah masyarakat yang hidup di kawasan pedalaman dan cenderung lebih bersifat konformis dan agraris daripada masyarakat pesisir yang dinamis.

4. PNI memenangkan pemilu secara mutlak di Jawa Tengah dengan mengantongi sepertiga suara Jawa Tengah dan memenangi di 21 Kabupaten/kota. Hal ini disebabkan oleh adanya strategi yang diterapkan, yakni upaya penguatan terhadap organisasi dan sayap gerak organisasi dari pusat sampai daerah dan organisasi massa yang dimiliki di segala lini. Kemudian, PNI mendekati pemimpin-pemimpin lokal sebagai sarana untuk mendapatkan suara dari masyarakat. Pelabelan Sukarno sebagai bagian dari partai juga menjadi salah langkah yang digunakan dalam mendapatkan simpati massa karena masih kentalnya paham paternalisme yang dimiliki masyarakat dan anggapan bahwa Sukarno adalah seorang ratu adil. Di Jawa Tengah DPD memiliki doktrin OMDIS (Organisasi, Militan, Disiplin, Introspeksi, Setiakawan) sebagai panduan dalam melaksanakan strategi kemenangan partai.

DAFTAR PUSTAKA

Buku, Jurnal, dan Hasil Penelitian

- Adian, Dony Gahral. 2005. *Percik Pemikiran Kontemporer: Sebuah Pemikiran Komprehensif*. Jakarta: Jelasutra
- Budiardjo, Miriam. 1977. *Pengantar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Castles, Lance dan Feith, Herberth (ed). 1988. *Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965*. Jakarta: LP3ES.
- Cribb, Robert & Audrey Kahin. 2004. *Historical Dictionary of Indonesia*. Maryland: The Scarecrow Press, Inc
- Dick, Howard, Vincent J.H. Houben, J. Thomas Lindblad, Thee Kian Wie. 2002. *The Emergence of a National Economy: an Economic History of Indonesia, 1800–2000*. Honolulu: University of Hawai'i Press.
- DPD PNI Jawa Tengah. 1969. *Dua Windu PNI Djawa Tengah*. Semarang: PNI Jawa Tengah.
- Fauzi, Noer. 1999. *Petani dan Penguasa: Dinamika Perjalanan Politik Agraria Indonesia*. Yogyakarta: Insis, KPA, dan Pustak Pelajar.
- Feith, Herbert. 1954. "Toward Election in Indonesia". *Pacific Affairs*. Vol. 27, No. 3. (Sep., 1954). Hlm. 236-254.
- . 1962. *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia*. Itacha: Cornell University Press.
- . 1971. *The Indonesian Election of 1955*. New York: Modern Indonesia Project, Southeast Asia Program, Cornell University.
- Firmanzah. 2008. *Marketing Politik Antara Pemahaman dan Realitas*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Friyanti, Fiska. 2005. "Pelaksanaan Pemilihan Umum dalam Sejarah Nasional Indonesia". *Skripsi*. Jurusan Sejarah FIS Universitas Negeri Semarang.
- Geertz, Clifford. 1984. *Involusi Pertanian*. Terjemahan S Supomo. Jakarta: Bhratara Karya Aksara
- Hardjowirogo, Marbangun. 1984. *Manusia Jawa*. Jakarta: Inti Idayu Press.
- Haricahyono, Chepi. 1986. *Pengantar Ilmu Politik*. Yogyakarta: Tiara Wacana.

- Irianto, Agus. M. & Thohir, Mudjahirin. 2000. *Membangun Rasa Damai di Atas Bara*. Semarang: Limpad
- Jatman, Darmanto. 1993. *Sekitar Masalah Kebudayaan*, Bandung: Penerbit Alumni
- Kahin, George McTurnan. 1995. *Nasionalisme dan Revolusi Indonesia*. Jakarta: Sinar Harapan dan Sebelas Maret University Press.
- Kantaprawira, Rusadi. 2004. *Sistem Politik Indonesia: Suatu Model Pengantar*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Khotimah, Siti. 2003. "Peranan Pers dalam Perjuangan Partai Politik pada Masa Demokrasi Liberal 1950-1959 (Sebuah Tinjauan terhadap Suluh Indonesia dan Harian Rakjat)". *Skripsi*. Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.
- King, Dwight Y. 1998. *Seandainya Sistem Distrik Berlaku pada Pemilu 1955*. Dalam <http://www.seasite.niu.edu/indonesian/Reformasi/Perspektif/sean45.htm>
- Kodiran. 1999. "Kebudayaan Jawa". Dalam Koentjaraningrat (ed). *Manusia dan Kebudayaan Indonesia*. Jakarta: Penerbit Jambatan.
- Koentjaraningrat, 1981, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
- Kuntowijoyo. 2004. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Bentang.
- Latif, Yudi. 2005. *Intelegensia Muslim dan Kuasa: Genealogi Intelegensia Muslim di Indonesia Abad ke- 20*. Jakarta: Penerbit Mizan.
- Lilleker, Darren G. 2006. *Key Concepts in Political Communication*. London: Sage Publication
- Magnis-Suseno, Frans. 1984. *Etika Jawa*. Jakarta: Gramedia.
- Maridjan, Katjung. 1992. *Quo Vadis NU Setelah Kembali ke Khittah 1926*. Surabaya: Erlangga
- Matsumoto, David. 1996. *Culture and Psychology*. California: Brooks/Cole Publishing Company
- Moedjanto, G. 1988. *Indonesia abad ke 20*. Yogyakarta: Kanisius.
- Oemar, Moh. dkk. 1994. *Sejarah Daerah Jawa Tengah*. Jakarta: Depdikbud.

- Pabottingi, Mochtar. 1998. *Menggugat Pemilihan Umum Orde Baru*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Pito, Toni Andrianus dkk. 2006. *Mengenal Teori-Teori Politik dari Sistem Politik sampai Korupsi*. Bandung: Yuansa Cendekia.
- Poesponegoro, Marwati Djoned dan Notosusanto, Nugroho. (ed). 1984. *Sejarah Nasional Indonesia Jilid 6*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1954.
- Profil Provinsi Jawa Tengah tahun 1992.
- Rachman, A. 2010. *Sistem Politik Indonesia*. Jakarta: Universitas Mercu Buana
- Ricklefs, M.C. 2005. *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*. Terjemahan. Jakarta: Serambi.
- Rocamora, J. Eliseo. 1970. "The Partai Nasional Indonesia". *Indonesia*. No 10 Oktober. hlm. 143-181
- Rogers, Everett M. 2004. "Theoretical Diversity in Political Communication". Dalam Lynda Lee Kaid (ed). *Handbook of Political Communication Research*. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.
- Said, Tribuana. 1987. *Sejarah Pers Nasional dan Pembangunan Pers Pancasila*. Jakarta: Haji Masagung
- Sjamsudin, Helius. 2009. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Ombak.
- Soedarsono. 1986. *Kesenian, Bahasa dan Folklor Jawa*, Yogyakarta: Depdikbud
- Suhartono. 1994. *Sejarah Pergerakan Nasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suparlan, Parsudi. 1977. "Demokrasi dalam Masyarakat Pedesaan". *Prisma*. No. 2 Februari 1977.
- Sybly, M. Roem .2009. *Dinamika Politik Jawa Tengah*. Dalam http://www.reform-institute.org/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=1 diunduh 2 Januari 2010
- Utomo, Cahyo Budi. 1995. *Dinamika Pergerakan Nasional Indonesia*. Semarang: IKIP Semarang Press.
- Wicaksono, Gunawan. 2006. "Peran tentara teritorium IV diponegoro dalam pelaksanaan pemilihan umum 1955 di Jawa Tengah". *Skripsi*. Jurusan Sejarah FSSR Universitas Sebelas Maret.

Surat Kabar dan Majalah

Duta Masyarakat, 16 Juni 1955

-----, 13 Juli 1955

-----, 8 Agustus 1955

-----, 22 Agustus 1955

-----, 2 September 1955

-----, 19 September 1955

-----, 24 September 1955

Fikiran Rakjat, 27 September 1955

-----, 28 September 1955

Harian Rakjat, 15 Januari 1955

-----, 23 Mei 1955

-----, 10 September 1955

Suara Merdeka, 16 Juni 1955

-----, 10 Agustus 1955

-----, 9 September 1955

-----, 10 September 1955

-----, 24 September 1955

Suara Ummat, 3 Oktober 1955

-----, 8 Oktober 1955

-----, 16 November 1955

-----, 17 November 1955

-----, 30 November 1955

-----, 3 Desember 1955

Suluh Indonesia, 3 Agustus 1955

-----, 5 September 1955

-----, 7 September 1955

-----, 14 September 1955

-----, 15 September 1955

-----, 20 September 1955

-----, 26 September 1955

-----, 27 September 1955

-----, 28 September 1955

Tangkas, 29 Agustus 1955

Tempo 13/XXVIII, 31 Mei 1999

Website

<http://eprints.undip.ac.id/15583/> diunduh 3 Agustus 2011

<http://id.wikipedia.org/wiki/marxisme> diunduh 14 Januari 2011


http://pcinu-mesir.tripod.com/ilmiah/pusaka/ispustaka/buku02/004_4.txt diunduh 11 Maret 2011

http://www.kpu.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=39 diunduh 5 Mei 2011

Lampiran 1

RABU, 14 SEPTEMBER 1955

**Menunjuk KEPALA BANTENG dalam segi tiga,
berarti menudju masjarakat SAMA-RATA
SAMA-BAHAGIA.**



P. N. I.

FRONT MARHAENIS

KEMENTERIAN PERTANIA
PUSAT DJAWATAN KEHEWA
(Djil. Karanganjar No. 57)
DJAKARTA

PENGUM

No. 3559/

Mulai tanggal 1 Nopem

SEKOLAH PENGE
HEWANAN

di BOGOR (Djil. Tjilimunggu
murid baru untuk tahun pe

1. Banyaknya pelajar/jar jang
2. Syaratnja untuk masuk
a. Laki-laki Warga Negara
Sekolah Raktat 6 tah
b. Surat tanda lulus u
Negeri dengan angka
c. Berumur paling sedi
tinggi 23 tahun ;
d. Berhadan sebat jang
keterangan dokter ;
e. Berkelakuan baik
surat-keterangan da
Polisi setempat ;
f. Surat keterangan d
jang menjalakan se
perongkosan.
3. Uang Sekolah/Alat :
pimpinan menurut
pada Sekolah Land
4. Tempat pendaftaran :
Lamaran jang dise
daftar alid jang ta
jang berwujud Pas
an-keterangan tera
dan f. susata da
PUSAT DJAWATA

PERSEROAN KOMANDITER

Suluh Indonesia 14 September 1955

Lampiran 2

29 SEP 1955

PEMILIHAN UMUM
Tioggal 2 hari lagi
Maka bersiap-siaplah

SULUH INDONESIA

UNTUK KESATUAN RAKJAT

KELASA, 27 SEPTEMBER 1955

HARIAN

Mendjelang pemungutan suara

Rakjat dan bangsa Indonesia sambut rapat² kampanye PNI dengan hangat

★ Konsekwen anti pendjadjahan dan imperialisme.
★ Linggardjati — Madiun Affair — Negara Kesatuan.
★ Anti kemiskinan dan program ekonomi jang tegas.

(1)
(Oleh: Kor. Sulinda)

Djakarta: — Kampanje Pemilihan Umum untuk anggota Dewan Perwakilan Rakjat sudah selesai. Dalam suasana tenang 2 hari lagi kita masing-masing akan menuju kekotak suara, memilih wakil yang kita pertajai untuk mengemudikan negara, untuk memikirkan nasib kita beserta anak-tutju kita semuanya.

Sementara itu baiklah kepada chalaajak ramai disampaikan hasil keseluruhan dari kampanje yang dilakukan oleh Partai Nasional Indonesia beserta organisasi se-azas seperti Wanita Demokrat, Pemuda Demokrat, Petani, KKKI dan lainnya yang seluruhnya tergabung dalam Front Marhaenis.

Dengan tiada dilebih-lebihkan sambutan rakjat dan bangsa Indonesia kepada rapat² penerangan PNI yang diselenggarakan diseluruh Tanah Air ada sangat memuaskan. Bagi mereka yang telah menjuruskan segala tenaga dan pikiran tidak ada alasan untuk ketjewa.

Dan kepada segenap lapisan yang telah menjambut segala rapat² penerangan PNI tersebut, patut disampaikan ucapan terima kasih.

Dengan pengharapan moza sambutan itu pada hari Kamis, 29 September ini tetap menggelora dan masing-masing tidak salah melakukan pilihan, karena memang hanya satu yang menjadi impian kita yakni membentuk "kepada banteng dalam segi-tiga"

Djika yang demikian itu dapat berlangsung seperti jika kita harapkan sekalian, maka barulah semuanya merupakan bantuan yang seriff-nya bagi perjuangan kita selanjutnya, untuk menjusun masyarakat ini menurut tradisi dan sesuai dengan garis yang telah kita tentukan bersama.

PERJUANGAN PNI
Bantu perhatian dan suk Air

Menusuk KEPALA BANTENG dalam segi tiga,
berarti memilih FRONT MARHAENIS, jang
anti kapitalisme dan imperialisme

P. N. I.



FRONT MARHAENIS

Dalam perundingan dengan Belanda, lebih dalam soal Linggardjati, begitu juga dalam bentuk Negara Kesatuan PNI tetap memegang teguh konasionalannya.

Kalau tempo PNI menunjukkan sikap yang keras dan sering tidak dimengerti oleh lawan politik, sebenarnya tidak lain ialah karena keselamatan bangsa dan Tanah Air yg dipergajanya teguh.

Dan ini dilasjafi benar oleh rakjat disegala pelokok dan lapisan. Rakjat yang sadar tidak bisa memudah bahwa PNI ada dipengarahi oleh musuh barnegeri, baik dia asal dari blok Barat, maupun dari blok Timur.

PERHATIAN LUARNEGERI

Dalam suasana berdebat mendjelang Hari Pemungutan Suara tidak kurang berdebatnya sebaraja luarnegeri mengenai segala sesuatu disekitar Pemilihan Umum ini. Mereka ada berkepentingan akan hasilnja.

Selalipun hendak disembunyi, tetapi rakjat sambutan rakjat dan bangsa Indonesia pada umumnya kepada rapat² kampanye sudah belakangan ini

PNI Lombok dirikan mesjid seharga Rp.200.000.-
Rapat² kampanye PNI mendapat sambutan hangat

(Oleh: koresponden Sulindo sendiri)

Djakarta, (Sulindo). — Front Marhaenis (PNI) mendirikan mesjid dengan biaya Rp. 20.000.— tidak hanya untuk anggota Front Marhaenis saja, tapi juga untuk seluruh umat Islam. PNI menjanggukan bekerja sekerasnya untuk kebahagiaan Rakjat marhaenis Indonesia. Rakjat siapa awas memberikan suaranya, agar tidak keliru memilih orang yang mengaku pemimpin tapi berdjwa seperti terangan para gembong PNI utusan DP PNI dalam rapat umum didaerah Lombok.

Rapat itu diadakan dalam rangka pemilihan umum jod, di Desa Masbagik, Apitak dan Suwela, daerah bagian Lombok Timur. Berlangsung 2 hari berturut-turut mulai 14 s/d 16 Juli. Menurut berita yang disampaikan oleh pembantu Sulindo, sambutan benar mempergunakan kesempatan itu sebaiknja, dan sudah dengan salah pilih. Karena sejak Indonesiannya sampai saat ini tidak sedikit jumlahnya orang yang mengaku pemimpin. Rakjat yang

Pre
ango
Djakar
Sebab pa
karena te
PNI (P
sial) yang
diangkat
Daurat
lainnya
gusti 2 s
kama jua
Mentel
Meroka
binet BH
dari Kati
guru, H
Sugih Tk
dra dan S
2 orang
pengganti
Iqbal Moe
PSIT sek
ABM. Jus
nagu jua
Presiden
njanpa di
PFI yang
memberika
jale Presi
barang kita
bang pem
hari lagi
dijika itu
Lau pemis
29 sept 19
sekitar 10

Suluh Indonesia 23 September 1955

Lampiran 3

UAN RAKJAT DAN BANGSA
HARIAN PAGI



Pemilihan Umum bukan berarti mengganti Merah Putih
(Klise : Berita Minggu)

ANDA KATA MASJUMI-PSI MENANG, GUNTING SJAFRUDDIN BERAKSI LAGI
Karena gagalnya politik demokrasi...

Lampiran 4

AN RAKJAT DAN BANGSA

HARIAN PAGI

Per

Djangan

Djakarta
Presiden I
lam telah
mengenai
ka tjorong
supaja ra
pilihnja d
wa hak j
serta mer
sebagai w
deka dan

Pidato
nja sebag
Dua ha
tember j
akan mel
terpentin
air kita
akan me
akan du
men jang
jat selur
pilihan s
lah suat
Rakjat j
jat. Unt
sedjarah
mempun
oleh rak
mentjern
Dengan
29 Septe
ini bang
langkah
njempun

Pemerin
berdasark
dari sem
krasi be
rakjat n
ri dengat
dipilihnja
bertanggu
Undang
but dalam
merdeka
negara h

— Nah, ini dia jang mesti kita tusuk !

**Sumitro hantjurkan pengu-
saha² bonafide**

Lampiran 5

... yang ma-
... Dalam
... bahwa seber-
... badakan per-
... erapa partai
... tidak lagi
... an? Dengan
... bak lagi per-
... karena
... adjuan.
... erpartai dju-
... duk
... siapa jang
... si Perdana
... mau mem-
... dikatakan
... baik para
... totalisa-
... akah akan
... Kabinet ini
... erpartai, di-
... orang tidak
... duk dalam
... akan ketiga
... nberikan la-
... pada Wakil
... jang telah
... kemudian
... pertemuan
... lah tersedia
... dakar dika-
... kapal untuk
... dia. Alat
... sudah leng-
... pula kepam-
... labuh. Hak
... datang.
... rtjapai, te-
... buruk itu
... Wilopo.
... kan sama
... Hatta un-
... ja.
... keterangan
... ulkan oleh

**ORANG
LAP**
... gan sa-
... hmir

Reuter) —
... a, Jawahar-
... a menerang-
... bahwa se-
... ditangkap
... botase pesa-
... ir Princess"
... n Indonesia
... ke Bandung
... ang lalu.
... pemerintah
... i mengum-
... jang kuat
... abot itu dan
... h diserahkan
... Hongkong
... penjelidikan
... pembesar
... an mengaki-
... orang' jang
... bagi kedja-
... itu, demikian
... dalam ketja-
... sedjumlah
... hendak meng-
... an-Afrika di

... di Perdana Menteri ?
... Kalangan' jang mengetahui dan
... dekat formatir menerangkan bah-
... wa untuk mendjabat kursi PM
... ini Wakil Presiden Hatta telah
... menjatakan kesanggupannya un-
... tuk mendjabat kursi tersebut.
... Jang masih mendjadi persoalan
... apakah hal tersebut tidak menjim-
... pang dari opdracht wakil Presi-
... den sendiri dalam menentukan
... pembentukan kabinet, kini masih
... mendjadi pertimbangan Hatta per-
... soonlijk dan golongan' jang me-
... ngingini agar Hatta turun tangan.

... tersebut.
... Seperti diketahui penanda-la-
... ngapan persetudjuan immigrasi
... antara Indonesia dan Pilipina da-
... lam bulan Pebruari jang lalu se-
... sudah berunding tiga bulan lama-
... nja telah ditunda pada saat ter-
... akhir, karena senator dari partai
... (Nationalista Claro M. Recto telah
... menentang keras legalisasi 4.000
... orang immigrasi gelap di Pilipi-
... na atas dasar juridis dari pada
... berdasarkan prosedur adminis-
... tratif. Demikian AFP kabarkan
... dari Manila.

... berawal jang akan diselenggarakan
... oleh PBB dari tg. 8 sampai 20 Agus-
... tus jang dikota tsh. sarjana Soviet
... professor Nikolayev dan Walter Zinn
... dari A.S. akan mendapat waktu ter-
... banyak untuk membicarakan dokumen
... mereka masing.

... Waktu tsh. telah difontakan paling
... sedikit 5 menit dan paling banyak 45
... menit. Walter Zinn akan menemu-
... kakan pengalaman jang telah dipero-
... leh dalam menjiptakan dan memaki
... prototype reaktor atom jang membi-
... kin mendidih air baik air biasa ma-
... uap jang dibutuhkan untuk mengge-
... rakan suatu turbin. Nikolayev akan
... berbitjara dg. sesatun tenaga atom
... jang pertama di Soviet Uni.

... berwujud
... atom has
... reaktor a
... ki. Selain
... tentang
... atom itu
... menurut
... bust 16
... 3 buah, a
... de, Italia
... Swis dan
... sebuah
... Uni tidak
... mintan
... tentang
... tsh. Dju-
... tahu sur
... rantjis d
... buah, da
... Sweden
... ah.

**Rapat umum PNI di Purworedjo
dihadiri oleh l.k. 450.000 orang**
*Wanita2 menangis karena ngeri lihat
banjaknja orang berkumpul*
**Kereta api dan dokar habis diborong oleh pengun-
djung rapat umum**
(Oleh : Koresponden keliling Sulindo).

Purworedjo. — Kabupaten Purworedjo jang berpendu-
duk 600.000 orang pada pagi hari Minggu jbl. kira puku
4.00 sudah digetarkan oleh suara kentongan jang bertalu-
talu. Diseluruh desa² didaerah kabupaten pada pagi hari
itu rakjat dibangunkan oleh kentongan jang bukan meru-
pakan tanda bahaya. Tetapi kentongan ini adalah isjarat
agar rakjat jang ingin menghadiri rapat umum PNI ba-
ngun untuk siap² berangkat menudju aloon-aloon Purwo-
redjo.

Begitu kentongan ditalu habis,
maka penduduk beramai-ramai
memersiapkan diri untuk be-
rangkat ke kota Purworedjo. Ba-
gaimana hebatnja sambutan
penduduk terhadap rapat umum ini
dapat dibuktikan, bahwa djalan
Bukit-Purworedjo jang biasanya
kalah dengan mobil tjukup didja-
lanj dalam waktu 20 menit, ming-
gu pagi itu mesti dilalui dalam
waktu satusetengah djam.

Belum pernah terdjadi da-
lam sejarah Djawa Ten-
gah.

Segekap dokar dan sepeda
pada hari itu berhaskan lambang
PNI/Front Marhaenis menudju
kesaloon-aloon. Kereta api Kuto-
ardjo-Purworedjo jang pada hari-
biasa tidak pernah penuh dan ha-
nja menggunakan 10 gerbong,
pada hari Minggu itu terpaksa
menggunakan 20 gerbong dan di-
tarik/didorong oleh dua lokomo-
tif. Perjalanan kereta-api pada
hari Minggu itu terpaksa diperli-
patganda untuk melajani orang-
orang jang hendak mengundja-
ngi rapat Umum P.N.I. di
Purworedjo.

Dokar' jang telah mengangkut
orang' dari luar kota ke Purwo-
redjo tak mau ditumpangi bukan
pengundjung rapat umum jg hend-
dak pergi keluar kota.

Larisoja pengangkutan dikabu-
paten Purworedjo pada hari itu
belum pernah terdjadi disepan-

djang sedjarah propinsi Djawa
Tengah.

Suasana dialoon-aloon me-
ngerikan

Pada kurang lebih djam 8.00
pagi, kota Purworedjo telah be-
nar' mendjadi lautan „Kepala
Banteng“. Ditap sudut djalan
tersedia media dengan minuman
teh manis. Ini diperuntukkan ba-
gi para pengundjung rapat umum
jang boleh minum dengan gratis.

Aloon² Purworedjo jang luasnja
sama dengan Lapangan Banteng
Djakarta penuh sesak sampai' lu-
laman Kabupaten jang ada dide-
kat aloon' djuga dibandjiri man-
sia. Menurut taksiran wartawan
„Antara“ dan „Suluh Indonesia“
jang menghadiri rapat umum itu
ada 450.000 orang.

Betapa hebatnja massa jang
hadir dapat kita lihat, bahwa be-
berapa orang perempuan pada
menangis karena tak tahan meli-
hat begitu banjaknja umat Tu-
han berkumpul disuatu tempat.
„Selama bumi terkembang dan
langit terbentang belum pernah
terdjadi demikian“.

Didekat panggung pembijara
terpantang lambang PNI-Front
Marhaenis jang berupa Kepala
Banteng dalam segitiga dengan
ukuran raksasa : 13 meter tinggi
dan lebarnja 9 meter.

Untuk suatu perbandingan
sadjja.

Bahwasanja hal jang demikian
ini baru pertama kali terdjadi da-

lam sedjarah di Djawa Tengah,
maka kita ambilkan perbandi-
ngan. Rapat umum PKI jang di-
adakan pada beberapa bulan jl
di Magelang menurut mereka jg
menjaksikan hanja separoh-nja
sadjja dari rapat umum PNI ini.

Rapat umum Masjumi dengan
Kijai Isa Ansjari-nja di Purwo-
redjo baru' ini hanja dihadiri oleh
10.000 orang. Sedangkan rapat
umum NU dihadiri oleh lebih ku-
rang 20.000 orang.

Patut ditambahkan, bahwa se-
lama rapat umum berlangsung,
lapangan itu didjaga oleh 800 pe-
muda Marhaenis dan tempat² pa-
pentipan sepeda jang beristi sepe-
da ratusan itu adalah gratis. Se-
lama rapat berlangsung tak ada
terdjadi insiden atau kehilangan
sepeda.

Sartono : Tak ingin lihat
rakjat mengemis

Mr. Sartono dari DPPNI waktu
berbitjara dirapat umum ini a.l.
menjatakan bahwa ia tak ingin
melihat rakjat Indonesia djadi
pengemis. Tetapi ingin melihat
rakjat Indonesia bekerja dan
berdjuaang keras untuk mendapat
miliknja, sendiri guna menjipta-
kan masjarakat samarata sama-
bahagia.

(Bersambung hal. 2 kol. 8)

**Barang² pameran PREI
boleh didjual**

Djakarta, (Sulindo) — Dalam meng-
hadapi diselenggarakannya Pekan Ra-
ja Ekonomi Internasional I.a.d. Int.
Eko. Djaw. Perindustrian, Ir. Saun-
si, dalam suratnja kepada DENIP te-
lah menjatakan persetudjuannya me-
ngemil pemasukan segala matlam me-
sine serta alat produksi, baik guna
pabrik' besar ataupun mekanisasi dan
lainnja jang semata' digunakan untuk
pameran, dengan tanpa lain sebebun-
nja dari Kem. Perkonomiajn.

Selanjutnja dalam pengumuman
tsh. dijatakan, bahwa setelah pame-
ran selesai maka mesin' itu didijin-
kan didjual kepada umum, dan pen-
jualan devian kemudian dapat di-
bebaskan kepada Djaw. Perindustri-
an, dengan beberapa ketentuan jang
telah ditetapkan.

Casablanca, (Reuter). — Gelemb-
bang' kerumuhan jang terdjadi dim
kota' besar di Marokko sedjak tang-
gal 14 Djuli jbl. telah memudja kor-
ban 70 orang tewas dan 250 orang
lainnja luka'.

**Pangli
Mann**
Makas
TT VII I
for ARI
katon L
senalam
500 peni
ka mau
untuk e
ngan pa
jas) bat
telah di
pakisaa
bahan l
lingan ba
ngan ba
Batik
oleh Pa
upatjan
berada.
R. Wint
kan ole
dung wa
itu suda
pada de
djadi a
Afrika
Pertu
ngan m
Miss A
Kasar, I
beberap
kaian² t
Pertu
meliputi
rong-ke
India, S
gan m
kombina
ret. Uni
djukkan
dari bai
Major A
Lebih
mendjad
lah untu
kan di l
sekalu, l
untuk m
lembur,
djung tu
duk. Bag
dadaka
tama be
Sedang
nita jua
kun had

Lampiran 6

Mendapatkan nama R dimata seluruh rakyat. Itulah sebabnya, etaria Kabinet Mr. A. (dari partai PIR) tidak boleh turut meng- Sebab soal yang dihidalah ditunda atau t-tilihan Umum.

alam Kabinet ini ada dua pendirian. Pihak PSI dan PIR Hazairin spor'nya menghenda-tilihan Umum ditun- tetapi dilain pihak NU, dan Partai Buruh ber- at untuk dilangsung-tilihan Umum tepat unja. Sehingga akhir- pada malam itu tak mbil putusan apa-apa. rja diminta pendapat atan darat

saaha dengan Melati ia Pemilihan Daerah ini dilangsungkan ga- shak' yang menghena- Umum itu ditun- ' alasan lain. Seper- , rapat waktu' Pami- n Daerah, PPI dan ' Hoc baru' ini telah kesimpulan bahwa Pe- sam dapat dilakukan ntak diseuruh Indo-

ng akan dipakai nand- dapat Angkatan Dalam Pemilihan Umum njal kewajiban men- manan. Dan rapat ngkatan dapat jg ba- sungkana di Djakarta bisa memutuskan pen- enurut keterangan Ko- on (TT-1) tidak ber- in keamanan di daerah ma pemilihan Umum. ilarang tidak menja-

**lesia-Fili-
agi?**

ntuk minta

ja

hak minta nasehat

an Katigbak di Manila ik meminta nasehat da- aknya dan perundingan - Filipina masih ha- serasikan lebih lan- renai masalah infiltrasi oleh warganegara' ke- itu.

di hal itu masih belum suatu persetujuan an- belah pihak dan me- a. Kembalinja Katig- nia adalah perlu, ka- dak bisa menanggung- suatu tindakan atas na- tantarja mengenai be- ang vital dengan tiada utabesar Filipina untuk Jose Puentebella, yang ng berada di Manila djungan singkat.

k hari ini masih harus n konsultasinja dengan n akan kembali ke Dja- ggu ini, demikian berita

Gambar Bung Karno ditjatut oleh orang² Masjumi

Katanja Presiden Sukarno sudah djadi anggota Masjumi sekarang

(Oleh: Koresponden Sulindo)

Tandjungkarang. (Sulindo). — Satu propaganda yang sangat li- tijk sekali yang dilakukan oleh orang² Masjumi telah terdjadi dalam akhir ini di daerah Metro Kabupaten Lampung Tengah.

Dengan budjuk dan raju dari orang² Masjumi tersebut sehingga mengakibatkan banjak orang² jg tidak berpantai kena pengaruh, tetapi akhirnja kartu tanda ang- gota Masjumi yang telah diberi- kan itu dikembalikan lagi kepa- da pengurus Masjumi.

Adapun tjara melakukan prop- aganda tersebut ialah dengan djalan menundjukkan gambar Bung Karno yang dibelakangnja ada tanda gambar bulan bintang yang mana djatakannja bahwa Bung Karno kini telah masuk anggota Masjumi, kalau memang tjinta kepada Bung Karno maka sekarang djuga harus masuk ang- gota Masjumi, ialah tandanja Bung Karno telah mendjadi ang- gota Masjumi sambil memperli- hatkan gambar tersebut diatas.

Achirnja terbuka djuga dari orang² Masjumi tersebut akhirnja dapat diketahui djuga bahwa gambar Bung Karno de- ngan bulan bintang, bukan berari- ti bung Karno telah memasuki anggota Masjumi, tetapi Bung Karno selaku Kepala Negara se- dang menghadiri resepsi pembu- kaan Kongres Masjumi yang baru lalu di Surabaya dimana Bung Karno berpidato dipotret yang di- belakangnja ada tanda gambar bulan dan bintang.

Maka setelah diketahui oleh orang² tersebut datanglah kerab- ball berdjum' untuk mengembali- kan kartu tanda anggota Masju- mi yang telah ia terima dari pe- ngurus Masjumi tersebut.

Tidak akan mengadakan serangan dalam Pemilihan Umum

Dalam pada itu bertempat dirua- ngan kantine Kepolisian Tand- djungkarang baru' ini telah di- adakan pertemuan antara pemim- pin' dari 29 partij/organisasi de- ngan Koordinator Keamanan Da- erah Lampung, terketjuai tidak tampak hadir dari Masjumi dan Parindra.

Dalam pertemuan tsb. telah membicarakan sekitar keamanan dan menghadapi pemilihan umum yang akan datang, dimana telah diputuskan bermama dengan apa- bulat yang berupa perjataan ber- sama, baik kepihak atasan ma-upun kepada para anggotanja ma- sng' jang antara lain berbunyi sb: 1. Pemilihan Umum (hari pemun- gutan suara) supaya dilaksa- nakan tepat pada waktunja. 2. Jaki tgl. 29 September 1955 dan dalam menghadapi pemili- han umum tsb. pertal/organisa- si daerah Lampung sanggup me-

lenjapkan segala kegiatan' yang berupa mempertadjam pertent- angan' seperti yang berupa propokasi, intimidasi baikpun - jang berupa fitnahan' ds.

2. bahwa pemilihan umum adalah masalah nasional dan demokrasi rakjat maka dim pemilihan umum tsb. tidak akan ada se- rang-menjerang satu sama lain dan harus diselamatkan ber- sama, demi utk kelantjarannja dan ketertiban pemilihan umum, keselamatan rakjat dan negara chusunja. Demikian korespon- den Sulindo dari Tandjungka- rang.

Gerombolan Daud Beu- reuh gulingkan kereta- api

Medan. (Ant.). — Menurut „Tjerdas" pada tanggal 1 Septem- ber j.l., kereta-api yang berang- kat djam 07.00 pagi dari Langsa, kira' 5 km dari Langsa telah ter- guling sesampainja dekat sebuah djembatan. Ada penumpang' yang terpelanting kedalam air dan ba- njak diantaranya mendapat luka².

Seorang diantara penumpang- nya tewas karena dadanja tertim- pa balok.

Menurut harian ini, sebab ke- tjelakaan itu, ialah karena ada- nya perbuatan sabotase, jaitu de- ngan djalan menggergadji ban- tal' kereta-api.

Selandjutnja dapat dikabar- kan, bahwa tg. 28 djalan 29 Agus- tus j.l. stasiun Peurela di Atjeh Timur telah dibakar oleh gerom- bolan hingga musnah mendjadi abu. Demikian „Tjerdas".

Rapat umum PNI di Tangerang

Djakarta. (Sulindo). — Kemari- n pagi bertempat digedung bioskop „Centrum" Tangerang telah diadakan rapat umum PNI yang dihadiri tidak kurang dari 10.000 orang. Gedung bioskop itu penuh sesak sampai meluap-luap keluar karena besarnya perhati- an.

Telah berbitjara dalam rapat umum ini dari DPP PNI Suwirjo yang mengupas soal mashaenis- me, sedang dari DD Djakarta Raya berbitjara Njomprawoto yang membentangkan situasi poli- tik dalam dan luar negeri dewa- sa ini. Kemudian berbitjara N. Pudjobuntoro yang menguraikan setjara pandjang-lebar pentingnja dan tjara2 pemilihan umum, se- dang dari pihak Pimpinan Pusat Pemuda Demokrat telah berbitja- ra Ischak mengenai soal kepe- nuahan.

Demikian berita yang disampai- kan pada „Sulindo" semalam. —

Dalam hubungan ini sedjak ha- Sabtu jang baru lalu kota' seper Gorang-Garang, Tjaruban, Sido- moer (Magetan), Tjaruban (M- dhu), Bodjonegoro dan Ngandju jang semuanya ada di Djawa T- mur telah digetarkan oleh karap- rje' jang dilakukan oleh PNI.

Pembitjara' utama pada rapa itu adalah Pak Ali Saastroamidjo- jo, Sidik Djojokusarto, Dr. Amih dan Mohammad Supardi. Perh- tian selalu besar pada rapa umum tsb. Sehingga setiap diad- kan rapat umum dialoon-aloo tempat itu selalu penuh sesak. S- dangkan beberapa hari jang la- tatkala Isa Anshary berbitja dan Natsir (Masjumi) berpidat tempat' tsb. separohnja sadja- dak penuh.

Djadi oposisi tambah ku- Dalam hubungan ini kenta- benar, bahwa sedjak PNI ma- djadi partai oposisi, kepernja

IKINI TENTANG PERATUR

IMPORTIR ASI- TIR NASIONAL

Importir² akten oleh pen

Djakarta. (Ant.). — Ditind- setjara objektip maka tiap² ta- bahan aturan pemerintah jang kenakan terutama pada golongan pengusaha, apalagi apabila pe- tujan tersebut diadakan setj- mendadak maka akan berak- menggotjangkan bagi kaum- ngusaha itu sendiri, demikian terangan M. Tabrani dari Ika Importir Nasional Indonesia (NI) sebagai pendapatnja atas keluarkannja peraturan penjeh- naan impor oleh Dewan Me- ter, Menteri Perekonomian, pimpinan LAAPLN.

Sebagai akibat dari peratu- jang mendadak itu, beberapa- portir jang telah mengadakan transaksi perdagangan dengan veranciernja diluar negeri ter- sa mengurungkan transaksi ts- sebut. Sementara ini kalangan pengusaha (importir) masih- lam keadaan menunggu dan i- lihat apa udjud peraturan ts- itu dalam prakteknja, sebab i- menurut pendapatnja kaum pen- saha tidak terpanjang atas ba- nja peraturan' itu, tetapi ja- terpenting ialah melaksanakan ri peraturan' tersebut.

Bagaimana susunan P- sonalia BDP?

Dikatakannja, bahwa sekali- ping dengan Biro Devisen Perdagangan pemerintah akan mendjalankan ngawasan setjara tjernat dan ti- dikan' herregistrasi akan diad- kan dan kepada tiap² import- akan diberikan nomor code. Tah- ni masih mengangsikan apak- orang² jang akan mengerdjak- hal itu nanti tidak akan melak- kan sebagaimana pernah djuga- lakukan oleh orang² KPUI, jai- lindakan' jang dikatakannja ti- da „senonoh".

Mengenai devisen toewijang, oleh pemerintah disediakan pa-

Lampiran 8

...wa posisi kabinet pada waktu se-
karang mereka tetap mengalami
jat, rakjat sendiri sudah tentu le-
bih mengetahuinja.

**DJAWA TENGAH SIAP MENGHA-
DAPI PEMUNGUTAN SUARA**
TGL 29-9

**PSI usulkan agar Pemilihan Umum
diundurkan, terutama utk Djateng**

Sebab daerah ini, pengaruh PSI paling lemah
(Oleh: wartawan politik Sulindo)

Djakarta, (Sulindo). - Ber-
hubung dengan disiarkannya
suatu berita oleh koran PSI
diibukota, bahwa Djawa Ten-
gah belum siap menghada-
pi Pemilihan Umum, salah
seorang anggota Panitia Pe-
milihan Djawa Tengah me-
njatakan kepada „Suluh In-
donesia” bahwa berita itu
sangat sugestif dan tidak ber-
dasar kebenaran sama sekali.
Djawa Tengah adalah salah
satu daerah dimana persi-
apan pemilihan umumnja pa-
ling baik djika dibandingkan
dengan daerah² lain sedjak
beberapa waktu jang lalu.

PSI di Djawa Tengah organi-
satoris dan pengaruhnja paling
lemah djika dibandingkan dengan
daerah² lain dipulau Djawa. Ini
dapat dilihat, bahwa selama PSI
hidup hanja sekali sadja pernah
diadakan rapat umum ialah di
Tegal. Dan disinipun bisa terlak-
sana, karena dibantu Masjumi.
Dilan-lain daerah hal itu tidak
berani mereka adakan, karena
akan menjolok sekali sedikitnja
jumlah orang jang hadir.

Di Jogjakarta, Semarang dan
Magelang, PSI hanja berani me-
ngadakan tjeramah umum dige-
dung tertutup. Sedangkan PNI,
Masjumi PKI dan NU berani me-
ngadakan rapat² umum disegala
kota. Disinilah letaknja betapa
PSI lemah didaerah itu.

Pengaruh PSI hanja kedapatan
dikalahkan beberapa orang ma-
hasiswa „Gadiah Mada” dan
orang² jang dulu mendapat ke-
dudukan waktu Gubernur Budio-
no (sekarang tjalon PSI untuk
pemilihan umum) masih mendja-

di Gubernur Djawa Tengah.
Didaerah lemah, tanda-
gambarnja diperbanjak.
Sudah mendjadi rahasia umum
sekarang di Jogjakarta, Mage-
lang dan Semarang tandagambar
PSI untuk pemilihan umum sa-
ngat banjak kedapatan. Orang
malah pada heran, sebab disuatu
ketjamatan jang tak ada tja-
bangnja/anak tjabang PSI terda-
pat banjak sekali tandagambar-
nja. Dan dimana daerah penga-
ruh PSI tidak ada, maka jang
memasang tanda² gambar PSI
orang² dari luar daerah tsb.
Menjolok kiranja propaganda
PSI ini, bahwa dimana dia tidak
ada pengaruhnja atau pengaru-
nja sangat lemah, tempat terse-
but dihudjani dengan tandagam-
barnja.

Mau tunda Pemilihan Umum
Wartawan politik „Suluh In-
donesia” dapat memperoleh ketera-
ngan, bahwa pelansiran berita
oleh koran PSI itu memang ber-
tutujuan sugestif agar Pemilihan
Umum ditunda sadja. Terutama
untuk Djawa Tengah. Djadi ka-
lau Pemungutan suara dilakukan
berangsur-angsur, nantinja Djawa
Tengah akan ditempatkan pada
giliran paling belakang.

Dengan begitu PSI mengharap-
kan adanja suatu kemungkinan
untuk lebih mengintensifkan kam-
panjenja di Djawa Tengah tsb.
Seperti diketahui, pengaruh
PNI — terutama sekali di Djawa
Tengah Selatan sependjang Pur-
wokerto sampai Jogjakarta — sa-
ngat besar dan boleh dipastikan
merupakan majority—. Djuga di
Pati, Semarang dan Magelang
serta sependjang pantai Utara.
Tjalon² PNI untuk Djawa Ten-
gah sangat kuat, seperti Sarino,
Sartono (Mr.), Hadisubeno dll.
Nama² jang sangat populer dika-
langan rakjat.

Hal² jang k-
ngan ekspor
Selandjaja Me-
hai² jang kurang
ekspor sebagai has
dilakukan. Pertama
jumlah besar ja
dengan kenjataan
pengangkutan den
ma tsb. dalam kot
ritahuan paleu ti
untuk mendapata
kutan lebih dalam
pat pemberian izi
kemudian ternjat
aktentas, Lima,
(undergrading) pe
nakan ekspor. En
(overwicht) pada
ekspor. Tudjuh,
barang, penggela
menten dan IC
pentjuran seluru
jang diekspor.

(Bersambun-
—
**MR. MICH
LUARK
TAH**
Tapi belum
kan l

Djakarta, (A
L.S. Michael, s
Belanda jang t
orang Belanda
lam rangkaian
dilakukan pih
achir tahun 19
1954, pada hari
dikeluarkan da
mah pendjara C

Pihak resmi t
pertanjaan² bel
berikan sesuatu
menurut ketera
oleh „Antara”,
Michael dari da
kukan karena
alasan untuk
lama lagi. Dia
Djanuari 1954,
ditempat tingga
karta, kemudian
dung dan belaka
lagi ke Djakarta
dirumah pendjar

Seperti halnja
orang Belanda je
nahanan atas di
da itu djuga di
duhan terlibat c
gelap dibawah t
punjai maksud c
rubuhkan pemer
donesia.

Lampiran 9

MESIA

BANGSA



No. 576 TH. KE III

Burhanuddin Harahap kasak-kusuk dg. wartawan Amerika

Djakarta. (Sulindo). — Dari kalangan yang mengetahui didapat keterangan, hari Selasa jl. PM Burhanuddin Harahap telah memberikan interview khusus kepada wartawan kantor berita United Press Frank Jordan. Intertu khusus itu kabarnya berkisar kepada garis politik luar negeri yang ditempuh oleh pemerintah III ini. Sebagai diketahui, di masa pemerintahan Ali-Arifin, Frank Jordan banjak membuat pemberitaan yang kurang dibenarkan oleh pemerintah yang lalu oleh karena sering mengemukakan pendapatnya sendiri daripada mengemukakan kenyataan jg. sebenarnya daripada garis politik yang ditempuh oleh pemerintah Ali-Arifin.

Dari beberapa personalia politik di Ibu kota, selanjutnya diperoleh keterangan bahwa masih disangsikan sampai dimana kebenaran daripada apa yang dikatakan oleh PM Burhanuddin oleh karena perajataan demikian baik dikemukakan oleh Burhanuddin Harahap sebagai Perdana Menteri maupun sebagai anggota Masjumi merupakan suatu „surprise“ sebab dimasa yang sudah Masjumi belum pernah mengakui setjara terus terang bahwa partai tsb. menghendaki politik bebas dan aktif terhadap luar negeri.

Pilih siapa dalam Pemilihan Umum ?

IDEOLOGI PNI TJOTJOK DENGAN TJITA² WANITA

(II)
(Oleh: Nj. S. Pudjobuntoro)

Sampailah kita sekarang kepada soal party mana yang akan memungkinkan tertjapainja tjita² wanita itu umumnja. Untuk itu, pertama-tama harus kita perhatikan dasar² serta program perdjjoangan party². Sebab kalau dasarja sudah tidak sejjalan dengan program perdjjoangan serta tjita² wanita, tak mungkin party yang bersangkutan, sekali pun mempunyai anggauta dalam Parlemen, akan memperhatikan keinginan wanita. Misalja sadja kalau pada dasarja party atau orang sudah menjetudjui poligamy, sekalipun sebagian besar dari kaum wanita merasa dilukai hatinja disebabkan perkawinan lebih dari seorang isteri, namun tidaklah party yang bersangkutan menganggap sedikitpun perlu, untuk mengindahkkan perasaan² luka yang dapat mengganggu ketenteraman rumah tangga dan keluarga itu. Melainkan sebaliknya, malahan ditjarinja peraturan² dalam agama yang sekiranya dapat membenarkan perbuaian seseorang yang mempunyai lebih dari seorang isteri. Sekalain² itulah yang mendjadi dasar dalam perkawinan menurut agama Islam. Lebih lanjut, itu bahkan mempengaruhi anggota²wanita dari party itu, hingga mereka lupa bhw agama Islam pada dasarja djuga tidak menghendaki poligamy. Sudah tentu kaum wanita tak dapat mengharap banjak dari seorang sematjam itu, andakata dia terpilih mendjadi anggauta Parlemen sekalipun dia sekarang wanita.

Mengingat hal² sematjam itulah, maka kaum wanita harus awas dan waspada dalam mempertjajakan suaranya kepada seorang tjalon. Untuk itu beberapa hal musti perlu diperhatikan:

1. Dari partai manakah dia? Kalau katanja tidak berparty andakata dia terpilih, akan masuk atau ikut fraksi, party manakah dia? Ini umumnja dapat dilihat dalam daftar mana mereka sekarang ditjalonkan.
2. Apakah dasar dan tudjuan dari partai dalam daftar mana wanita itu ditjalonkan. Adakah djaminan, bahwa apabila partai yang bersangkutan menang dan dapat menguasai pemerintahan negara, tidak akan mengingkari atau mengkhianati djwa proklamasi 17 Agustus 1945.

Ini perlu diperhatikan: karena kita semuanya, tentunya sedar bahwa kalau wanita selama revolusi ikut berdjjoang dengan tidak mengenal derah pajah serta pe-

OVERSTE SAMBAS DJAMIN KEAMANAN KOTA DJAKARTA

Selama dilangsungkan pemungutan suara untuk DPR nanti

(Oleh: wartawan kota Sulindo)

Djakarta. (Sulindo): — Bertempat di KMKBDR, kemarin telah dilangsungkan konperensi pers mengenai keamanan dalam pemilihan umum nanti terutama menjelang hari Pemungutan Suara yang akan dilangsungkan pada tgl. 29 September yang akan datang. Let. Kol. Inf. Sambas dalam keterangannya kepada pers menerangkan bahwa untuk mendjaga keamanan itu, segala kekuatan

Tidak ada tanda² kekatjauan.

Let. Kol. Inf. Sambas lebih djauh menerangkan bahwa sampai saat ini, menurut penjelidikannya tidak ada tanda² kekatjauan keamanan. Djuga gerombolan yang dikuatirkan akan mengadakan kekatjauan mendjelang tgl. 29 September nanti djuga tidak ada. Tetapi meski demikian, pihak alat² Negara tidak tinggal diam.

Lampiran 11

Lampiran 8

No. 360/A-B - 6 - DALAM NEGERI, SENIN, 26-12-'55 (X)

112

8. HASIL2 SEMENTARA DJAWA TENGAH

Semarang, 25/12 (Antara).

Menurut angka2 sementara jang dikumpulkan oleh "Antara" Semarang hingga siang ini, ternyata dalam pemungutan suara untuk Konstituante j.l. diantara partai terbesar PNI tetap mendapat suara terbanyak yaitu 3.060.138. Kemudian berturut-turut disusul PKI dengan angka 2.273.809, N.U. 1.720.318 dan Masjumi 877.697. Angka2 tsb. berasal dari TPS2 jang sebagian besar sudah selesai menghitung.

Djawa Tengah terdiri dari 37 daerah pemilihan kabupaten, meliputi 18.045 TPS dengan jumlah pemilihnya jang terdaftar 10.077.000 orang. Sepanjang keterangan2 jang didapat umumnja jumlah pemilih jang menggunakan haknja agak kurang dibanding dengan waktu pemilihan tanggal 29 September j.l. yaitu rata2 antara 70 - 80%. Pada pemilihan untuk DPR dulu rata2 sampai 90% lebih.

Dibawah ini hasil2 jang ditjapai oleh "4 besar" tsb. ditisp2 daerah baik untuk DPR maupun Konstituante sbb:

Daerah	P.N.I.		N.U.	
	D.P.R.	Konst.	D.P.R.	Konst.
1. Semarang	24.687	29.367	✓82.329	48.996
2. Kendal	72.541	71.661	71.483	74.321
3. Demak	41.793	41.728	100.974	109.124
4. Purwodadi	60.175	69.009	59.935	59.880
5. Pati	108.629	107.150	52.219	52.569
6. Kudus	43.927	38.262	63.007	61.354
7. Djepara	45.999	53.043	110.953	105.221
8. Rombang	50.745	50.153	38.007	40.368
9. Blora	73.926	78.612	29.652	33.337
10. Pekalongan	212.915	123.427	128.732	82.251
11. Pemalang	158.156	152.335	77.653	84.969
12. Tegal	132.159	141.871	78.855	86.269
13. Brebes	150.593	161.863	80.965	84.127
14. Banjumas	220.879	225.010	77.050	80.963
15. Tjilatjap	130.605	97.821	48.718	48.457
16. Parbolinggo	115.820	120.077	55.983	58.328
17. Bondjarnegara	101.121	105.392	21.245	23.071
18. Magelang	64.400	80.532	137.027	137.320
19. Temanggung	28.176	31.033	41.009	42.942
20. Wonosobo	90.106	90.723	67.850	71.305
21. Purworedjo	152.358	154.659	51.448	52.086
22. Kebumen	125.306	133.791	103.803	104.925
23. Klaten	100.190	110.236	3.867	4.641
24. Bojoleli	41.438	47.817	29.934	31.148
25. Sragen	131.072	124.751	1.915	2.338
26. Sukohardjo	51.078	43.576	550	398
27. Karanganyar	66.648	81.008	320	631
28. Wonogiri	167.407	175.016	2.521	2.631
29. Bantul	40.820	51.864	37.983	40.249
30. Sleman	47.570	55.672	26.773	28.131
31. Kulonprogo	45.563	49.930	20.422	19.974
32. Gunungkidul	24.891	24.011	5.703	6.741
33. Kab. Semarang	21.452	27.641	18.882	19.700
34. " Pekalongan	17.842	12.526	11.968	12.321
35. " Tegal	12.106	12.521	4.267	4.907
36. " Solo	31.871	37.122	1.411	2.000
37. " Jogjo	21.839	30.048	2.395	2.924
D j u m l a h	2.044.073	3.060.138	1.747.848	1.720.318
	3.025.973	3.060.128	1.747.848	1.720.318

Antara 26 Desember 1955

Lampiran 12

113

360/A.B.

- 7 - DALAM NEGERI, SENIN, 26-12-1955 MS.-

HASIL2 (2).

	DPR P. K. I	KONST.	DPR Masjumi	KONST.
1. Semarang	143.738	140.742	4.588	5.149
2. Kendal	60.901	61.749	31.132	30.916
3. Demak	39.251	39.550	5.466	4.973
4. Purwodadi	124.028	122.384	12.752	13.800
5. Pati	85.430	84.396	13.401	19.082
6. Kudus	26.998	32.683	5.419	5.574
7. Djepara	19.377	21.705	10.953	10.991
8. Rembang	26.999	27.616	11.331	11.974
9. Blora	80.380	77.777	12.972	14.441
10. Pekalongan	27.190	11.727	20.025	17.167
11. Pemalang	64.260	61.737	11.879	12.126
12. Tegul	32.869	34.215	53.157	54.102
13. Brebes	41.953	47.217	49.432	50.159
14. Banjumas	36.185	33.760	43.533	45.716
15. Tjilatjap	170.756	167.219	32.679	33.252
16. Purbolinggo	8.726	9.947	51.613	55.193
17. Bandjarnegara	12.853	16.186	36.945	38.524
18. Magelang	76.452	74.860	39.468	40.020
19. Temanggung	65.764	65.612	19.625	19.853
20. Wonosobo	11.492	13.621	7.207	8.756
21. Purworedjo	23.923	22.642	1.942	9.520
22. Kebumen	67.171	63.705	42.721	41.773
23. Klaten	204.296	197.019	48.407	47.671
24. Bojolali	143.565	146.024	38.701	43.918
25. Sragen	27.841	39.878	40.682	36.681
26. Sukohardjo	86.689	93.621	13.888	16.095
27. Karanganyar	43.182	52.729	10.658	14.757
28. Wonogiri	142.753	136.676	25.896	27.744
29. Bantul	34.287	30.940	34.838	34.871
30. Sleman	35.885	34.188	30.872	29.304
31. Kulonprogo	12.459	12.292	23.967	16.168
32. Gunung Kidul	95.732	88.080	16.017	16.608
33. Kabupaten Semarang	97.053	91.727	6.390	7.154
34. Kabupaten Pekalongan	2.540	2.777	5.891	6.212
35. Kabupaten Tegal	6.637	6.261	7.037	6.930
36. Kabupaten Solo	75.345	70.834	15.168	13.740
37. Kabupaten Jogja	43.954	39.713	17.982	16.783
	2.298.514	2.273.809	854.664	877.697
	2.298.914	2.273.809	854.664	877.697

-M-

Antara 26 Desember 1955

Lampiran 13



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL (FIS)

Gedung C7Kampus Sekaran Gunungpati, Semarang 502290
Website: fis.ac.id, E-mail: fis@unnes.ac.id, Telp./Fax. (024) 8508006

Nomor : 2524/H37.1.3/PP/2010
Lamp. : 1 Exp.
Hal : Permohonan Ijin Penelitian

06 DEC 2010

Yth. Kepala Badan Arsip Daerah
Prov. Jawa Tengah

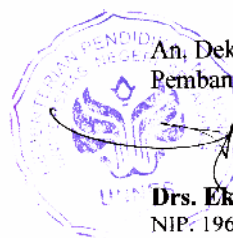
Dengan hormat,

Bersama ini, kami mohon ijin pelaksanaan penelitian untuk menyusun skripsi/ Tugas akhir oleh mahasiswa sebagai berikut:

Nama : **Santoso M.**
NIM : 3101404005
Semester : XIII (tiga belas)
Prodi : Pend. Sejarah
Judul : "*Strategi PNI Dalam Memenangkan Pemilihan Umum 1955 di Jawa Tengah*".

Alokasi Waktu : bulan Desember 2010sampai dengan Februari 2011
Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon agar mahasiswa yang bersangkutan diijinkan untuk mengadakan penelitian di instansi / lembaga yang Saudara pimpin.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



An, Dekan,
Pembantu Dekan Bid. Akademik

Drs. Eko Handoyo, M.Si.
NIP: 19640608 198803 1 001

Tembusan :
1. Dekan
2. Ketua Jurusan Sejarah
Fakultas Ilmu Sosial Unnes